



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) OPD TAHUN 2019

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Alhamdulillah, segala puji kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang pada Tahun Anggaran 2020 dapat terselesaikan dengan baik. Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintah daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pendukung di bidang perencanaan.

Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban setiap instansi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah atas kinerja Pemerintahan yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan system tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu melalui LKjIP tersajikan gambaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang secara terukur dan menilai seberapa tepat perencanaan kinerja terlaksana dan mendukung perwujudan masyarakat yang sejahtera.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting didalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta adanya pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang dilakukan oleh suatu organisasi.

LKjIP adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Dengan demikian LKjIP merupakan salah satu sarana untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2019 disusun sesuai dengan amanat yang diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

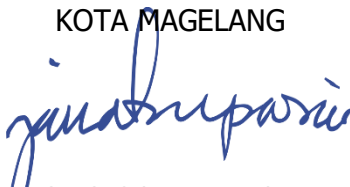
LKJIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2019 yang disusun untuk memenuhi kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban baik keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi khususnya dalam mencapai sasaran yang tercermin di dalam indicator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. Penyusunan dokumen LKJIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang semoga dapat memberikan gambaran yang transparan, objektif dan terukur mengenai capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang pada tahun 2019, sebagai bahan evaluasi untuk kinerja yang lebih baik di tahun-tahun yang akan datang.

Akhir kata kami sampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya LKJIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2019. Semoga laporan ini berguna sebagai Bahan evaluasi dan dasar perbaikan kinerja pada tahun-tahun berikutnya serta dapat sebagai cermin pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2019.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Magelang, Maret 2020

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA MAGELANG



Ir. JOKO SOEPARNO, MPL

Pembina Utama Muda
NIP. 19601212 198903 1 018



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018.....	1-1
1.2. Gambaran Umum Organisasi	1-4
1.3. Isu Strategis Organisasi	1-41
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis Tahun 2016-2021	2-1
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	2-18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2018	3-1
3.2. Akuntabilitas dan Realisasi Anggaran Tahun 2018.....	3-49
3.3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	3-63
3.4. Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan	3-69
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	4-1
4.2. Strategi Peningkatan Kinerja	4-7

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018	1-28
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Jabatan Tahun 2018.....	1-29
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Yang Pensiun dalam Tiga Tahun Ke Depan	1-31
Tabel 1.4	Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Golongan / Pangkat Tahun 2018	1-32
Tabel 1.5	Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Tingkat Pendidikan.....	1-33
Tabel 1.6	Komposisi Pegawai Bappeda di tiap bidang Menurut Pendidikan Formal, jabatan, pangkat golongan dan pelatihan struktural.....	1-35
Tabel 1.7	Komposisi dan Kebutuhan Pegawai Bappeda Kota Magelang Menurut Pendidikan Formal	1-37
Tabel 1.8	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda Kota Magelang.....	1-42
Tabel 1.9	Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal).....	1-44
Tabel 2.1	Keterkaitan Antara Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan dan Program/Kegiatan	2-7
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2018	2-18
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2018.....	2-20
Tabel 2.4	Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2018.....	2-21

Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2018.....	3-4
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Perencanaan daerah Partisipatif Berbasis Data Yang Akurat dan Akuntabel	3-6
Tabel 3.3	Capaian Indikator Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan.....	3-14
Tabel 3.4	Mitra Kerja Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Magelang.....	3-22
Tabel 3.5	Capaian Optimalnya mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.....	3-25
Tabel 3.6	Inovasi Perencanaan	3-32
Tabel 3.7	Capaian Indikator Terwujudnya Konsistensi Perencanaan Jangka Menengah dengan Perencanaan Tahunan.....	3-35
Tabel 3.8	Capaian Indikator Ketersediaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasarana dan bidang sosial budaya yang berkualitas Tahun 2018.....	3-36
Tabel 3.9	Capaian Indikator Kinerja Sasaran tahun 2018 di bandingkan dengan Capaian Indikator Sasaran Tahun 2017 dan 2016	3-37
Tabel 3.10	Capaian Indikator Program yang memberikan Kontribusi dalam capaian sasaran Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2018.....	3-39
Tabel 3.11	Realisasi Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2018.....	3-49
Tabel 3.12	Realisasi Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2018 dibandingkan dengan Realisasi Anggaran Tahun 2016 dan 2017.....	3-50
Tabel 3.13	SILPA Tahun Anggaran 2018 di bandingkan dengan Tahun 2017 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang	3-54
Tabel 3.14	Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2018	3-57
Tabel 3.15	Komposisi dan Kebutuhan Pegawai (kondisi per bidang) Bappeda Kota Magelang Menurut Pendidikan Formal Tahun 2018....	3-63

Tabel 3.16	Total Aset Bappeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2018	3-66
Tabel 3.17	Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2018	3-67
Tabel 3.18	Laporan Kinerja Pemerintah Kota Magelang Tahun 2018 Bappeda Kota Magelang	3-70

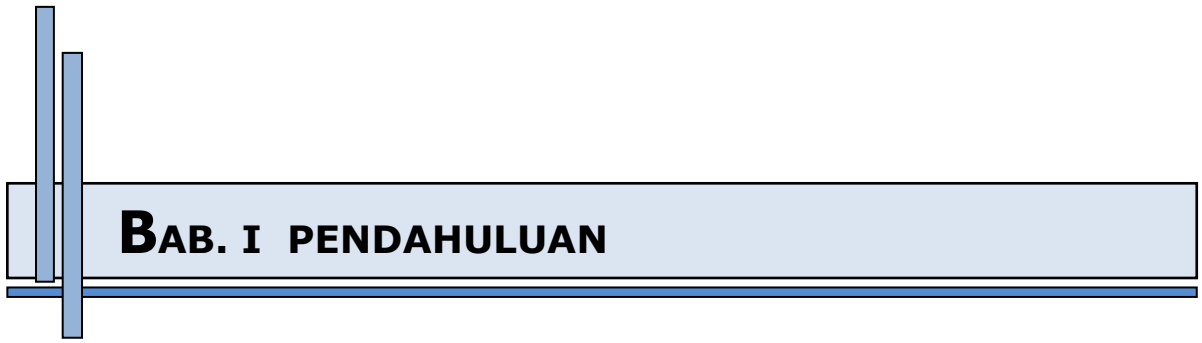
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang	1-7
Gambar 1.2	Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018.....	1-29
Gambar 1.3	Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Jabatan Tahun 2018.....	1-30
Gambar 1.4	Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Golongan Tahun 2018.....	1-32
Gambar 1.5	Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2018.....	1-34
Gambar 1.6	Komposisi dan Kebutuhan Pegawai Bappeda Kota Magelang berdasarkan beban kerja	1-38
Gambar 2.1	Cascading 1 Kinerja Sasaran Terwujudnya Perencanaan daerah Partisipatif Berbasis Data Yang Akurat dan Akuntabel.....	2-13
Gambar 2.2	Cascading 2 Kinerja Sasaran Kemampuan Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat dan Kemitraan.....	2-14
Gambar 2.3	Cascading 3 Kinerja Tujuan Renstra/Sasasarn Strategis IKU Optimalnya mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	2-15
Gambar 2.4	Cascading 4 Kinerja Tujuan Renstra/Sasasarn Strategis IKU Terwujudnya Konsistensi Perencanaan Jangka Menengah dengan Perencanaan Tahunan	2-16
Gambar 2.5	Cascading 5 Kinerja Tujuan Renstra/Sasasarn Strategis IKU Terwujudnya Dokumen Perencanaan dan Implemtasi Pembangunan Bidang Ekonomi, Bidang Fisik dan Bidang Sosial yang Berkualitas	2-17

Gambar 3.1	Peran Data dalam Siklus Perencanaan	3-10
Gambar 3.2	Screenshot DATA GO sebagai Data Centre kota Magelang.....	3-12
Gambar 3.3	Tampilan Menu pada PPID / <i>DATA GO</i> Kota Magelang.....	3-13
Gambar 3.4	Konsultasi Publik Anak dan Lansia untuk menjangkau Aspirasi dan usulan dalam Penyusunan Dokumen RKPD 2019	3-15
Gambar 3.5	Kepala Bappeda beserta peserta Konsultasi Publik Anak dan Lansia dalam Penyusunan Dokumen RKPD 2019	3-16
Gambar 3.6	Paparan Kepala Bappeda dalam Konsultasi Publik dalam Penyusunan Dokumen RKPD 2019 dengan Tema “Produktif Bersama Mitra”	3-16
Gambar 3.7	Konsultasi Publik yang diikuti OPD, Lembaga Masyarakat, Organisasi Profesi, LSM, Parpol dalam Penyusunan Dokumen RKPD 2019.....	3-17
Gambar 3.8	Pelaksanaan FGD Kota Layak Anak dan FGD MKSB.....	3-17
Gambar 3.9	Pelaksanaan FGD, Smart City dan FGD Monev 100-0-100	3-18
Gambar 3.10	Penyamaan Persepsi dalam Penyusunan RKPD 2019 kepada seluruh OPD yang dilaksanakan oleh Kepala Bappeda , Sekda Kota Magelang dan Tenaga Ahli dari UNS.....	3-19
Gambar 3.11	Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota Magelang tahun 2019	3-19
Gambar 3.12	Pelaksanaan Musrenbang Wilayah tahun 2019 di Wonosobo ...	3-20
Gambar 3.13	Berbagai hasil kreativitas dan inovasi dari pelajar dan masyarakat yang ditampilkan dalam penyelenggaraan Musrenbang RKPD 2019.....	3-20
Gambar 3.14	Pelaksanaan Forum OPD dalam Penyusunan RKPD 2019.....	3-26
Gambar 3.15	Pelaksanaan FGD 100-0-100	3-26
Gambar 3.16	Pelaksanaan FGD SDGs	3-26
Gambar 3.17	Pelaksanaan FGD Kemiskinan	3-27
Gambar 3.18	Pelaksanaan FGD Smart City.	3-27
Gambar 3.19	Pelaksanaan Penyelenggaraan Musrenbang di Kecamatan Magelang Utara.....	3-27
Gambar 3.20	Pelaksanaan Penyelenggaraan Musrenbang di Kecamatan Magelang Tengah.....	3-28
Gambar 3.21	Pelaksanaan Penyelenggaraan Musrenbang di Kecamatan Magelang Selatan	3-28

Gambar 3.22	Screenshot aplikasi <i>e-Musrenbang</i> di dalam SIPPD Kota Magelang	3-29
Gambar 3.23	<i>Screenshot</i> aplikasi e-Pokir di dalam SIPPD Kota Magelang.....	3-30
Gambar 3.24	<i>Screenshot SIM Penanggulangan Kemiskinan</i> Kota Magelang.....	3-30
Gambar 3.25	<i>Screenshot Tampilan SIM Penanggulangan Kemiskinan</i> Kota Magelang.....	3-31
Gambar 3.26	<i>Screenshot</i> Sistem Informasi Perencanaan	3-31
Gambar 3.27	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2018 dibandingkan dengan Tahun 2016 dan 2017	3-38
Gambar 3.28	Pelaksanaan Workshop Perencanaan Pembangunan untuk meningkatkan Kapasitas Aparatur Perencana dengan Narasumber dari KemenPan –RB Republik Indonesia.....	3-44
Gambar 3.29	Pelaksanaan Workshop Perencanaan Pembangunan untuk meningkatkan Kapasitas Aparatur Perencana dengan Narasumber Praktisi Perencanaan Daerah dari Perguruan Tinggi.....	3-44
Gambar 3.30	Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Pendidikan untuk Semua (PUS) dan Kegiatan Expose Penanggulangan Kemiskinan	3-45
Gambar 3.31	Pelaksanaan Kegiatan FEDEP berupa Pelatihan UMKM bersama dan Kegiatan Pameran UMKM di Paragon Hotel	3-47
Gambar 3.32	Anggaran dan realisasi Belanja Langsung Bappeda dan Tahun 2018.....	3-50
Gambar 3.33	Anggaran dan realisasi Belanja Tidak Langsung Bappeda dan Tahun 2016, 2017 dan tahun 2018	3-51
Gambar 3.34	Realisasi Serapan Anggaran Belanja Langsung Tahun 2016 , 2017 dan Tahun 2018 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang	3-52
Gambar 3.35	Realisasi Serapan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016 , 2017 dan Tahun 2018	3-52

Gambar 3.36	Realisasi Serapan Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Tahun 2016,2017 dan Tahun 2018 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang	3-53
Gambar 3.37	Komposisi dan Kebutuhan Pegawai Bappeda Kota Magelang berdasarkan Beban Kerja	3-64



BAB. I PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2019

- 1.1 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- 1.2 Gambaran Umum Organisasi
- 1.3 Isu Strategis Organisasi

A. Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi, misi dan tujuan organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi Pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi, misi dan tujuan organisasi dalam berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategic yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang di inginkan untuk di capai. Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, sasaran yang telah di tetapkan dalam rencana strategic. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja tahunan. Adapun hasil dan capaian dari Rencana Kinerja Tahunan ini akan di laporkan secara rutin dan berkala dalam satu dokumen yang di sebut dengan nama Laporan Kinerja Organisasi.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting di dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta adanya pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang dilakukan oleh suatu organisasi.

Dasar hukum pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang secara teknis di tindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang sekaligus sebagai pengganti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tersebut maka setiap satuan kerja perangkat daerah wajib menyelenggarakan SAKIP. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana di atur di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014, bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Tujuan berikutnya adalah sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sehingga ruang lingkup penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja.

Dengan demikian akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi instansi pemerintah secara terukur, dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Berdasarkan peraturan sebagaimana tersebut diatas, maka mulai tahun 2014 penyusunan laporan akuntabilitas SKPD mengalami perubahan nama/sebutan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disamping juga terjadi beberapa perubahan substansi apabila dibandingkan dengan laporan akuntabilitas pada tahun – tahun sebelumnya

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Laporan kinerja yang disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja ini akan

menyajikan informasi terkait : a). Uraian singkat organisasi; b). Rencana dan target kinerja yang ditetapkan; c). memberikan gambaran terkait dengan pengukuran kinerja serta; d). Memberikan gambaran Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis yang dilakukan dalam dokumen laporan kinerja ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Tujuan dari pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Adapun tujuan dari penyusunan LKJIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang tahun 2019 ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang tahun 2019 serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/19/ M.PAN/11/ 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Organisasi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/ M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

D. Sistematika

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJI_p) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Dasar Hukum
- D. Sistematika

1.2 Gambaran Umum Organisasi

1.3 Isu Strategis Organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Kota Magelang Tahun 2016-2021

2.2 Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2019

3.2 Realisasi Anggaran

3.3 Analisis Efisiensi Sumber Daya

3.4 Pencapaian Pelaksanaan Program Kegiatan

BAB IV PENUTUP

1.2 Gambaran Umum Organisasi

A. Dasar Hukum

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Magelang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Adapun berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kota Magelang yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan. Sedangkan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang yang terdiri dari :

a. Kepala Badan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas dan fungsi membantu Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

b. Sekretariat

Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkup Badan. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Bappeda dibantu oleh:

- (1) Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian
- (2) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

c. Bidang Perencanaan

Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dalam melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Perencanaan dibantu oleh

- (1) Kepala Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan
- (2) Kepala Sub Bidang Data, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

d. Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah

Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyiapan kebijakan, pengkoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan, pembinaan dan pengendalian pada bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah yang meliputi urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, perindustrian, perdagangan, koperasi-Usaha

Mikro, pertanian, perikanan, pangan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan dan perhubungan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Ekonomi dibantu oleh :

- (1) Kepala Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro;
- (2) Kepala Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup;
- (3) Kepala Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah.

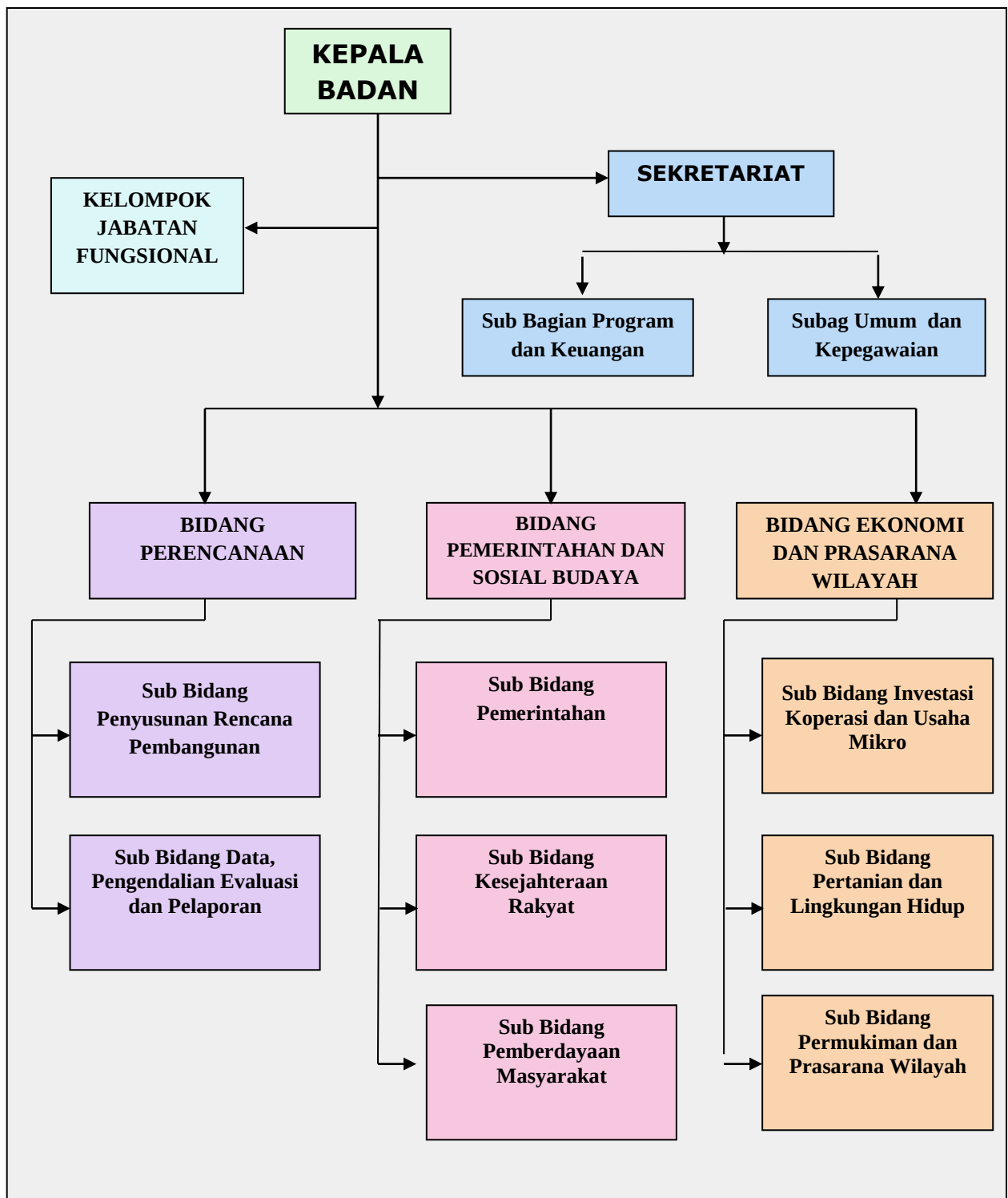
e. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyiapan kebijakan, pengkoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan, pengendalian, evaluasi dan pembinaan pada bidang pemerintahan dan sosial budaya yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, kearsipan, pariwisata, dan unsur penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pemerintahan Sosial Budaya dibantu oleh :

- (1) Kepala Sub Bidang Pemerintahan;
- (2) Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- (3) Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Sumber : Perda Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 dan Perwal Nomor 47 Tahun 2017

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Magelang**

B. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang

Berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 47 Tahun 2016, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang yang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kota Magelang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki tugas pokok, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2016, yaitu sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi – fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkungan tugasnya;
- e. Pengkoordinasian, pengarahan dan pelaksanaan dalam penyusunan program, teknis ketatausahaan, pengelolaan keuangan dan kepegawaian badan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

Adapun tugas pokok dan fungsi dari tiap-tiap komponen aparatur yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Magelang antara lain :

1. Nama Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tugas Pokok : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di maksud di atas, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;

- b. Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya.

Rincian Tugas :

- a. Merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- b. Merumuskan kebijakan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah.
- c. Merumuskan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah.
- d. Merumuskan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi semua urusan pemerintah daerah.
- e. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi semua urusan pemerintah daerah.
- f. Melaksanakan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi semua urusan pemerintah daerah.
- g. Menyusun Standar Barang, Standar Kebutuhan, Standar Harga dan Standar Biaya.
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- i. Mengendalikan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang milik daerah dilingkup tugasnya.
- j. Membina, mengarahkan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- k. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- l. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

2. Nama Jabatan : Sekretaris
- Tugas Pokok : Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkup Badan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian bidang-bidang dalam rangka penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- b. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkup Sekretariat.
- c. Pelaksanaan pengelolaan urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- d. Pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- e. Pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Sekretariat.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sekretariat.
- b. Mengkoordinir penyusunan dokumen perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- c. Mengkoordinir penyusunan program dan kegiatan tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- d. Mengkoordinir penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- e. Mengkoordinir penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkup Sekretariat.
- f. Memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh bidang di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- g. Melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- h. Melaksanakan urusan umum, kerumahtanggaan, perlengkapan dan penatausahaan barang milik daerah di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- i. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- j. Mengawasi dan mengendalikan program dan kegiatan di lingkup Sekretariat.
- k. Melaksanakan pengkoordinasian terkait proses pengadaan barang/jasa di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- l. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat.
- m. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.

- n. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
 - o. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sekretariat.
 - p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.
3. Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
- Tugas Pokok : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan rencana program dan evaluasi program kerja serta melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan.
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan.
- b. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- c. Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan usulan dari Sekretariat dan masing - masing Bidang.
- d. Melaksanakan penyusunan rencana kerja anggaran berdasarkan usulan dari Sekretariat dan masing-masing Bidang serta penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan masing-masing Bidang dalam rangka proses pencairan keuangan terkait pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- f. Melaksanakan tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- g. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- h. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

- i. Melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- j. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan.
- l. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- m. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan.
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

4. Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
- Tugas Pokok : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat dan pengelolaan kearsipan.
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga dan urusan perlengkapan di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- d. Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

- f. Memproses administrasi usulan angka kredit bagi tenaga fungsional di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan DaerahBadan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- g. Melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- i. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- j. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- k. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

5. Nama Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan

Tugas Pokok : Kepala Bidang Perencanaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, data, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Bidang Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Perencanaan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang Perencanaan;
- c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Perencanaan;
- d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Perencanaan.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Perencanaan.
- b. Menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan.
- c. Mengkoordinir perumusan kebijakan teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
- d. Mengkoordinir perumusan kebijakan teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah

Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

- e. Menyelia penyusunan data, pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.
- f. Mengkoordinir pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kebijakan perencanaan serta pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.
- g. Mengkoordinir evaluasi kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.
- h. Mengkoordinir evaluasi kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Perencanaan.
- j. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- k. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- l. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Perencanaan.
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

6. Nama Jabatan	: Kepala Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan
Tugas	: Kepala Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dalam melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.
- b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana pembangunan daerah.
- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.
- d. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
- e. Menyiapkan bahan pengkoordinasian, pelaksanaan serta pembinaan kebijakan dan perencanaan serta pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan program pembangunan lainnya.
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.
- g. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- h. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- i. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan kegiatan Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

7. Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan
- Tugas : Kepala Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dalam melaksanakan kegiatan penyusunan rencana program, evaluasi program kerja dan pelaksanaannya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Pelaksanaan kegiatan Seksi Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.
- b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Menyiapkan bahan penyusunan data, pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya;
- d. Menyiapkan bahan pengkoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan pengendalian, evaluasi, pelaporan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.
- e. Menyiapkan bahan evaluasi kebijakan teknis pengendalian, evaluasi, pelaporan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.
- f. Menyiapkan bahan penyusunan standar barang, standar kebutuhan, standar harga dan standar biaya.
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.
- h. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- i. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- j. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan kegiatan Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

8. Nama Jabatan : Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah
- Tugas Pokok : Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyiapkan kebijakan, pengkoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan, pembinaan dan pengendalian pada bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah yang meliputi urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, perindustrian, perdagangan, koperasi-Usaha Mikro, pertanian, perikanan, pangan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan dan perhubungan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di maksud di atas, Kepala Bidang Ekonomi dan Fisik Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- b. Menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- c. Menyusun draft kebijakan teknis Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- d. Menyusun draft perencanaan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- e. Menyelia penyusunan rencana pembangunan yang disusun oleh Unit Kerja/ Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya.
- f. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- g. Menyelia penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah sesuai bidang tugasnya.
- h. Menyelia kegiatan supervisi dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah sesuai bidang tugasnya.
- i. Menyelia penyusunan rencana pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah yang meliputi urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, perindustrian, perdagangan, koperasi-Usaha Mikro, pertanian, kelautan dan perikanan, pangan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan dan perhubungan.
- j. Mengkaji dan menganalisa permasalahan di Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya.
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- l. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.

- m. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas / kegiatan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

9. Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro.
- Tugas Pokok : Kepala Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang meliputi urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, perindustrian, perdagangan dan Koperasi - Usaha Mikro.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro.
- b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro.
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro.
- b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro.
- c. Mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, perindustrian, perdagangan dan Koperasi – Usaha Mikro.
- d. Mengolah dan menganalisa data sebagai bahan menyusun perencanaan yang berhubungan dengan urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, perindustrian, perdagangan dan Koperasi – Usaha Mikro.
- e. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro.
- f. Mengkoordinir dan memadukan rencana pembangunan yang disusun oleh Unit Kerja/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

- g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah sesuai dengan bidangnya.
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan supervisi dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah sesuai dengan bidangnya.
- i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, perindustrian, perdagangan, dan Koperasi – Usaha Mikro.
- j. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, perindustrian, perdagangan, dan Koperasi – Usaha Mikro.
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro.
- l. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- m. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas / kegiatan kegiatan Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro.
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

10. Nama Jabatan	: Kepala Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup
Tugas Pokok	: Kepala Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang meliputi urusan pertanian dan perikanan, pangan dan lingkungan hidup.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup.
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup.
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup.

- b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Pertanian dan Lingkungan Hidup.
- c. Mengkaji data dan informasi lainnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan urusan pertanian, perikanan, pangan dan lingkungan hidup.
- d. Mengolah dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan perencanaan yang berhubungan dengan urusan pertanian, perikanan, pangan dan lingkungan hidup.
- e. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup.
- f. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan yang disusun oleh Unit Kerja/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya.
- g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah sesuai dengan bidangnya.
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan supervisi dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah sesuai dengan bidangnya.
- i. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah urusan pertanian, kelautan dan perikanan, pangan dan lingkungan hidup.
- j. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan pertanian, kelautan dan perikanan, pangan dan lingkungan hidup.
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup.
- l. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- m. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup.
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

11. Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah
- Tugas Pokok : Kepala Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta perhubungan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- c. Mengkaji data dan informasi lainnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Perhubungan.
- d. Mengolah dan menganalisa data sebagai bahan menyusun perencanaan yang berhubungan dengan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Perhubungan.
- e. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- f. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan yang disusun oleh Unit Kerja/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya.
- g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah sesuai dengan bidangnya.
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan supervisi dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah sesuai dengan bidangnya.
- i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Perhubungan.
- j. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya.
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- l. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- m. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.

- n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

12. Nama Jabatan	: Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
Tugas Pokok	: Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyiapan kebijakan, pengkoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan, pengendalian, evaluasi dan pembinaan pada bidang pemerintahan dan sosial budaya yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, kearsipan, pariwisata, dan unsur penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
- c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
- d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
- b. Menganalisis dan mengkaji data serta informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Pemerintahan dan Sosial Budaya.

- c. Mengkoordinir penyusunan rencana pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, kearsipan, pariwisata dan unsur penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan.
- d. Menyusun draft kebijakan teknis Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
- e. Menyusun draft perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
- f. Menyelia penyusunan rencana pembangunan yang disusun oleh Unit Kerja/ Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya.
- g. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
- h. Menyelia kegiatan supervisi dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah sesuai dengan bidangnya.
- i. Mengkaji dan menganalisa permasalahan di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya.
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
- k. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- l. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- m. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

13. Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat
 Tugas Pokok : Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan pada urusan pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, kesehatan dan sosial

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.

- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Kesejahteraan Rakyat.
- c. Mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan yang berhubungan dengan urusan pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, kesehatan dan sosial.
- d. Mengolah serta menganalisa data dan informasi sebagai bahan penyusunan perencanaan yang berhubungan dengan urusan pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, kesehatan dan sosial.
- e. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- f. mengkoordinir dan memadukan penyusunan rencana pembangunan yang disusun oleh Unit Kerja/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya.
- g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah sesuai dengan bidangnya.
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan supervisi dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah sesuai dengan bidangnya.
- i. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, kesehatan dan sosial serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya.
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- k. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- l. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- m. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

14. Nama Jabatan : Kepala Subid Pemberdayaan Masyarakat.
 Tugas Pokok : Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pada urusan

kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa serta ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Pemberdayaan Masyarakat.
- c. Mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan yang berhubungan dengan urusan kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa serta ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- d. Mengolah dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan perencanaan yang berhubungan dengan urusan kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa serta ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- e. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- f. Mengkoordinir dan memadukan rencana pembangunan yang disusun oleh Unit Kerja/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

- g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah sesuai dengan bidangnya.
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan supervisi dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah sesuai dengan bidangnya.
- i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah urusan kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa serta ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- j. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa serta ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- l. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- m. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

15. Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Pemerintahan.
- Tugas Pokok : Kepala Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pada unsur penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bidang Pemerintahan fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan.

- b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pemerintahan.
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan.
- b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Pemerintahan.
- c. Mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan unsur penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- d. Mengolah dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan perencanaan yang berhubungan dengan unsur penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- e. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Sub Bidang Pemerintahan.
- f. Mengkoordinir dan memadukan rencana pembangunan yang disusun oleh Unit Kerja/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya.
- g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah sesuai dengan bidangnya.
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan supervisi dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah sesuai dengan bidangnya.
- i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah unsur penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- j. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan unsur penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan.
- l. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- m. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.

- n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bidang Pemerintahan.
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

C. Sumber Daya

a. Susunan Kepegawaian

Kondisi Sumber daya Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang sampai dengan keadaan Desember 2019 berjumlah 33 (tiga puluh tiga) orang Aparatur Sipil Negara dan 1 (satu) orang tenaga kontrak dengan komposisi sebagai berikut:

❖ Menurut Jenis Kelamin:

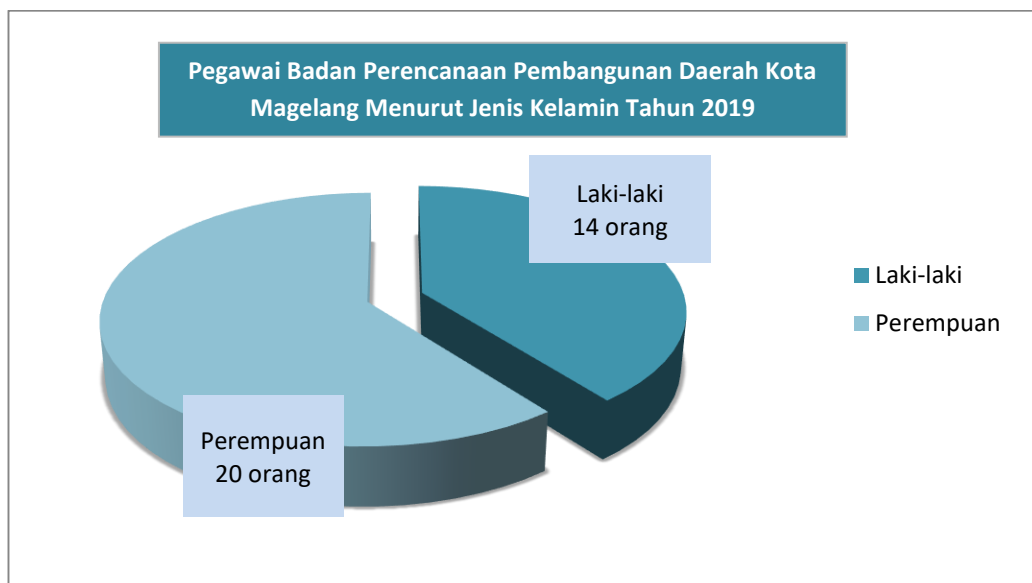
Pegawai Bappeda Kota Magelang menurut jenis kelamin lebih didominasi oleh pegawai dengan jenis kelamin perempuan atau sebesar 58.82 % dari total pegawai laki-laki yaitu sebesar 41.18 % sebagaimana tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
1	Laki-laki	13	41.18%
2	Perempuan	21	58.82%
		34	100%

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kota Magelang, akhir tahun 2019, data diolah

Berdasarkan tabel di atas, kebutuhan pegawai sudah termasuk di dalamnya tenaga kontrak 1 (satu) orang. Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin untuk kondisi saat ini dan 5 (lima) tahun ke depan telah mencukupi kebutuhan. Jumlah pegawai laki-laki lebih sedikit dari jumlah pegawai perempuan, dimana terpaut sekitar 17.65%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perencanaan kebutuhan pegawai di Bappeda Kota Magelang telah memperhatikan adanya perspektif gender. Apabila melihat dari segi jumlah maupun komposisi pada saat ini, kebutuhan karyawan Bappeda telah tercukupi sesuai bidang tugasnya baik pekerjaan yang bersifat administrasi maupun yang bersifat teknis walaupun sebenarnya jumlah ini belum memenuhi kebutuhan minimal yang sesuai dengan beban kerja dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.



Gambar 1.2 Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019

❖ Menurut Jabatan :

Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang untuk Pejabat baik Eselon II,III dan IV sebesar 45.45% sedangkan prosentase untuk jumlah pelaksana/staf yang sebesar 39.39% dan fungsional sejumlah 15.15% dari total pegawai sebagaimana tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Jabatan Tahun 2019

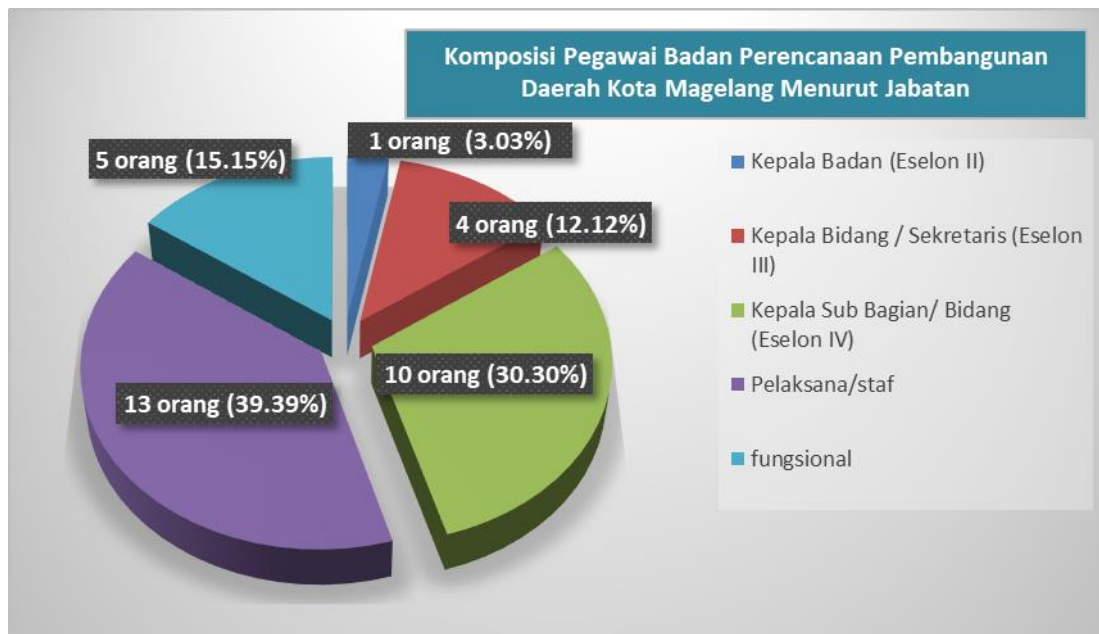
No	Jabatan	Jumlah	Prosentase
1	Kepala Badan (Eselon II)	1	3.03%
2	Kepala Bidang / Sekretaris (Eselon III)	4	12.12%
3	Kepala Sub Bagian/ Bidang (Eselon IV)	10	30.30%
4	Pelaksana/staf	13	39.39%
5	Fungsional	5	15.15%
	Jumlah	33	100%

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kota Magelang, awal tahun 2019, data diolah

Kondisi di atas menggambarkan jumlah structural sudah terpenuhi keseluruhannya, namun jumlah pelaksana belum mencapai angka ideal. Secara

ideal jumlah pelaksana berbanding dengan jumlah Kasubbag adalah 2 (dua) banding 1 (satu). Padahal jumlah pelaksana/staf apabila dibandingkan dengan jumlah pelaksana/staf pada tahun sebelumnya berkurang 4 orang staf, yaitu 1 (satu) orang purna tugas atau pensiun pada pertengahan tahun 2019 dan 3 (tiga) orang promosi ke instansi lain.

Gambar di bawah ini memperlihatkan komposisi pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Jabatan sebagai berikut:



Gambar 1.3 Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Jabatan tahun 2019

Pelaksana/staf merupakan ujung tombak dalam operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD. Penurunan jumlah pelaksana/staf akan menyebabkan jumlah pegawai semakin jauh dari kondisi ideal. Oleh karena itu yang perlu diantisipasi sejak dini adalah kebutuhan pegawai baik yang berkedudukan sebagai pelaksana/staf maupun yang berkedudukan dalam jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam waktu beberapa tahun ke depan. Hal ini karena dalam waktu 3 (tiga) tahun ke depan terhitung sejak tahun 2019, terdapat 2 orang Pejabat Bappedda yang memasuki masa pensiun.

Selain itu, hal lain yang perlu diperhatikan adalah mutasi, baik mutasi promosi maupun mutasi tempat kerja. Keberadaan regulasi terkait dengan Aparat Sipil Negara (ASN) dimana setiap karyawan akan terspesifikasi berdasarkan dengan keahlian dan kompetensi perlu segera ditindaklanjuti. Regulasi tersebut akan menuntut setiap karyawan untuk bekerja secara profesional sesuai dengan bidang tugas dan keahlian atau kompetensi yang dimiliki. Hal tersebut merupakan

tantangan di dalam pengelolaan sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi.

Untuk jabatan Fungsional khususnya Fungsional Perencana sampai dengan akhir tahun 2019 di Bappeda sebanyak 3 orang. Pada Bappeda Kota Magelang kebutuhan secara ideal untuk suatu Badan Perencanaan membutuhkan lebih dari satu orang tenaga Fungsional Perencana karena terkait dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan dalam membuat kajian, analisa dan perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah. Adapun Fungsional lain di luar Fungsional perencana terdapat 2 orang personil yaitu 1 orang Fungsional Surveyor Pemetaan dan 1 orang Fungsional Pranata komputer.

Tabel berikut menyajikan Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang yang memasuki purna tugas dalam tiga tahun ke depan sebagai berikut :

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Yang Pensiun dalam Tiga Tahun Ke Depan

No	Golongan/Pangkat	Jumlah	Tahun Pensiun
1	Golongan IV	2	2020
2	Golongan IV	0	2021
3	Golongan I,II,III,IV	0	2022

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kota Magelang, tahun 2019, data diolah

Berdasarkan data jumlah pelaksana/staf dan pejabat eselon IV di atas maka kita dapat memprediksi jumlah kebutuhan pegawai yang akan menyelesaikan tugas pekerjaan secara teknis operasional dalam tiga tahun ke depan mengingat adanya beberapa pegawai yang memasuki masa pensiun, tugas belajar, promosi jabatan maupun mutasi.

❖ Menurut Golongan/Pangkat :

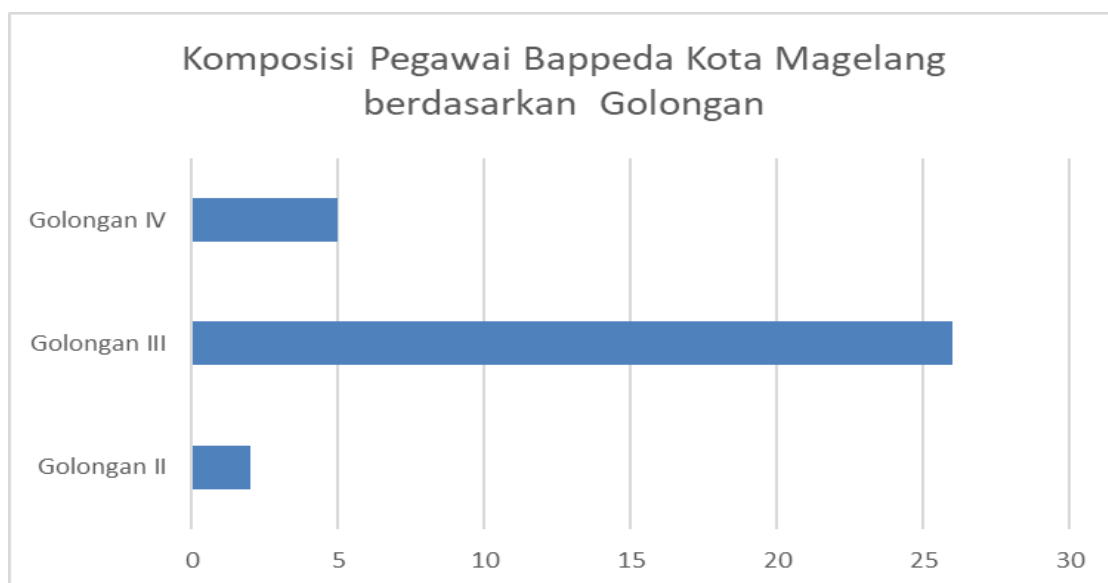
Komposisi pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang menurut pangkat/golongan sebagian besar adalah pegawai dengan golongan III dengan komposisi mencapai 76.47% dari total pegawai sebagaimana tersaji dalam tabel 1.4 berikut:

Tabel 1.4 Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Golongan/ Pangkat Tahun 2019

No	Golongan/Pangkat	Jumlah	Prosentase
1	Golongan I	-	0 %
2	Golongan II	2	6.06 %
3	Golongan III	26	78.79 %
4	Golongan IV	5	15.15%
	Jumlah	33	100%

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kota Magelang, akhir tahun 2019, data diolah

Gambar di bawah ini memperlihatkan komposisi pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Golongan sebagai berikut:



Gambar 1.4 Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Golongan tahun 2019

❖ Menurut Tingkat Pendidikan :

Tingkat pendidikan pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang sebagian besar adalah sarjana (D3/S1/S2) atau sebesar 89.19% dari total pegawai sebagaimana tabel 1.5:

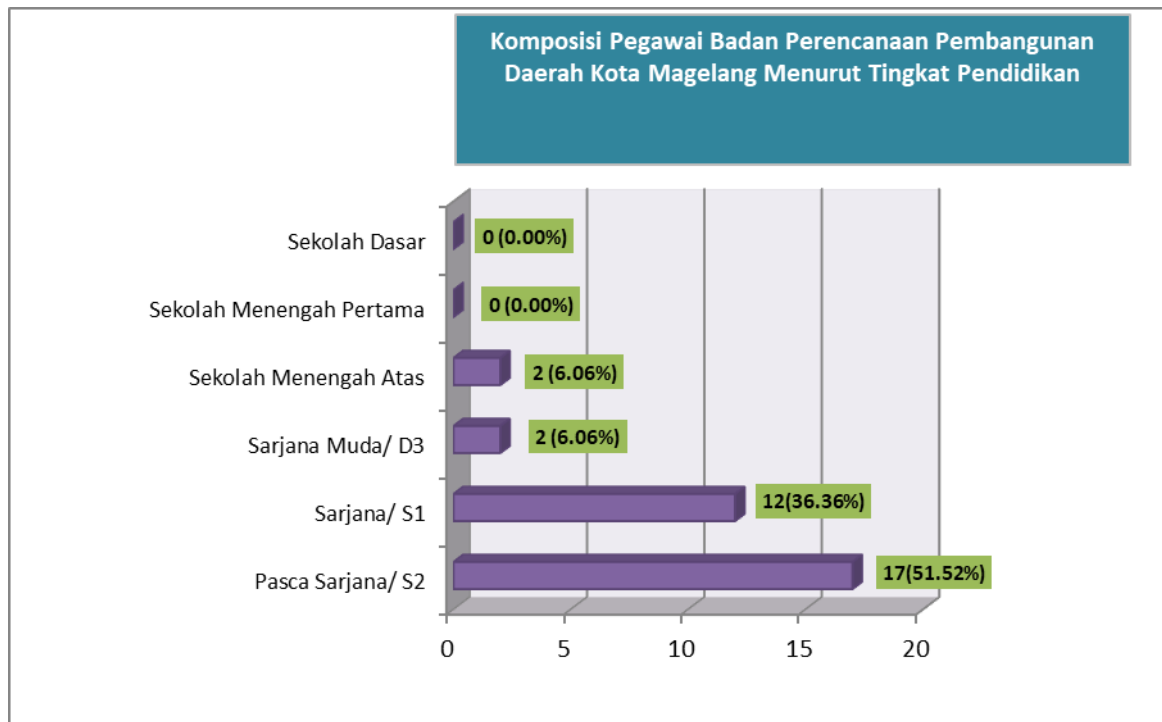
**Tabel 1.5 Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Magelang Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Pendidikan	Laki-laki	%	Perempuan	%	Jumlah	%
1	Pasca Sarjana/ S2	6	18.18	11	33.33	17	51.52
2	Sarjana/ S1	5	15.15	7	21.21	12	36.36
3	Sarjana Muda/ D3	1	3.03	1	3.03	2	6.06
4	Sekolah Menengah Atas	2	6.06	0	0	2	6.06
5	Sekolah Menengah Pertama	0	0	0	0	0	0.00
6	Sekolah Dasar	0	0	0	0	0	0.00
		14	42.42	20	57.58	34	100.00

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kota Magelang, akhir tahun 2019, data diolah

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 1.5 di atas, tingkat pendidikan pegawai Bappeda yang paling banyak adalah pendidikan Sarjana/S2 sebanyak 51.52%. Jumlah ini meningkat apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena beberapa personil yang tugas belajar sudah menyelesaikan studi Strata-2 sehingga menambah jumlah pegawai Bappeda dengan pendidikan S2. Pegawai Bappeda yang pendidikan Sarjana/S2 yang terdiri dari 6 karyawan laki-laki dan 11 karyawan perempuan.

Adapun untuk karyawan sarjana/S1 pada tahun 2019 sebanyak 12 orang atau sebesar 36.36%. Adapun komposisi untuk karyawan dengan tingkat Pendidikan sarjana/S1 sebanyak 5 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa telah adanya keseimbangan dari sisi pendidikan antara laki-laki dan perempuan pada Bappeda Kota Magelang. Dengan tingkat pendidikan formal karyawan Bappeda Kota Magelang yang sebagian besar merupakan sarjana diharapkan menjadi modal dasar untuk mendukung pencapaian visi ,misi Kepala Daerah dan Tujuan Sasaran organisasi.



Gambar 1.5 Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2019

Jumlah pegawai Bappeda yang menamatkan pendidikan Pasca Sarjana/S2 cukup besar, yaitu sebanyak 16 orang atau sebesar 47.06 % dari total seluruh pegawai Bappeda. Demi meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Bappeda memberikan peluang kepada pegawai yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi asalkan sesuai dengan prosedur yang berlaku,

Tabel di bawah ini menggambarkan komposisi pegawai Bappeda di tiap Bidang berdasarkan pendidikan formalnya, jabatan, pangkat, golongan dan pelatihan struktural yang sudah di ikuti sebagai berikut :

Tabel 1.6 DAFTAR ISI JMLAH ASN MENURUT KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI LAMPIRAN DATA PENYUSUNAN LPPD TAHUN 2019

NO.	NAMA JABATAN	JML ASN DALAM JABATAN**)		JUMLAH ASN DENGAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR) *)										JML ASN MENURUT PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)				Jenis kelamin	
		ISI	KOSONG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	19	20	21	22		
1	Kepala Badan	1										1			1			1	
2	Sekretaris	1										1				1			1
3	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan (nita)	1										1					1		1
	- Staff	4									3	1							4
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (devi)	1										1					1		1
	- Staff	3				1					2							2	1
5	Kepala Bidang Perencanaan (m kukuh)	1										1				1			1
6	Kepala Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan	1										1					1		1
	- Staff	0																	
7	Kepala Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi Dan Pelaporan (dion)	1										1					1	1	
	- Staff	2									1	1							2
8	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	1										1				1			1

NO.	NAMA JABATAN	JML ASN DALAM JABATAN**)		JUMLAH ASN DENGAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR) *)										JML ASN MENURUT PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)				Jenis kelamin	
		ISI	KOSONG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV	L	P
	- Staff	2							1		1							1	1
10	Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat	1									1						1	1	
	- Staff	0			0							0							
11	Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1										1					1	1	
	- Staff	0										0							
12	Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah	1										1					1	1	0
13	Kepala Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro	1									1						1	1	
	- Staff																		
14	Kepala Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup	1									1						1		1
	- Staff	2				1						1						1	1
15	Kepala Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah	1										1					1	1	
	- Staff	0																	
16	Fungsional	5							1		1	3					2	2	3
Total		33		0	0	2	0	0	2	0	12	17	0	0	1	3	13	14	19

Tabel di bawah ini menggambarkan komposisi dan kebutuhan pegawai Bappeda di tiap bidang berdasarkan pendidikan formalnya sebagai berikut:

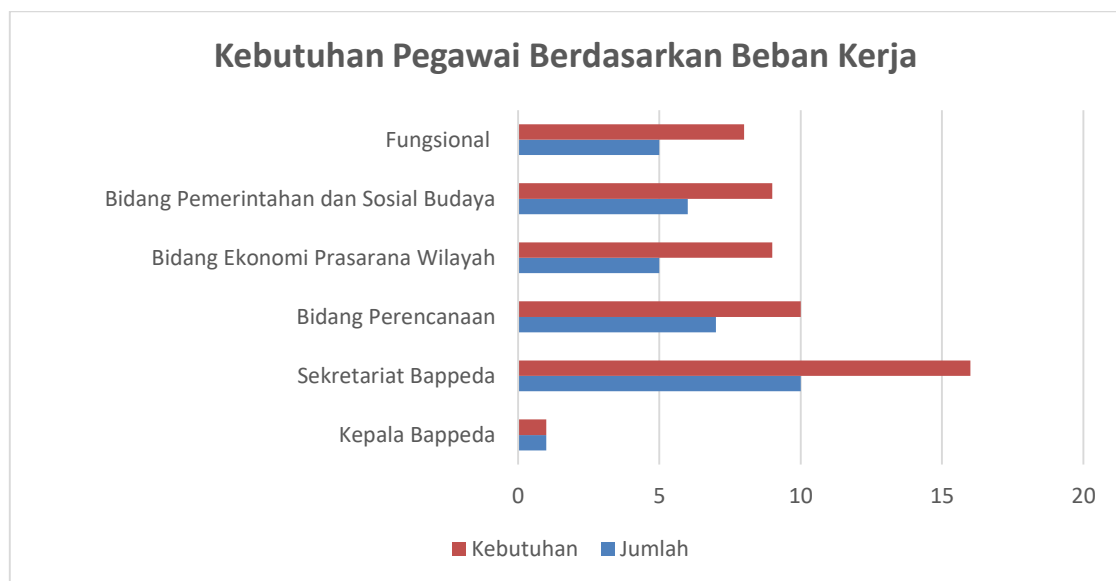
**Tabel 1.7 Komposisi dan Kebutuhan Pegawai (kondisi per bidang)
Bappeda Kota Magelang Menurut Pendidikan Formal**

Bidang/Pendidikan	Jumlah	Kebutuhan	Keterangan
<u>Kepala Bappeda</u> S2 Urban Planing	1 org	1 org	
<u>Sekretariat Bappeda</u>			
a. S1 Ekonomi Manajemen Perusahaan	1 org	1 org	
b. S2 Ekonomi Pembangunan	2 org	3 org	
c. S2 Ekonomi Akuntansi	1 org	2 org	
d. S1 Ekonomi Akuntansi	2 org	4 org	
e. S1 Teknik Mesin	1 org	1 org	
f. S1 Hukum	1 org	1 org	
g. S1 Ekonomi Manajemen	1 org	1 org	
i. SLTA sederajat	1 org	3 org	
<u>Bidang Perencanaan</u>			
a. S2 Tehnik Pembangunan Wilayah dan Kota	1 org	2 org	
b. S2 Administrasi Publik	1 org	2 org	
c. S2 Teknik Informatika	1 org	1 org	
d. S1 Teknik Sipil	1 org	2 org	
e. S2 Perencanaan Wilayah dan Kota	2 org	2 org	
f. S1 Ekonomi Manajemen	1 org	1 org	
<u>Bidang Ekonomi Prasarana Wilayah</u>			
a. S2 Perencanaan Wilayah dan Kota	2 org	4 org	
b. S1 Ekonomi Manajemen	1 org	2 org	
c. S1 Ekonomi Akuntansi	1 org	1 org	
d. SLTA Sederajat	1 org	1 org	
e. S1 Pertanian / tehnik Pertanian	-	1 org	
<u>Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya</u>			
a. S2 Ekonomi Pembangunan	1 org	1 org	

Bidang/Pendidikan	Jumlah	Kebutuhan	Keterangan
b. S1 Ekonomi Manajemen	2 org	2 org	
c. S1 Ilmu Administrasi Negara	1 org	2 org	
d. S2 Perencanaan Wilayah dan Kota	-	1 org	
e. S2 Administrasi Publik	1 org	2 org	
f. D3 Teknik Lingkungan	1 org	1 org	
<u>Fungsional</u>			
a. S2 Perencanaan Wilayah dan Kota	3 org	4 org	
b. D3 Teknik Informatika	1 org	1 org	
c. S1 Teknik Sipil	1 org	2 org	

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kota Magelang, akhir tahun 2019, data diolah

Gambar di bawah ini menggambarkan komposisi dan kebutuhan pegawai Bappeda di tiap bidang berdasarkan beban kerjanya.



Gambar 1.6 Komposisi dan Kebutuhan Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang berdasarkan Beban Kerja

b. Sarana dan Prasarana Kerja

Selain sumber daya manusia yang profesional, di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan juga diperlukan adanya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana kerja. Sarana dan prasarana yang memadai akan berpengaruh pada pelaksanaan kinerja. Akuntabilitas dan

pelaksanaan kinerja yang baik akan sangat mendukung terwujudnya sistem administrasi yang efektif dan efisien dalam mendukung kegiatan perencanaan. Daftar di bawah ini merupakan daftar perlengkapan Bappeda sebagai berikut :

1. Gedung bertingkat lantai dua 1 unit yang terdiri dari ruang aula 1 buah, Ruang sidang 3 buah 1 ruang serba guna di balkon lantai 2, ruang kepala 1 buah, ruang sekretaris 1 buah, ruang sekretariat 1 buah, ruang Kepala Bidang dan staf 3 buah, ruang Kasubag Keuangan 1 buah, ruang sekretariat FEDEP 1 buah, ruang dapur dan pantry 1 buah, gudang dan tempat arsip 3 buah, ruang mushola 1 buah, 1 ruang laktasi, 2 garasi kendaraan 5 kamar mandi umum dan 2 kamar mandi di dalam ruangan Kepala Bappeda dan Sekretaris Bappeda
2. Kendaraan bermotor roda dua sebanyak 20 unit
3. Kendaraan bermotor roda empat sebanyak 6 unit
4. Alat Angkut Tak Bermotor/ Gerobak Sampah 1 unit
5. Mesin Kompresor 1 unit
6. Genset 1 unit
7. Pompa 1 unit
8. GPS 1 unit
9. Alat Ukur Meter 1 unit
10. Mesin Ketik sebanyak 1 unit
11. Almari (rak besar) 4 unit
12. Filling kabiner 4 buah
13. Rak arsip/rak buku dan almari perpustakaan 9 buah
14. Rak Server 1 buah
15. Almari besi/Almari sliding kaca/Almari rak kaca 15 buah
16. Brankas 1 buah
17. Rak kayu multiplek 1 buah
18. Rak arsip gudang 11 buah
19. Rak arsip besi 1 buah
20. Etalase 3 buah
21. Rak kayu tempat gambar 1 buah
22. Mesin penghancur dokumen 1 buah
23. Mesin absensi 1 buah
24. Mesin Penghancur Kertas 1 buah
25. Papan Sistem Informasi Pelayanan Publik 1 buah
26. Papan Nama 8 buah
27. White board elektronik 1 buah
28. LED Proyektor 6 buah

29. Papan Tulis 1 buah
30. Papan Akrilik 1 buah
31. Meja panjang 10 unit
32. Meja pingpong 1 unit
33. Meja kursi tamu 11 unit
34. Meja roda perpustakaan 4 unit
35. Kursi kerja 5 unit
36. Meja rapat/meja kerja 8 unit
37. Rak buku 6 buah
38. Gorden 1 unit
39. Karpet 1 unit
40. Meja LCD Proyektor 1 unit
41. Gordyan dan Vitrase 1 unit
42. Sketsel 1 unit
43. Kursi Besi 1 unit
44. Sofa 4 unit
45. Kursi Rapat Eselon II 1 unit
46. Kursi Rapat Eselon III 3 unit
47. Kursi Rapat 60 unit
48. Meja Led Proyektor 1 unit
49. Meja Kantor ½ biro 2 unit
50. Kursi Staf 3 unit
51. Tempat Gantungan Koran 1 unit
52. Meja Lipat Portable 5 unit
53. Vacuum Cleaner 1 unit
54. Air Purifier 1 unit
55. AC 24 unit
56. Exhaust fan 1 unit
57. Lemari es 1 unit
58. Kompor gas 1 unit
59. Tabung Gas 1 unit
60. Podium 1 inut
61. Wireless 2 unit
62. Speaker 1 unit
63. Kamera 4 unit
64. Mic wireless 7 unit
65. Sound system 1 unit
66. Speaker portable 1 unit

67. TV LED 1 unit
68. Tangga Lipat 1 unit
69. Alat Perekam Suara 1 unit
70. Amplifier 1 unit
71. Speaker 1 unit
72. Dispenser 1 unit
73. Drone 1 unit
74. Tabung Pemadam Kebakaran 6 unit
75. Note book computer 1 unit
76. Komputer PC sebanyak 32 unit
77. Notebook, Lptop 15 unit
78. Monitor 19 unit
79. CPU 17 unit
80. UPS 12 unit
81. Printer 33 unit
82. LCD Proyektor 3 buah
83. Software E-Office
84. Server wireless 1 unit
85. Peralatan jaringan computer 1 paket
86. Komputer server 2 unit
87. Meja kerja pejabat 10 unit
88. Kursi eselon III 3 unit
89. Kursi eselon IV 12 unit
90. Kursi staf 18 unit
91. Mesin Jilid Spiral 1 unit
92. Telepon 1 unit
93. Handphone 1 unit
94. Almari instrumen 1 unit
95. Sterilisasi Botol 1 unit
96. CCTV 10 unit

Secara ketersediaan asset, sebagian besar kebutuhan asset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang telah terpenuhi walaupun masih terdapat asset dalam kondisi yang tidak baik atau terdapat beberapa barang dalam kondisi rusak ringan atau rusak sedang sehingga dalam penggunaannya akan mengganggu penyelesaian tugas. Bahkan ada beberapa asset yang sudah rusak berat dan tidak dapat dioperasikan lagi (terutama asset-asset dengan tahun pembelian di atas 10 tahun). Asset – asset yang sudah tidak beroperasi dengan baik akan membebani anggaran badan

karena biaya pemeliharaan asset tersebut akan terus membebani belanja operasional kantor sementara penggunaan asset tersebut sudah tidak optimal lagi.

Terkait dengan asset – asset tersebut dalam beberapa tahun terakhir ini telah dilakukan penghapusan terhadap asset – asset yang secara fungsi maupun nilai ekonomis berada di bawah kapitalisasi asset sesuai dengan kebijakan akuntansi. Penghapusan asset tersebut di ikuti dengan administrasi penghapusan asset-asset yang sudah tidak dipergunakan agar jumlah secara nominal tidak akan terakumulasi di dalam Neraca Badan sedangkan secara riil barang tersebut sudah tidak layak lagi untuk dipergunakan.

Dalam catatan Pengurus barang terdapat data asset yang di rencanakan akan di hapuskan dalam beberapa tahun ke depan. Secara pencatatan akuntansi masuk ke dalam asset lain – lain. Asset ini apabila di lihat dari nilai kemanfaatannya / nilai bukunya sudah habis (nol) di karenakan adanya penyusutan dari asset tersebut (masa manfaatnya sama dengan dengan manfaat berjalannya sehingga sisa manfaatnya nol).

Hal lain yang diperlukan dalam waktu dekat ini adalah adanya manajemen pengelolaan asset yang terkelola dengan baik, sehingga asset-asset yang ada dapat terinventaris secara rapi baik dari sisi pemeliharaannya maupun dari sisi administrasi asset. Manajemen pengelolaan asset yang meliputi tahapan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan menjadi sesuatu yang penting dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan di mana manajemen asset tersebut merupakan salah satu point terpenting dalam mencapai opini WTP sehingga setiap OPD mempunyai kontribusi yang penting dalam pencapaian opini WTP melalui manajemen asset yang baik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

1.3 Isu Strategis Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tersebut di dalam Pasal 219 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014, merupakan salah satu perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan dengan gambaran fungsi secara garis besar sebagai penyusun kebijakan teknis, memberikan dukungan teknis perencanaan kepada semua perangkat daerah, pemantauan evaluasi dan pelaporan, serta pembinaan teknis perencanaan.

Salah satu tantangan ke depan dari suatu organisasi Perencanaan adalah bagaimana sumber daya organisasi tersebut dapat dimanfaatkan dengan optimal sehingga dapat menghasilkan suatu perencanaan daerah yang berkualitas.

Dukungan sumber daya manusia yang berkualitas didukung kompetensi dan keahlian di bidang perencanaan serta ketersediaan sarana dan prasarana serta suasana kerja yang lebih egaliter dan kondusif, diharapkan akan mengembangkan kreativitas dan inovasi dari aparatur perencana di Bappeda. Hal ini menjadi faktor penting dalam menghasilkan produk rencana yang berkualitas

Dokumen perencanaan yang berkualitas menjadi salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan badan perencanaan dalam menjalankan amanahnya sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan. Produk rencana yang dihasilkan akan memberi manfaat bagi semua perangkat daerah yang dilayani.

Dari uraian diatas, maka akan membawa pada kesiapan badan perencanaan dalam menghasilkan produk-produk rencana yang mampu menjawab tantangan dalam mengembangkan Kota Magelang, serta mampu melayani kebutuhan perencanaan pembangunan daerah bagi perangkat daerah. Agar konsisten dalam menjaga kualitas produk rencana, maka 4 (empat) prinsip yang harus dipegang adalah: keterkaitan, konsistensi, kedalaman-kelengkapan, serta keterukuran. Sedangkan pendekatan yang diterapkan adalah dari bawah (*bottom-up*), dari atas (*top-down*), teknokratik, politik dan inovasi.

Permasalahan yang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Perencanaan adalah di antaranya sebagai berikut :

- a. Masih diperlukannya sinergisitas proses perencanaan pembangunan daerah dari pendekatan politik (proses politik) ke pendekatan teknokratik.
- b. Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang belum konsisten yang perlu terus dilakukan minimalisasi deviasi;
- c. Masih dijumpai kesulitan dan miskoordinasi antar internal dan eksternal OPD. Beberapa persoalan yang bersifat lintas sektor seringkali ditangani secara parsial dan terfragmentasi sehingga konsep solusi permasalahan tidak tersolusikan secara komprehensif.
- d. Masih memerlukan ruang pemahaman perencanaan di setiap level pada OPD. Menjadi tidak ideal ketika yang memahami indikator dan ukurannya hanya pada tingkat kasubbag program .
- e. Meskipun dari tahun ke tahun sudah mengalami kemajuan, proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian/telaahan, masih perlu dilakukan penguatan sehingga mampu menjadi dasar analisis kebijakan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik.

- f. Tantangan pada fungsi perencanaan semakin tidak ringan, seiring kompleksitas dan tuntutan akselerasi atas kesejahteraan masyarakat dihadapkan dengan berbagai kondisi permasalahan bangsa yang semakin kompleks serta dinamika global .

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang adalah sebagai berikut :

Tabel 1.8 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda Kota Magelang

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
		INTERNAL (Kewenangan OPD)	EKSTERNAL (Di luar Kewenangan OPD)	
Gambaran Pelayanan OPD	Terdapat beberapa aspek manajerial yang harus ditindaklanjuti	Potensi dan kapasitas SDM, Level koordinasi, etos kerja , Sarana pra-sarana yang memadai	Perubahan regulasi dan dinamika eksternalitas	1. Masih perlu upaya untuk meningkatkan partisipasi publik dalam perencanaan dengan memanfaatkan berbagai media yang ada serta dengan pendekatan yang lebih inovatif dan dengan dukungan penerapan teknologi informasi dan komunikasi
Kajian terhadap Visi Misi Kepala Daerah Terpilih	Masih adanya koordinasi, perencanaan dan movev bidang yang perlu disusun, dimplementasikan dan dan monitoring implmentasinya secara intensif	Potensi dan kapasitas SDM, Level koordinasi, etos kerja , Sarana prasarana yang memadai	Perubahan regulasi dan dinamika eksternalitas	
Kajian Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah 2013-2019	Capaian Bappeda Kota Magelang telah mendukung sasaran Renstra Bappeda provinsi	Potensi dan kapasitas SDM, Level koordinasi, etos kerja , Sarana prasarana yang memadai	Perubahan regulasi dan dinamika eksternalitas	2. Kapasitas sumber daya manusia, khususnya dibidang perencanaan, masih perlu ada upaya peningkatan secara terus menerus
Kajian terhadap Renstra Bappenas 2014-2019	Capaian Bappeda Kota Magelang telah mendukung sasaran Renstra Bappeda provinsi	Potensi dan kapasitas SDM, Level koordinasi, etos kerja , Sarana prasarana yang memadai	Perubahan regulasi dan dinamika eksternalitas	3. Belum optimalnya implementasi hasil dokumen hasil perencanaan bidang 4. Masih lemahnya manajemen pengaturan pekerjaan 5. Masih kurangnya koordinasi antar bidang dengan PD 6. Belum optimal dan meratanya kapasitas SDM dalam pencapaian
Kajian terhadap RTRW Kota Magelang		Potensi dan kapasitas SDM, Level koordinasi, etos kerja , Sarana prasarana yang memadai	Perubahan regulasi dan dinamika eksternalitas	
Kajian terhadap		Potensi dan kapasitas SDM, Level koordinasi,		

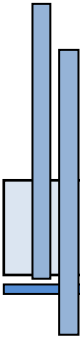
Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
		INTERNAL (Kewenangan OPD)	EKSTERNAL (Di luar Kewenangan OPD)	
KLHS		etos kerja , Sarana prasarana yang memadai		tujuan dan sasaran organisasi 7. Belum optimalnya koordinasi internal dan antar bidang. 8. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung tercapainya reformasi birokrasi; 9. Belum optimalnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data (spasial, sektoral dan statistik) berbasis Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat; 10. Belum optimalnya pengelolaan sistem database dan belum akuratnya hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang (terkait dengan SOP) 11. Tidak seimbangnya beban kerja dengan kapasitas SDM 12. Belum optimalnya sinkronisasi proses perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan

Selanjutnya, dianalisis isu - isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi secara relevan dari faktor-faktor eksternal lainnya yang tertuang pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.9 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
1	Tuntutan pemenuhan akan ratifikasi Sustainable Development Goals (SDGs)	UU nomor 9 tahun 2015 sebagai regulasi operasional terkait UU 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah belum sepenuhnya implementatif dilaksanakan	Semakin kritisnya masyarakat dalam mengawasi pembangunan	Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi
2	Masuknya Indonesia sebagai bagian dari Masyarakat Ekonomi ASEAN	Perubahan paradigma pembangunan dari <i>money follow function</i> menjadi <i>money follow</i> program prioritas	Belum tuntasnya isu perluasan wilayah Kota Magelang yang melibatkan daerah sekitar	Belum optimalnya implementasi hasil kreativitas dan inovasi masyarakat Kota Magelang
3	Kecenderungan melemahnya ekonomi global	Implikasi UU 23 Tahun 2014 terkait dengan mekanisme hibah dan bansos	Masih adanya ego kewilayahan antar kabupaten Kota sehingga aspek kerjasama antar daerah menjadi kurang optimal	Belum optimalnya partisipasi pilar keempat : media massa
		Semakin lebarnya ketimpangan pembangunan dan pendapatan antar rumah tangga dan antar wilayah	Adanya rencana reaktivasi rel kereta api yang menembus Kota Magelang mempengaruhi konstelasi secara geoekonomi dan sosial	Masih lemahnya skenario optimalisasi Corporate Sosial responsibility untuk partisipasinya dalam pembangunan Kota
		Implementasi dari Nawa Cita yang masih dalam rangka mencari bentuk terbaiknya	Munculnya Kabupaten Kota yang menjadi bintang inovasi memberikan tantangan bagi Kota	Belum optimalnya partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan

Dari berbagai telaahan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.



BAB. II PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021

2.2 Perjanjian Kinerja

2.1 Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang di susun dengan mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Visi pembangunan daerah Kota Magelang tahun 2016-2021 merupakan visi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dengan rumusan sebagai berikut: **"MAGELANG SEBAGAI KOTA JASA YANG MODERN DAN CERDAS DILANDASI MASYARAKAT SEJAHTERA DAN RELIGIUS"**.

Visi Pembangunan Kota Magelang ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kota Magelang dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Visi ini harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Magelang sebagai kota jasa yang modern dan cerdas sekaligus masyarakat yang sejahtera dan religius. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Kota Jasa yang Modern dan Cerdas

Pembangunan Kota Magelang diarahkan untuk memperkuat sektor jasa yang didominasi oleh jasa pemerintahan umum dan jasa swasta sebagai potensi kota, dengan menitikberatkan pada sektor perekonomian, sektor kesehatan, dan sektor pendidikan.

Modern adalah sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntunan jaman, yang berarti suatu kondisi lebih maju daripada daerah lain, mampu berdaya saing dengan daerah lain menggunakan potensi yang ada. Kota modern adalah kota yang mampu menyelaraskan sosial, fisik, dan ekonomi dengan budaya dan sejarah yang dimiliki oleh kota tersebut, dengan karakteristik:

- Masyarakat sejahtera dalam financial;
- Kota terdepan dalam pelayanan, yaitu kota modern harus bisa menyediakan pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan para pengguna kota atau masyarakat umum;
- Visual kota mengundang pesona, dalam arti bahwa kota modern harus dapat dilihat dari fisiknya, secara visual kota terlihat tertata, menarik, mengundang kenyamanan untuk tinggal dan berkarya.

Kota cerdas adalah kota yang dikelola secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya secara adil tanpa diskriminasi dengan muatan kemudahan koneksitas informasi dan komunikasi berbasis teknologi informasi yang dilakukan dalam dunia usaha, sistem penyelenggaraan pelayanan publik, mekanisme partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kontrol, maupun komplain, dan bidang lain pendukung nilai daya saing daerah.

Unsur-unsur Kota Cerdas meliputi:

- a) *Smart Governance* yaitu: pengembangan *e-governance*, ada partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
- b) *Smart infrastructure* yaitu: pengembangan jaringan IT, pengembangan sistem informasi manajemen berbasis IT;
- c) *Smart Economy*, yaitu : pengembangan *city branding*, pengembangan kewirausahaan, pengembangan *e-commerce*, dan ekonomi kreatif;
- d) *Smart environment* yaitu: pengelolaan lingkungan berbasis IT, pengelolaan SDA berbasis IT, serta pemanfaatan sumber energi terbarukan;
- e) *Smart people* yaitu: pendidikan dan pengembangan SDM yang melek teknologi, dan dukungan penelitian, pengembangan karakter sosial budaya masyarakat; serta
- f) *Smart Living* yaitu: kemudahan akses terhadap layanan pendidikan, kemudahan akses terhadap layanan kesehatan, pengembangan peran media, dan kemudahan akses terhadap jaminan keamanan.

Dalam mewujudkan kota cerdas, ke-enam komponen tersebut diatas, yang juga bisa dikemas dalam 3 (tiga) aspek utama yaitu *smart economy*, *smart social* dan *smart environment*, juga diperhatikan 3 komponen yang menjadikan mampu membangun kota cerdas (enabler), yaitu sumber daya manusia, dukungan teknologi informasi dan komunikasi serta tata kelola.

2. Sejahtera

Perwujudan kota sejahtera dicapai melalui peningkatan dan pemantapan upaya menyejahterakan masyarakat secara adil merata tanpa diskriminasi melalui:

- a) Optimalisasi peran dan fungsi lembaga pemerintah, swasta, masyarakat madani, dan media massa khususnya dalam pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan;
- b) Menciptakan peluang kerja dalam bidang pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan;
- c) Tanpa mengabaikan pembangunan dibidang lain sebagai upaya menuju masyarakat yang berdaya dan mandiri.

3. Religius

Masyarakat religius adalah masyarakat yang menerapkan ketaqwaan kepada ketuhanannya dalam tata kehidupan sehari-hari sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Dalam masyarakat religius dijamin kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya, dan kecukupan ketersediaan tempat ibadah.

Untuk mencapai visi tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.
3. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
4. Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang.
5. Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani.

Berdasarkan hasil telaahan telaah Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih tahun 2016-2021, dan dilandasi komitmen Bappeda Kota Magelang untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi Walikota Magelang, maka dalam rumusan tujuan dan sasaran akan menjadi landasan penyusunan arsitektur kinerja Bappeda dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Sedangkan terkait bagaimana pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilihat dari rumusan strategi dan kebijakan.

a. Tujuan Jangka Menengah Bappeda Kota Magelang Tahun 2016-2021

Tujuan yang ingin dicapai dalam Renstra BAPPEDA Kota Magelang tahun 2016-2021 antara lain:

1. Meningkatkan kapasitas dan pemerataan kualitas aparatur perencanaan.
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam mendukung core business perencanaan
3. Meningkatkan koordinasi internal, tata kelola, administrasi dan pelaporan yang tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku

4. Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
5. Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan
6. Mewujudkan dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan bidang perencanaan, bidang ekonomi dan prasarana wilayah, dan bidang pemerintahan dan sosial budaya yang berkualitas
7. Mewujudkan pengendalian kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
8. Meningkatkan kinerja monitoring evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah

b. Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kota Magelang Tahun 2016-2021

Guna mewujudkan tujuan jangka menengah di atas, maka sasaran-sasaran yang hendak dituju BAPPEDA Kota Magelang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran untuk mewujudkan *tujuan pertama*, Meningkatkan kapasitas dan pemerataan kualitas aparatur perencanaan adalah Meningkatnya kapasitas dan makin meratanya aparatur perencanaan
2. Sasaran untuk mewujudkan tujuan kedua Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam mendukung core business perencanaan adalah Tersedianya sarpras yang berkualitas
3. Sasaran untuk mewujudkan *tujuan ketiga*, Meningkatkan koordinasi internal, tata kelola, administrasi dan pelaporan yang tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku adalah Terwujudnya administrasi dan pelaporan yang tertib sesuai peraturan yang berlaku .
4. Untuk mewujudkan *tujuan keempat*, Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya kualitas perencanaan dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif dan inovatif
 - b) Terwujudnya dukungan data dan informasi terupdate
 - c) Terintegrasinya sistem informasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi pembangunan
5. Untuk mewujudkan *tujuan ke lima*, Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan dengan sasaran Terwujudnya konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan

6. Untuk mewujudkan *tujuan ke enam*, Mewujudkan dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasana dan bidang sosial budaya yang berkualitas dengan sasaran :
 - a) Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi yang berkualitas.
 - b) Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan terimplementasinya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Fisik Prasarana yang berkualitas
 - c) Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan terimplementasinya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Sosial Budaya yang berkualitas
7. Untuk mewujudkan *tujuan ke tujuh*, Mewujudkan pengendalian kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Perencanaan
 - b) Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah;
 - c) Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
8. Untuk mewujudkan *tujuan ke delapan*, Mewujudkan pengendalian kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan RKPD dan RPJM
 - b) Meningkatnya kualitas kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah;
 - c) Meningkatnya kualitas kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Pemerintahan, Sosial Budaya

c. Strategi dan Kebijakan Bappeda Kota Magelang Tahun 2016-2021

Strategi merupakan langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan pelayanan OPD, sedang Kebijakan merupakan arah tindakan yang diambil OPD untuk menentukan program-program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Dalam menentukan arah yang diambil Bappeda Kota Magelang dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan perlu dirumuskan ke dalam kebijakan. Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk

mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Menurut targetnya, kebijakan terdiri atas: (i) Kebijakan internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan, dan (ii) Kebijakan eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan OPD dalam rangka mengatur dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Perumusan kebijakan yang menjadi jembatan penghubung antara visi-misi Bappeda Kota Magelang dengan rincian program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut:

TABEL 2.1 KETERKAITAN ANTARA TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN dan PROGRAM/KEGIATAN

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan kapasitas dan pemerataan kualitas aparatur perencanaan	Meningkatnya kapasitas dan makin meratanya aparatur perencanaan	1. Meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya aparatur perencanaan Bappeda melalui bintek, diklat, pendidikan formal perencanaan serta kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi	1. Memfasilitasi aparatur perencanaan untuk mengikuti pendidikan formal perencanaan, bintek, seminar, diklat workshop terkait dengan perencanaan 2. Melaksanakan fasilitasi bagi aparatur perencana dan karyawan untuk mengikuti bintek, seminar, diklat, workshop, konsultasi dan koordinasi terkait dengan teknis pekerjaan
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam mendukung <i>core business</i> perencanaan	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.	1. Meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada, struktur organisasi dengan jumlah staf yang cukup dengan kompetensi pendidikan yang memadai dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga perencanaan. 2. Pengembangan sistem informasi perencanaan dan data base perencanaan berbasis teknologi informatika	1. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor serta kegiatan pemeliharaan aset kantor yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas fungsi Bappeda 2. Pengembangan fitur fitur SIPPD serta website Bappeda
3. Meningkatkan koordinasi internal, tata kelola, administrasi dan pelaporan yang tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku	Terwujudnya administrasi dan pelaporan yang tertib sesuai peraturan yang berlaku.	1. Penyediaan dan implementasi <i>Standart Operating Procedure</i> (SOP) dalam optimalisasi kinerja Perencanaan 2. Peningkatan pengelolaan administrasi, data dan kearsipan yang di dukung dengan sarana prasarana yang cukup dan staf dengan kompetensi pendidikan yang memadai untuk mendukung kegiatan perencanaan 3. Mengelola anggaran dengan lebih efisien, efektif dan akuntabilitas dengan memperjelas arah kebijakan organisasi dalam penggunaan anggaran	1. Melaksanakan pengelolaan adminis-trasi 2. Melaksanakan pengelolaan dan tertib administrasi arsip serta manajemen aset OPD 3. Melaksanakan pengembangan capaian kinerja kegiatan dan kinerja keuangan OPD secara tertib, lancar ,tepat waktu

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
4. Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	a. Meningkatnya kualitas perencanaan dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif dan inovatif	1. Optimalisasi aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan 2. Meningkatkan fasilitasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah 3. Peningkatan komitmen dan konsistensi pemerintah untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan	Penyelenggaraan sistem Perencanaan Pembangunan daerah yang partisipatif, akuntabel dan transparan, dalam mewujudkan dokumen RKPD yang berkualitas
	b. Terwujudnya dukungan data dan informasi ter-update	1. Meningkatkan kualitas dan dukungan data informasi serta kearsipan bagi penguatan penyusunan perencanaan pembangunan 2. Peningkatan pemanfaatan teknologi informatika sebagai sumber data dan informasi dalam rangka mendukung penyusunan produk - produk perencanaan serta publikasi informasi dan produk perencanaan pembangunan sehingga lebih mudah di akses oleh masyarakat dan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Penyusunan data daerah sebagai bahan analisa perencanaan dan pengambilan kebijakan Publikasi proses dan hasil perencanaan pembangunan melalui webiste bappeda
5. Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	Terwujudnya konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan berkeadilan	Penyusunan dokumen tahunan yang konsisten dengan dokumen jangka menengah

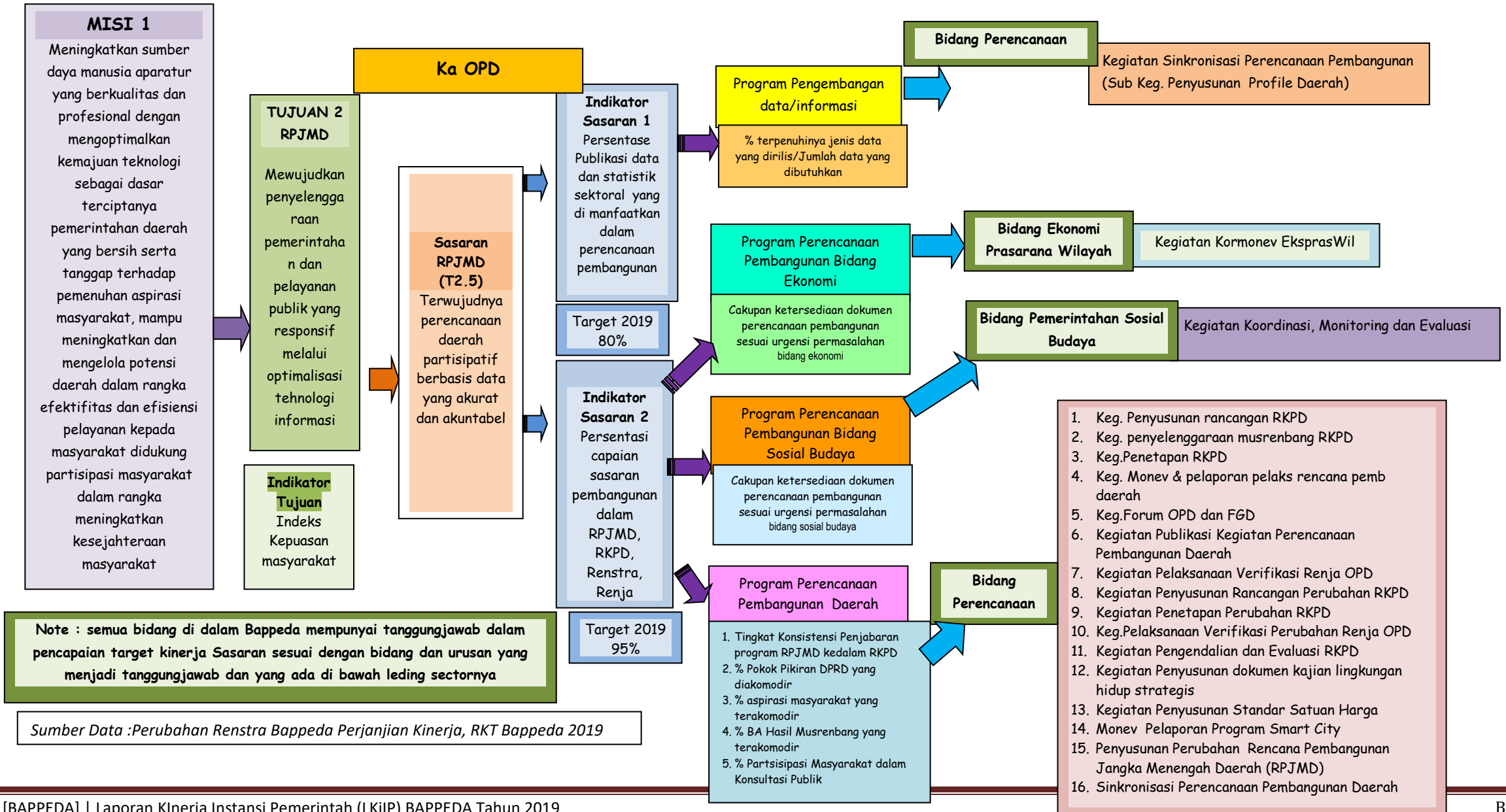
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
6. Mewujudkan dokumen perencanaan & implementasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasarana dan bidang sosial budaya yang berkualitas	Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi yang berkualitas	Meningkatkan kualitas produk dan dokumen - dokumen perencanaan yang di dukung dengan kerjasama antar lembaga perencanaan baik propinsi maupun pusat dan kerja-sama dengan perguruan tinggi dan swasta	Penyusunan Dokumen perencanaan bidang ekonomi yang relevan untuk menjawab berbagai permasalahan dan isu bidang ekonomi pada skala kota
	Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang fisik dan prasarana yang berkualitas	Meningkatkan kualitas produk dan dokumen- dokumen perencanaan yang di dukung dengan kerjasama antar lembaga perencanaan baik propinsi maupun pusat dan kerja sama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi	Penyusunan Dokumen perencanaan bidang Fisik prasarana yang relevan untuk menjawab berbagai permasalahan dan isu bidang fisik dan prasarana pada skala kota
	Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya yang berkualitas	Meningkatkan kualitas produk dan dokumen- dokumen perencanaan yang di dukung dengan kerjasama antar lembaga perencanaan baik propinsi maupun pusat dan kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi	Penyusunan Dokumen perencanaan bidang fisik prasarana yang relevan untuk menjawab berbagai permasalahan dan isu bidang fisik dan prasarana pada skala kota
7. Mewujudkan koordinasi, pengendalian kebijakan, pelaksanaan & hasil perencanaan pembangunan daerah yg berkualitas	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Ekonomi FisprWil	Meningkatkan koordinasi dalam menyusun dan menerapkan kebijakan dan program terkait dengan penanganan permasalahan - permasalahan di bidang ekonomi fisprawil dan bidang sosial budaya secara komprehensif dan integral	Melakukan koordinasi perencanaan pembangunan bidang Ekonomi dan Fisik Prasarana Wilayah di Kota Magelang yang meliputi urusan di bawah koordinasi bidang ekonomi Prasarana Wilayah
	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Sosial Budaya		Melakukan koordinasi perencanaan pembangunan bidang Sosial Budaya di Kota Magelang sesuai urusan di bawah kewenangan koordinasi bidang sosial budaya

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
8. Meningkatkan kinerja monitoring evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi RKPD dan RPJM	Meningkatkan kualitas kajian dan evaluasi kebijakan pembangunan sebagai bahan dalam proses perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan di berbagai bidang dan pencapaian tujuan sasaran dalam RPJMD	Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
	Meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Ekonomi Fisik Prasarana Wilayah	Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan	Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang ekonomi Prasarana Wilayah
	Meningkatnya monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Sosial Budaya		Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya

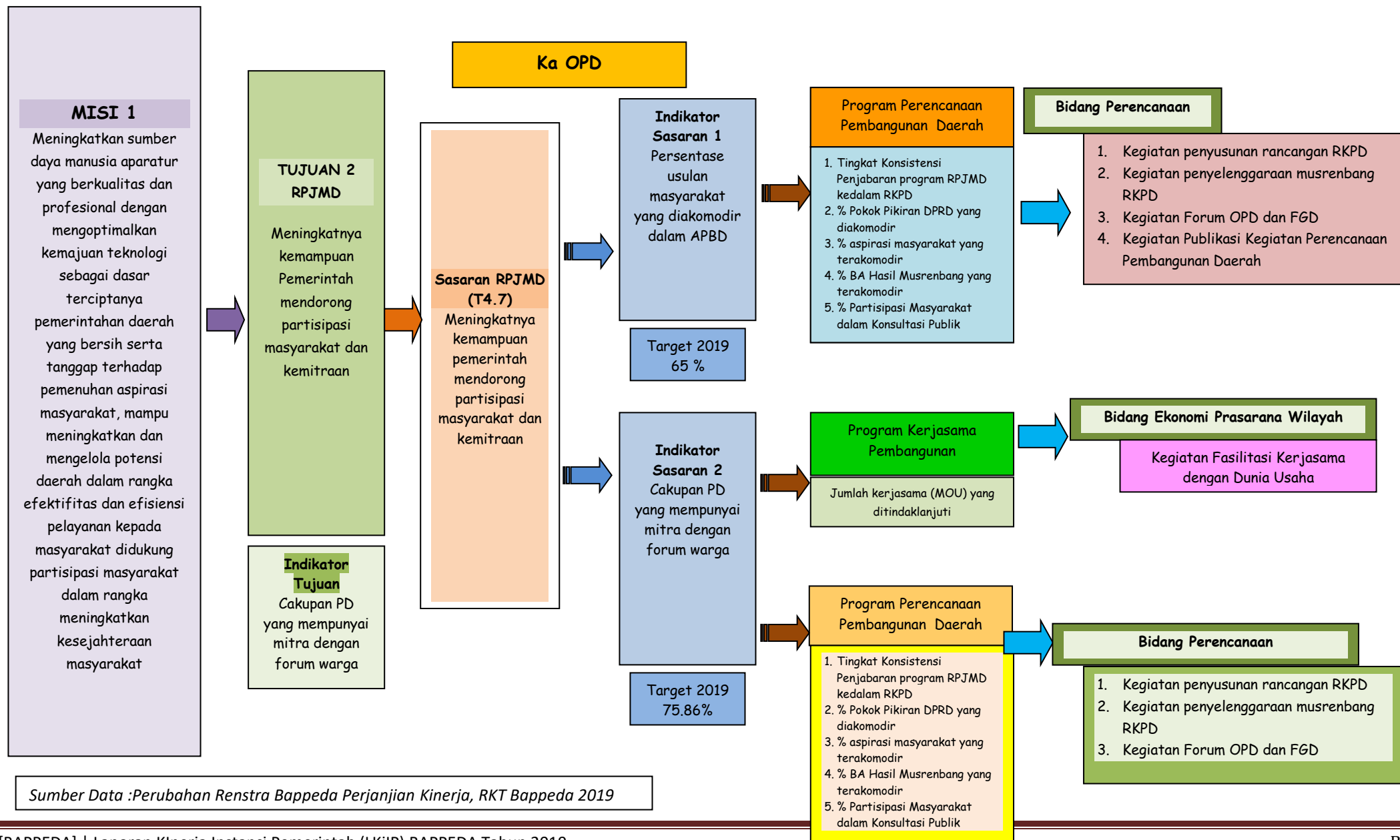
Di bawah ini merupakan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran yang terdapat di dalam RPJMD Kota Magelang 2016-2021 dengan Renstra Bappeda Kota Magelang:

RPJMD Kota Magelang		RENSTRA BAPPEDA Kota Magelang	
VISI		TUJUAN 1	
MAGELANG SEBAGAI KOTA JASA YANG MODERN DAN CERDAS DILANDASI MASYARAKAT SEJAHTERA DAN RELIGIUS		Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif & berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi	
MISI		SASARAN 1	SASARAN 2
Meningkatkan Sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintah daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat di dukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat		Meningkatnya kualitas perencanaan dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif dan inovatif	Terwujudnya dukungan data dan informasi terupdate
TUJUAN KE-2		TUJUAN 2	
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif melalui optimalisasi teknologi informasi		Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	
SASARAN		SASARAN	
Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel		Terwujudnya konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	
TUJUAN KE-4		TUJUAN 3	
Mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam rangka memajukan kualitas hidup masyarakat		Mewujudkan dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasarana dan bidang sosbud yang berkualitas	
SASARAN		SASARAN 1	
Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan		Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi yang berkualitas	
		SASARAN 2	
		Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan terimplementasinya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Fispra yang berkualitas	
		SASARAN 3	
		Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan terimplementasinya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Sosial Budaya	

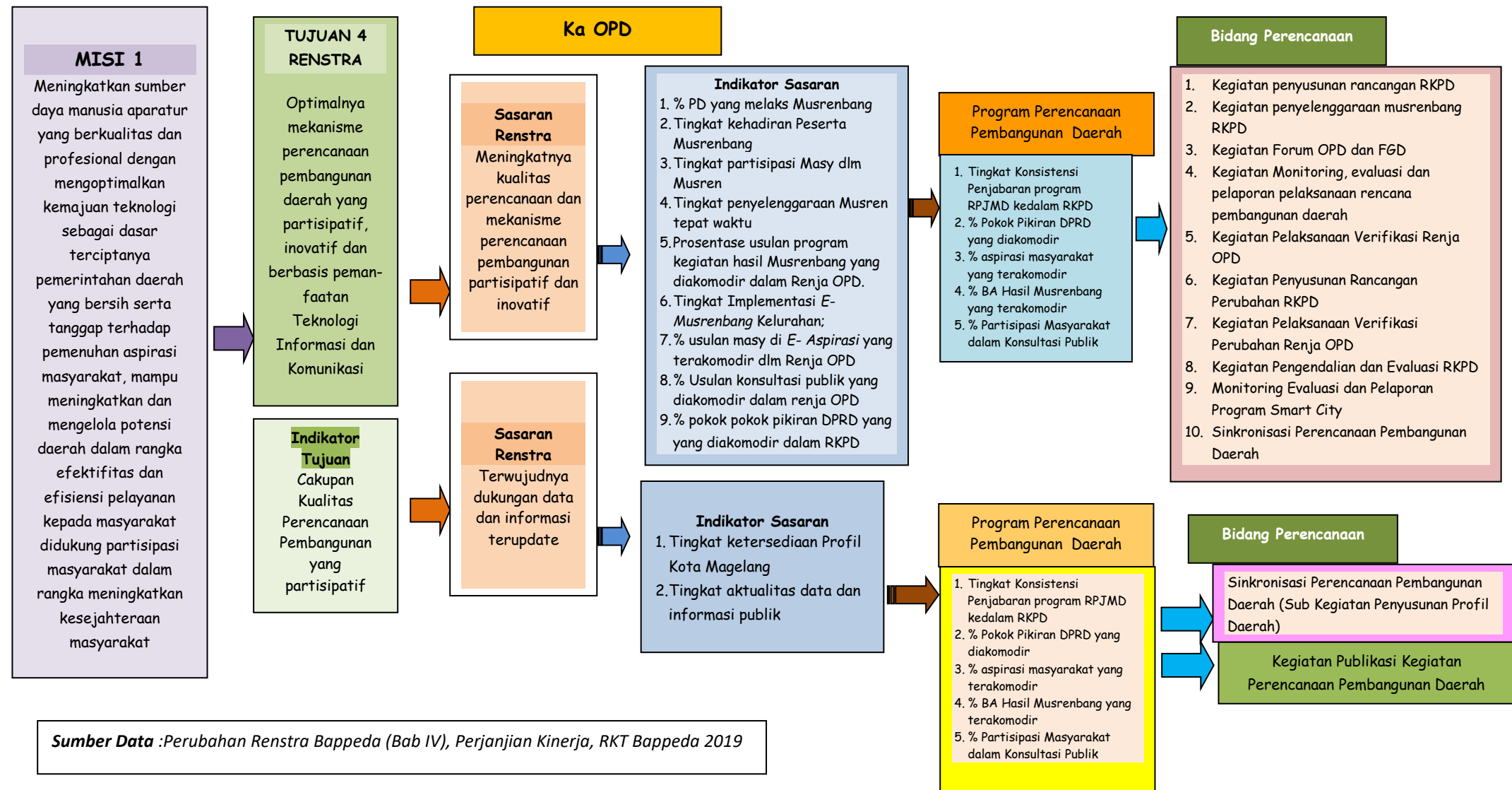
Cascading 1. Kinerja Sasaran Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel



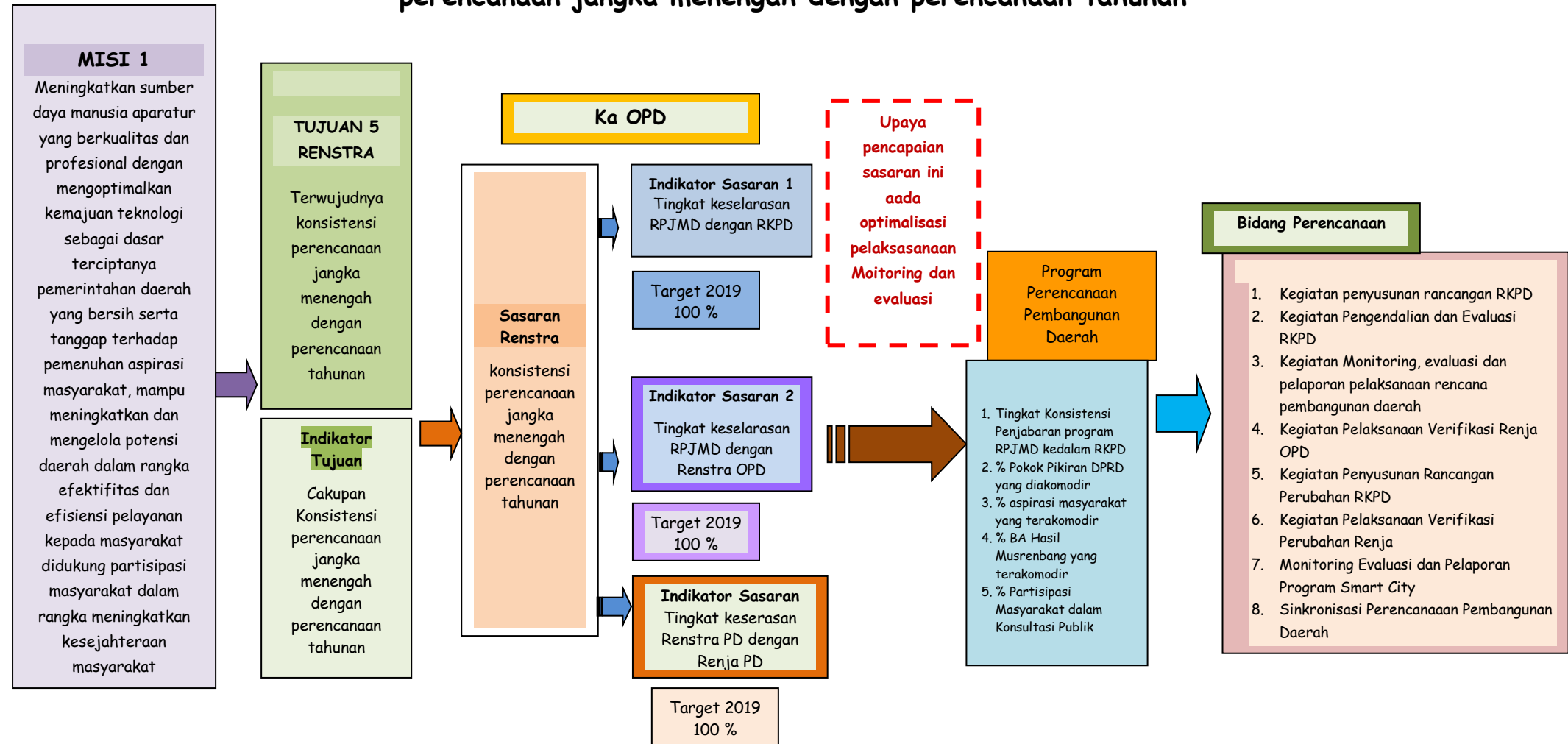
Cascading 2. Kinerja Sasaran Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan



Cascading 3. Kinerja Tujuan Renstra/Sasaran Strategis IKU Optimalnya mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

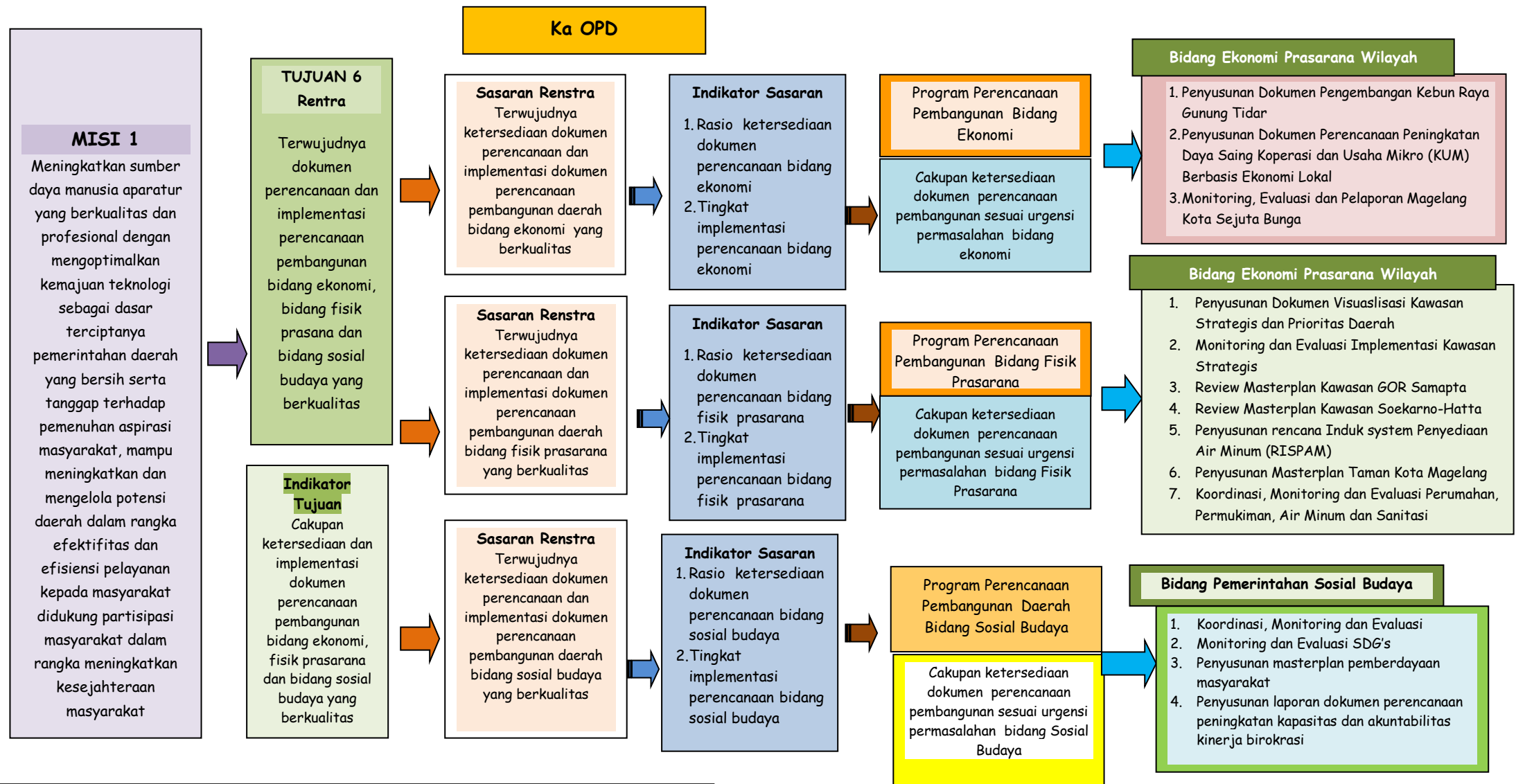


Cascading 4. Kinerja Tujuan Renstra/Sasaran Strategis IKU Terrwujudnya konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan



Sumber Data :Perubahan Renstra Bappeda (Bab IV), Perjanjian Kinerja, RKT Bappeda 2019

Cascading 5. Kinerja Tujuan Renstra/Sasaran Strategis IKU Terwujudnya dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasana dan bidang sosial budaya yang berkualitas



Sumber Data :Perubahan Renstra Bappeda (Bab IV), Perjanjian Kinerja, RKT Bappeda 2019

2.2 Perjanjian Kinerja

Dasar pengukuran kinerja yang dipergunakan pada tahun 2019 adalah Perjanjian Kinerja yang telah di sempurnakan dengan Revisi Perjanjian Kinerja tahun 2019. Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2019 merupakan tahun kedua pelaksanaan baik dalam RPJMD maupun Renstra Perangkat Daerah.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang merupakan pernyataan komitmen Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada Walikota Magelang mengenai target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2019. Adapun Target Kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2019 selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
MISI I : <i>Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat</i>				
1	Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel	a. Persentasi capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja	Prosentase	95%
		b. Persentase Publikasi data dan statistik sektoral yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	Prosentase	80%
2	Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	a. Prosentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	Prosentase	65%
		b. Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	Prosentase	75.86%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
3	Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Cakupan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif	Prosentase	62.5%
4	Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	Cakupan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	Prosentase	100%
5	Mewujudkan dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasarana dan bidang sosial budaya yang berkualitas	Cakupan ketersediaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasarana dan bidang sosial budaya yang berkualitas	Prosentase	75%

Target kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja merupakan indikator yang tercantum dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang menjadi indikator Kinerja utama yang akan di capai di dalam rentang perencanaan. Indikator di dalam Perjanjian Kinerja ini selaras dengan indikator dalam RPJMD Kota Magelang. Sehingga tingkat pencapaian target kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja mencerminkan pencapaian target indikator kinerja dalam Renstra dan RPJMD.

Melalui perjanjian kinerja akan terwujud komitmen dari penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak di batasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya

Untuk mencapai indikator kinerja sasaran tersebut, indikator kinerja program yang mendukung sebagaimana tersaji dalam tabel 2.3 berikut.:

**Tabel 2.3 Indikator Kinerja Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Magelang Tahun 2018**

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6
MISI I : <i>Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat</i>					
1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD	a. Rasio aparatur perencanaan dengan latar belakang pendidikan : • S1 • S2 • S3 b. Rasio aparatur perencanaan yang mengikuti pelatihan perencanaan dan penganggaran c. Cakupan seminar/ workshop /pelatihan yang diselenggarakan Bappeda d. Cakupan peningkatan kapasitas aparatur perencana OPD	% % % %	37% 50% 0% 90% 98% 100%	Rp. 47.137.000,-
4	Perencanaan Pembangunan Daerah	a. Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	%	100%	Rp.968.064.000,-
		b. Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir	%	80%	
		c. Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir	%	80%	
		d. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik	%	45%	
		e. Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	%	80%	

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6
5	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi	%	100%	Rp. 884.618.000,-
6	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang sosial budaya	%	100%	Rp 489.966.000,-
7	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Fisik Prasarana	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang Fisik Prasarana	%	100%	Rp. 1.446.008.000,-

❖ Rencana Penganggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Di tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota melaksanakan 9 Program dan 64 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.4 Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2019

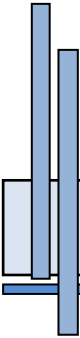
No.	Kode Rekening	Nama OPD/Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4
	4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	2.18 . 4.03.01 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	
1	2.18 . 4.03.01 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	4.545.000
	4.03 . 4.03.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
2	4.03 . 4.03.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	755.000
3	4.03 . 4.03.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	81.600.000
4	4.03 . 4.03.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	9.650.000

No.	Kode Rekening	Nama OPD/Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4
5	4.03 . 4.03.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	167.352.000
6	4.03 . 4.03.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	73.292.000
7	4.03 . 4.03.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	16.436.000
8	4.03 . 4.03.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.220.000
9	4.03 . 4.03.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.094.000
10	4.03 . 4.03.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7,080,000
11	4.03 . 4.03.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	10,602,000
12	4.03 . 4.03.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	24.015.000
13	4.03 . 4.03.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	286.460.000
14	4.03 . 4.03.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	115,642,000
	4.03 . 4.03.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	
15	4.03 . 4.03.01 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	39.822.000
16	4.03 . 4.03.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	209.500.000
17	4.03 . 4.03.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	13,319,000
18	4.03 . 4.03.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	35.500.000
19	4.03 . 4.03.01 . 02 . 27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	5,000,000
	4.03 . 4.03.01 . 20	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	
20	4.03 . 4.03.01 . 20 . 15	Workshop perencanaan pembangunan daerah	10.127.000
21	4.03 . 4.03.01 . 20 . 16	Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	37.010.000

No.	Kode Rekening	Nama OPD/Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4
	4.03 . 4.03.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	
22	4.03 . 4.03.01 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	16,490,00
23	4.03 . 4.03.01 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	8,508,000
24	4.03 . 4.03.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	8,509,000
25	4.03 . 4.03.01 . 06 . 06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	13,656,000
26	4.03 . 4.03.01 . 06 . 08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	18,356,000
27	4.03 . 4.03.01 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	4,830,000
28	4.03 . 4.03.01 . 06 . 28	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	9.810.000
	4.03 . 4.03.01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	
29	4.03 . 4.03.01 . 21 . 06	Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	12.000.000
30	4.03 . 4.03.01 . 21 . 08	Penyusunan rancangan RKPD	298.966.000
31	4.03 . 4.03.01 . 21 . 09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	142,539,000
32	4.03 . 4.03.01 . 21 . 10	Penetapan RKPD	32,645,000
33	4.03 . 4.03.01 . 21 . 13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	19,000,000
34	4.03 . 4.03.01 . 21 . 14	Forum OPD dan FGD	199,823,000
35	4.03 . 4.03.01 . 21 . 19	Publikasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah	84,080,000
36	4.03 . 4.03.01 . 21 . 31	Pelaksanaan Verifikasi Renja OPD	121,032,000
37	4.03 . 4.03.01 . 21 . 35	Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD	132,950,000
38	4.03 . 4.03.01 . 21 . 36	Penetapan Perubahan RKPD	27,043,000
39	4.03 . 4.03.01 . 21 . 37	Pelaksanaan Verifikasi Perubahan Renja OPD	121,074,000

No.	Kode Rekening	Nama OPD/Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4
40	4.03 . 4.03.01 . 21 . 42	Pengendalian dan Evaluasi RKPD	51,000,000
41	4.03 . 4.03.01 . 21 . 44	Konsultasi Publik RPJMD	55,050,000
42	4.03 . 4.03.01 . 21 . 46	Forum OPD dan FGD RPJMD	113.467.000
43	4.03 . 4.03.01 . 21 . 47	Pelaksanaan Verifikasi Renstra OPD	114,700,000
44	4.03 . 4.03.01 . 21 . 49	Penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis	170,650,000
45	4.03 . 4.03.01 . 21 . 64	Penyusunan Standar Satuan Harga	113.000.000
46	4.03 . 4.03.01 . 21 . 66	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Smart City	111.000.000
47	4.03 . 4.03.01 . 21 . 75	Penyusunan Perubahan RPJMD	262.660.000
48	4.03 . 4.03.01 . 21 . 79	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1,252,061,000
	4.03 . 4.03.01 . 22	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	
49	4.03 . 4.03.01 . 22 . 47	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	127.883.000
50	4.03 . 4.03.01 . 22 . 52	Penyusunan Dokumen Pengembangan Kebun Raya Tidar	490.951.000
51	4.03 . 4.03.01 . 22 . 64	Penyusunan Dokumen Perencanaan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro (KUM) berbasis Ekonomi Lokal	161.432.000
52	4.03 . 4.03.01 . 22 . 67	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Magelang Kota Sejuta Bunga	104.352.000
	4.03 . 4.03.01 . 23	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	
53	4.03 . 4.03.01 . 23 . 38	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	28,214,000
54	4.03 . 4.03.01 . 23 . 50	Penyusunan Masterplan Pemberdayaan Masyarakat	155.827.000

No.	Kode Rekening	Nama OPD/Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4
55	4.03 . 4.03.01 . 23 . 52	Penyusunan Laporan Dokumen Perencanaan Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	153.552.000
56	4.03 . 4.03.01 . 23 . 947	Penyusunan dokumen Masterplan Wisata Diponegoro	152.373.000
	4.03 . 4.03.01 . 26	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	
57	4.03 . 4.03.01 . 26 . 15	Penyusunan Dokumen Visualisasi Kawasan Strategis dan Prioritas Daerah	95.602.000
58	4.03 . 4.03.01 . 26 . 24	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kawasan Strategis	25.000.000
59	4.03 . 4.03.01 . 26 . 39	Review Masterplan GOR Samapta	254,000,000
60	4.03 . 4.03.01 . 26 . 41	Review Masterplan Kawasan Soekarno-Hatta	209,000,000
61	4.03 . 4.03.01 . 26 . 43	Penyusunan RencanaInduk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)	294.000.000
62	4.03 . 4.03.01 . 26 . 44	Penyusunan Masterplan Taman Kota Magelang	355,406,000
63	4.03 . 4.03.01 . 26 . 45	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Perumahan, Pemukiman, Air Minum dan Sanitasi Kota Magelang	139.000.000
64	4.03 . 4.03.01 . 26 . 49	Penyusunan Masterplan Kampung Tematik, Terpadu dan Hijau	74.000.000
TOTAL			7,523,512,000



BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019

3.1 Capaian Kinerja 2019

3.2 Akuntabilitas dan Realisasi Anggaran 2019

3.3 Analisa Efisiensi Sumber daya

3.4 Pencapaian Kinerja Program Kegiatan

Kinerja Pemerintah yang terukur di maksudkan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan kinerja Pemerin-tah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan atau sebagai salah satu ukuran untuk bagi keberhasilan suatu organisasi yang tercermin di dalam

keberhasilan dan pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam pencapaian visi misi organisasi atau visi misi Kepala Daerah.

Akuntabilitas Kinerja adalah pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan visi dan misinya. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kekurangan, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akutabilitas Kinerja menjadi ukuran bagi keberhasilan pelaksanaan mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya di capai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Akuntabilitas kinerja ini juga akan menilai seberapa jauh efektifitas penggunaan anggaran untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan, serta seberapa jauh tingkat efisiensi pemanfaatan sumberdaya yang ada. Kinerja yang terukur atas kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja yang di tetapkan pada awal tahun pelaksanaan program kegiatan

Pada bab ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2019 baik Perjanjian Kinerja Penetapan maupun Perjanjian Kinerja Perubahan yang telah di *cascade* target pencapaian indikator kinerjanya serta realisasi anggaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019.

Pengukuran kinerja ini juga dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran-sasaran tersebut agar dapat terukur maka dituangkan ke dalam indikator-indikator kinerja. Keberhasilan dari pencapaian sasaran-sasaran dilihat dari pencapaian dari indikator kinerja tersebut. Dengan adanya pengukuran kinerja, maka kita dapat mengetahui sejauh mana pencapaian

tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan disesuaikan dengan perubahan yang terjadi.

Rumus untuk menghitung capaian kinerja setiap indikator ada dua yaitu:

1. Indikator bermakna positif, artinya: jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, maka digunakan rumus pendek.

$$\frac{REALISASI}{TARGET} \times 100\%$$

2. Indikator bermakna negatif jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, gunakan rumus panjang.

$$\frac{TARGET - (REALISASI - TARGET)}{TARGET} \times 100\%$$

Nilai capaian kinerja masing-masing sasaran dianggap mempunyai bobot yang sama, sehingga digunakan rumus rata-rata. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, maka capaian kinerja dikategorikan dengan menggunakan skala ordinal, merujuk pada skala penilaian kinerja sebagai berikut:

- Nilai dibawah 55 : kurang
- Nilai > 55 s/d 80 : cukup
- Nilai >80 s/d 95 : baik
- Nilai > 95 s/d 100 : sangat baik

Adapun evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2019 sebagaimana uraian berikut ini:

Misi Pertama "***Meningkatkan sumberdaya manusia aparatur yang berkualitas dan professional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih dan tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat di dukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat***"

Sasaran strategis pada RPJMD untuk misi pertama yaitu sebagai berikut:

- a. Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel;
- b. Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan.

Kedua sasaran strategis tersebut diwakili dengan 4 (empat) indikator kinerja, yaitu **a).** Persentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja; **b).** Persentase Publikasi data dan statistik sektoral yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan; **c).** Prosentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD, **d).** Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga.

Selain dua sasaran tersebut di atas, terdapat 3 ukuran yang dipergunakan untuk menginterpretasikan kinerja Perencanaan sebagaimana yang terdapat di dalam Bab IV Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2016-2021, yaitu :

- a. Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Indikator kinerja yang dipergunakan yaitu *cakupan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif*;
- b. Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Indikator kinerja yang dipergunakan yaitu *cakupan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan*;
- c. Mewujudkan dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasarana dan bidang sosial budaya yang berkualitas. Indikator kinerja yang dipergunakan yaitu *cakupan ketersediaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasarana dan bidang sosial budaya yang berkualitas*.

Kelima sasaran strategis dengan 7 indikator kinerja menjadi ukuran yang dipergunakan untuk merepresentasikan keberhasilan kinerja Perencanaan yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Perjanjian kinerja antara Walikota dengan Kepala OPD sebagai penerima amanah sebagaimana terdapat di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bertujuan:

- a) sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b) menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d) sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas

perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; e) sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Capaian
MISI I : <i>Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat</i>					
1	Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel	a. Persentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja	95%	72,29%	76,09%
		b. Persentase Publikasi data dan statistik sektoral yang di manfaatkan dalam perencanaan pembangunan	80%	99.71%	124.64%
2	Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	a. Prosentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	80%	81,48%	101,85%
		b. Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	75,86%	65,52%	86,37%
3	Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Cakupan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif	62,50%	74.99%	119,98%
4	Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	Cakupan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	100%	100%	100%
5	Mewujudkan dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan	Cakupan ketersediaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik	75%	76.80%	102.4%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Capaian
	pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasarana dan bidang sosial budaya yang berkualitas	prasana dan bidang sosial budaya yang berkualitas			

Kinerja perencanaan pada tahun 2019 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Berdasarkan data sebagaimana terdapat di dalam tabel tersebut di atas, dari 5 (lima) sasaran strategis dengan 7 (tujuh) indikator kinerja yang diperjanjikan Kepala Bappeda Kota Magelang dengan Walikota Magelang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019, hampir semua mencapai target yang di perjanjikan bahkan capaian kinerjanya melebihi 100%, namun terdapat dua indikator yang tidak dapat mencapai target dari indikator kinerja. Kinerja ini semakin menambah semangat aparatur perencana untuk senantiasa meningkatkan kinerja perencanaan untuk lebih memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Analisis terhadap hasil capaian indikator sasaran tersebut di atas sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Terwujudnya daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel

Tujuan pelaksanaan pembangunan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan salah satu upaya untuk mencapai tujuan dimaksud, pemerintah melalui berbagai regulasi terus berupaya melaksanakan seluruh tahapan baik di tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi atas pelaksanaan yang dilakukan.

Dalam fungsi perencanaan, salah satu kunci sukses pembangunan adalah bagaimana memastikan perencanaan yang baik berkualitas, taat regulasi dan dapat diimplementasikan mengingat perencanaan memegang fungsi vital sekaligus sebagai tahap awal dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan yang baik akan memberikan kontribusi hampir separuhnya bagi keberhasilan pembangunan artinya keberhasilan pembangunan diawali dari suatu perencanaan yang baik dan apabila daerah gagal merencanakan dengan baik pembangunan daerahnya maka hampir kita sedang merencanakan kegagalan pembangunan itu sendiri.

Di dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum di dalam Undang – undang Nomor 25 tahun 2004, dalam pendekatan perencanaan pembangunan daerah, terdapat 5 (lima) pendekatan proses perencanaan antara lain pendekatan partisipatif mendampingi beberapa pendekatan yang lain yaitu 1).pendekatan *teknokratis*; 2). pendekatan *top down (atas-bawah)*; 3). bawah-atas (*bottom up*); 4).partisipatif dan 5). pendekatan politis.

Mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017, terdapat beberapa pendekatan proses perencanaan pembangunan daerah yang dikenal antara lain pendekatan partisipatif mendampingi beberapa pendekatan yang lain yaitu pendekatan teknokratis, pendekatan *top down/bottom up* serta pendekatan politis

Perencanaan partisipatif adalah sebagaimana penjelasan di dalam Undang – Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah perencanaan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan. Partisipasi masyarakat ini adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan sehingga muncul aspirasi dan rasa memiliki terhadap apa yang di rencanakan. Perencanaan pembangunan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Perencanaan yang baik akan memberikan kontribusi yang besar terhadap keberhasilan pembangunan dan begitu pula sebaliknya.

Pendekatan partisipatif memiliki proporsi strategis mengingat bahwa peran partisipasi masyarakat sangat menentukan. Semakin kritis dan partisipatif masyarakat kota terlibat dalam perencanaan mengindikasikan semakin baik pembangunan. Hal ini juga harus dibarengi dengan ketersediaan data yang akurat dan akuntabel agar pengambilan keputusan perencanaan dan kebijakan daerah dan kebijakan daerah akan berjalan dengan baik dan berkualitas.

Untuk mengukur kinerja dari sasaran strategis ini terdapat 2 (dua) indikator yang yang merepresentasikan keberhasilan dari capaian kinerjanya yaitu :

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Perencanaan Daerah Partisipatif Berbasis Data yang Akurat dan Akuntabel

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	% Capaian Kinerja	Target Akhir RPJMD
1	Persentasi capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja	74,69%	95%	72,29%	76,09%	100%
2	Persentase Publikasi data dan statistik sektoral yang di manfaatkan dalam perencanaan pembangunan	97,81%	80%	99,71%	124,64%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					100,37%	

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari indikator 2 indikator sasaran tersebut terdapat satu indikator yang melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2019. Adapun rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2019 sebesar **100,37%**.

a. Persentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja

Indikator capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja mempunyai indikator kinerja Total target sasaran terlaksana/jumlah target sasaran perencanaan pembangunan di kalikan 100%

Di lihat dari indikator kinerja sasaran, Persentase capaian Sasaran Pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja menunjukkan capaian yang cukup baik. Capaian kinerja ini selalu meningkat dari tahun ke tahun, namun pada 2 (dua) tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2015 capaian kinerja indikator sasaran ini adalah mencapai 85%, kemudian naik pada tahun 2016 menjadi 89% dari target 88 % yang ditetapkan pada tahun 2016. Realisasi kinerja pada tahun 2017 sebesar 90.41% dari target yang di tetapkan pada tahun tersebut sebesar 90% sehingga capaiannya sebesar 100.46%. Namun pada tahun 2018 realisasi agak menurun ke angka 74,69 % dari target yang di tetapkan di awal tahun sebesar 93%. Adapun capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 76,09%. Meski mengalami pelambatan pencapaian target pada tahun 2019 namun demikian beberapa indikator hampir mencapai target dan sisanya adalah perlu upaya keras. Perlu untuk meningkatkan performance OPD yang mengemban dan merealisasikan setiap target pada sasaran dalam RPJMD dan memastikan segala sesuatunya berada pada *track* yang benar. Semakin baik pencapaian sasaran ini maka akan memberikan daya ungkit yang lebih baik pada tahun-tahun berikutnya.

Data pada tahun 2019 dari 83 indikator sasaran yang di amanatkan terdapat **60** indkator yang tercapai. Apabila di dibandingkan dengan kinerja pada tahun 2018 maka kinerja pada tahun ini lebih rendah. Realisasi pada tahun 2018 dari 62 indikator sasaran. Capaian pada tahun 2019 sedikit lebih kecil apabila di dibandingkan dengan tahun sebelumnya selain karena beberapa indikator kinerja yang memang tidak tercapai, juga karena indikator sasaran yang akan di capai pada tahun 2019 lebih banyak di dibandingkan tahun sebelumnya. Semakin tinggi pencapaian sasaran ini maka akan memberikan daya ungkit yang lebih baik pada tahun-tahun berikutnya. Strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran di atas adalah melalui Peningkatan kualitas pelayanan berbasis data dan informasi yang cepat, tepat dan akurat memenuhi SPM (Standar pelayanan Minimal) melalui aplikasi teknologi informasi. Sedangkan kebijakan umum yang diusung adalah perluasan inovasi proses perencanaan pembangunan daerah.

Beberapa kendala yang perlu untuk diantisipasi ke depan antara lain:

1. Masih diperlukannya sinergisitas proses perencanaan pembangunan daerah dari pendekatan politik (proses politik) ke pendekatan teknokratik.
2. Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah harus terus dioptimalkan untuk meminimalisasi deviasi. Diperlukan berbagai inovasi dan strategi mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan percepatan pencapaian indikator kinerja daerah yang telah ditetapkan pada awal periode perencanaan;
3. Masih memerlukan ruang pemahaman perencanaan di setiap level pada OPD. Tingkat kapasitas pemahaman terkait proses dan substansi perencanaan di setiap level pada OPD masih belum optimal;
4. Masih diperlukan penguatan data untuk mendukung proses perencanaan, meskipun dari tahun ke tahun sudah mengalami kemajuan, proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian/telaahan, masih perlu dilakukan penguatan sehingga mampu menjadi dasar analisis kebijakan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik;
5. Tantangan pada fungsi perencanaan semakin tinggi, seiring kompleksitas dan tuntutan akselerasi atas kesejahteraan masyarakat dihadapkan dengan berbagai kondisi permasalahan bangsa yang semakin kompleks serta dinamika global. Sehingga membutuhkan solusi dengan pendekatan pemikiran dan langkah yang kreatif dan inovatif.

Solusi atas kendala dilakukan melalui:

1. Peningkatan pemahaman yang sama antara lain terkait perumusan pokok-pokok pikiran DPRD dapat diwujudkan pada saat penyusunan Rancangan Awal sehingga dapat diintegrasikan lebih dini dalam perencanaan pembangunan daerah. Komunikasi lebih intensif antara Bappeda, Setwan dan DPRD menjadi kunci untuk mewujudkan hal tersebut didukung dengan pemanfaatan IT sehingga memudahkan dalam mengintegrasikan pokok-pokok pikiran dewan ke dalam perencanaan pembangunan daerah;
2. Evaluasi bersama pihak-pihak terkait hal ini, di level eksekutif integrasi sistem perencanaan dan penganggaran perlu didorong secara penuh untuk pengintegrasian. Komunikasi intensif dengan DPRD juga layak diupayakan.
3. Peningkatan pemahaman di seluruh OPD secara internal maupun koordinasi antar OPD dan Bappeda serta melalui sosialisasi dan workshop. TAPD saat mengawal dan verifikasi RKA harus mengacu pada RKPD.
4. Peningkatan kualitas dan intensitas forum dialog perencanaan, *Focus Group Discussion* serta forum OPD membahas isu-isu strategis pembangunan.

5. Peningkatan *capacity building* di seluruh OPD secara internal maupun koordinasi antar OPD dan Bappeda serta melalui sosialisasi dan workshop. TAPD saat mengawal dan verifikasi RKA harus mengacu pada dokumen perencanaan RKPD. Perluasan workshop pada seluruh level pada OPD dan pemahaman pada kepala OPD terkait perencanaan pembangunan daerah. Jika diperlukan ada medium paparan oleh Kepala OPD atas dokumen perencanaan yang disusun dan ditetapkan seperti Renja dan Renstra serta Perjanjian Kinerja.
6. Upaya peningkatan sistem manajemen data terpadu yang didukung oleh data OPD yang valid dan dinamis serta akuntabel.
7. Perlunya inovasi tiada henti baik dalam tataran inovasi perencanaan pembangunan dan inovasi yang berupa terobosan kebijakan yang *out of the box* yang berorientasi pada kecepatan dan kualitas pelayanan publik dan akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan indikator yang ada

b. Persentase Publikasi Data dan Statistik Sektorial yang di manfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan

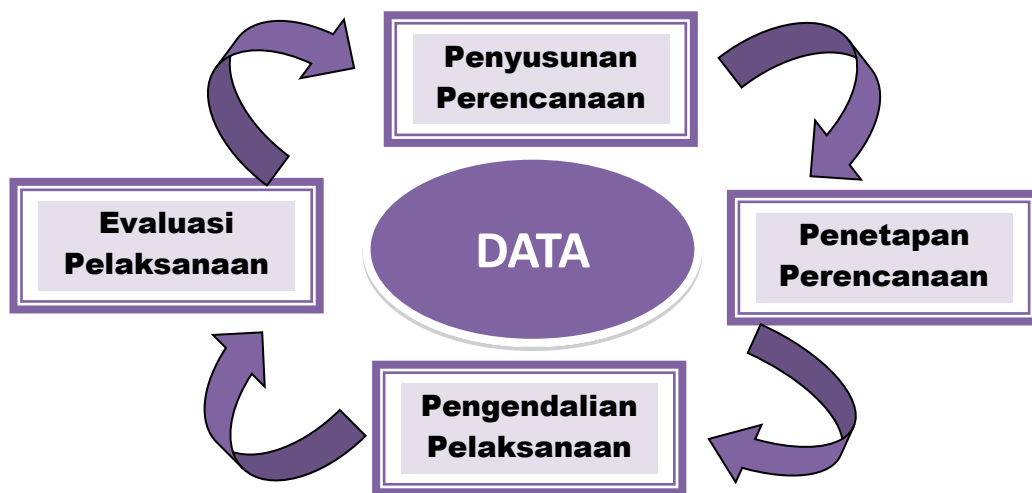
Data/Informasi dan statistik sektoral merupakan salah satu bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan masukan dalam proses perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian ketersediaan data dan statistik yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan.

Sebagaimana di amanatkan di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab VII Pasal 31 yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data/informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sejalan dengan itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 13 ayat 1 bahwa: "Penyusunan rencana pembangunan daerah menggunakan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah serta rencana tata ruang". Hal ini semakin diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dimana data merupakan elemen yang sangat strategis dan menentukan dalam perencanaan dan kebijakan publik. Mendasar pada hal tersebut maka dalam penyusunan dokumen perencanaan tidak terlepas dari kebutuhan data statistik.

Terwujudnya perencanaan yang baik tentu tidak terlepas dari keberhasilan dalam mengelola data dan informasi. Penguatan data yang akurat dan akuntabel akan membawa pengaruh bagi kualitas perencanaan. Pemanfaatan data statistik dan informasi menjadi hal yang sangat penting bagi pengambil kebijakan/keputusan

karena kebijakan/keputusan yang berkualitas tergantung dari data/informasi akurat, terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kebutuhan akan data ini sangat berperan di dalam siklus perencanaan, yang di mulai dari penyusunan perencanaan, penetapan perencanaan, pengendalian pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan. Di dalam perumusan perencanaan daerah data/Informasi dan statistik sektoral merupakan salah satu bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan masukan dalam proses perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Proses perencanaan memerlukan kapasitas data dan statistik yang baik. Oleh karena itu, ketersediaan data dan statistik yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan. Penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas sangat membutuhkan data yang valid, akurat dan terkini.



Gambar 3.1 Peran data dalam Siklus Perencanaan

Berkaitan dengan kebutuhan data statistik dalam penyusunan dokumen perencanaan, maka hal ini telah diamanatkan dalam Pernyataan tersebut merupakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menyebutkan bahwa Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

Untuk memenuhi kebutuhan akan data / Informasi dan statistik sektoral dalam mendukung perencanaan pembangunan, Pemerintah Kota Magelang melalui OPD teknis yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Perencanaan Pembangunan dan Statistik melaksanakan sejumlah program kegiatan terkait dengan data dan statistik.

Data dasar yang diperlukan dalam penyusunan dokumen perencanaan yaitu data dasar indikator makro, diantaranya : PDRB, laju pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, Inflasi (Indeks Harga Konsumen), dan sebagainya. Selain itu berupa data dasar Indikator sosial, yaitu : IPM, data kependudukan, data kemiskinan, data

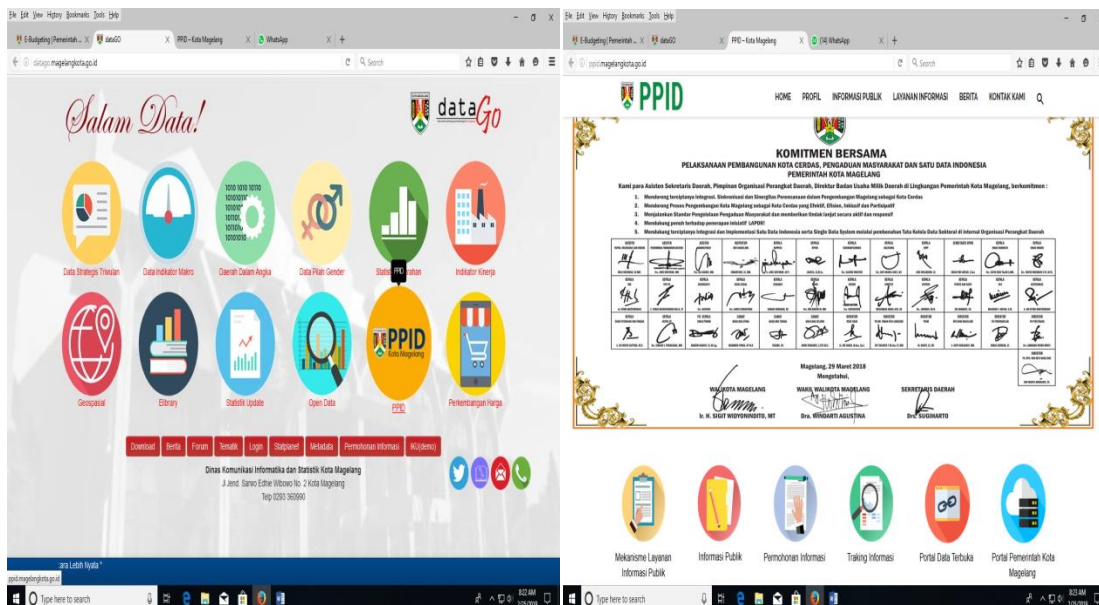
ketenagakerjaan, data kesehatan, dan sebagainya. Dari sisi statistik sektoral, Diskominsta Kota Magelang sebagai *leading sector* dalam urusan statistik pada tahun 2019 melalui Program Pengembangan data/ informasi/ Statistik Daerah telah merilis beberapa produk data diantaranya : Buku Daerah Dalam Angka, Buku PDRB, Buku Analisis Situasi Pembangunan Manusia dan Buku Analisis Perkembangan Laju Inflasi. Selain dalam bentuk buku, data-data sektoral juga *terpublish* secara on line melalui DATA GO yang merupakan Data Centre Kota Magelang dan dapat diakses melalui laman: datago.magelangkota.go.id. Data dan statistik sektoral yang tersaji berasal dari data teknis seluruh sektor yang telah tervalidasi dan terkini. Pengembangan DataGo saat ini terus di kembangkan baik fitur dan tampilannya. Tampilan DataGo saat ini dikembangkan dalam sajian data kelurahan dengan *interactive mapping stat Planet*. Saat ini DataGo bisa di akses via twitter dengan alamat <http://twitter.com/datagodatago/status/955276292936499200>. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai *leading sector* perencanaan pembangunan pada tahun 2019 melalui Program Pengembangan data/informasi telah merilis Buku Profil Daerah. Buku Profil Daerah menyajikan data/informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Bab X pasal 274.

Indikator Persentase Publikasi Data dan Statistik Sektoral yang di manfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan di hitung dengan formulasi jumlah publikasi data di bagi dengan jumlah publikasi data yang di butuhkan (di mana data yang di butuhkan ini meliputi data strategis daerah, analisis indakor ekonomi, analisis inikator sosial Kota Magelang, Tabel IO Kota Magelang serta Analisis Ketimpangan Wilayah). Indikator ini dilaksanakan oleh dua OPD yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dan Diskomista Kota Magelang. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakannya melalui Program Pengembangan data / informasi dengan kegiatan Penyusunan Profil Daerah yang mana anggaran dari kegiatan tersebut merupakan sharing dari APBD dan Bantuan Propinsi Jawa Tengah. Adapun output dari kegiatan tersebut yaitu Buku Profil Daerah. Buku Profil Daerah menyajikan data/informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Realisasi indikator kinerja Persentase publikasi data dan statistik sektoral yang di manfaatkan dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2019 bila dihitung secara rata-rata dari kedua komponen diatas adalah sebesar **99.71%** dari target sebesar 80% dengan tingkat capaian kinerja indikator sebesar **124,64%**. Jumlah dan jenis data yang terpublikasi melalui DataGo Diskominsta dengan realisasi capaian sebesar 60% dan capaian realisasi untuk jenis data dalam SIPD Kota Magelang sebesar 100% (Data/informasi dan indikator makro yang tersaji dalam Buku Profil Daerah seluruhnya dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan atau capaiannya 100%).

Capaian sebesar 60% tersebut dapat di jelaskan di dalam definisi operasional indikator ini untuk publikasi data yang di butuhkan meliputi 5 data yaitu Data Strategis Daerah, Analisis Indikator Ekonomi, analisis Indikator Sosial Kota Magelang, Tabel IO Kota Magelang dan Analisis Ketimpangan Wilayah, dalam capaian di tahun 2019 dari 5 data yang di butuhkan tersebut baru 3 data yang terpenuhi yaitu Data Strategis Daerah, Analisis Indikator Ekonomi, analisis Indikator Sosial Kota Magelang.

Jenis dan data yang terpublikasi baik melalui DataGo maupun melalui SIPD, dapat dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan. Capaian realisasi dari indikator ini menunjukkan *trend* positif. Capaian tahun 2016 yang mencapai 93,5%, capaian tahun 2017 sebesar 94.75% dan pada tahun 2018 sebesar 97,81%. Capaian ini harus terus ditingkatkan hingga akhir periode RPJMD 2016-2021 mengingat data merupakan hal yang sangat vital di dalam pengambilan kebijakan dan menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan. Keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini juga menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran yang tersedia. Seluruh SDM yang terlibat dalam penyediaan data mampu bekerja secara efektif dalam menyediakan dan mempublikasikan data yang akurat dan terkini agar dapat diakses secara luas.



Gambar 3.2 Tampilan Menu pada PPID / DATA GO Kota Magelang

Beberapa kendala yang perlu untuk diantisipasi ke depan antara lain:

1. Belum terintegrasinya basis data sektoral skala kota;
2. Belum kuatnya payung hukum pengelolaan data;
3. Kurangnya pemahaman akan pentingnya data pada skala kota.

4. Masih kurangnya pengelola data yang berkompeten pada setiap Perangkat Daerah sumber data, sehingga data kurang terpelihara dengan baik yang berdampak pada terhambatnya kelancaran manajemen data daerah;
5. Sebagian data belum bisa di sajikan secara *realtime* pada saat data tersebut dibutuhkan mengingat beberapa data memerlukan perhitungan, survey ataupun pengelolaan data

Solusi yang dapat dilakukan diantaranya:

1. Pembinaan secara komprehensif bagi pengelola data pada setiap OPD;
2. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen *DATAGO* yang mengintegrasikan seluruh data sektoral;
3. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Satu Data Kota Magelang;
4. Sosialisasi tentang pentingnya data kepada stakeholder.
5. Melakukan kerjasama dengan lembaga – lembaga terkait dengan pengembangan dan pengelolaan data

2. Sasaran Strategis Meningkatnya kemampuan Pemerintah mendorong Partisipasi Masyarakat dan Kemitraan

Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah menjadikan masyarakat sebagai subjek dan objek di dalam pembangunan. Keterlibatan masyarakat di dalam proses pembangunan menjadi sangat penting. Perlibatan masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan sampai dengan proses pengawasan menjadi satu hal yang tidak bisa di pisahkan. Partisipasi masyarakat dalam proses – proses pembangunan mutlak untuk di laksanakan. Dalam dokumen perencanaan pembangunan Jangka Menengah Kota Magelang, menjalin kemitraan dalam proses pembangunan menjadi tema – tema di dalam tahun perencanaan. Dengan bermitra dengan seluruh elemen masyarakat dan swasta serta perlibatan masyarakat dalam pembangunan di harapkan menjadi modal bagi pemerintah untuk bersama – sama menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Untuk mengukur kinerja dari sasaran strategis ini terdapat 2 (dua) indikator yang yang merepresentasikan keberhasilan dari capaian kinerjanya yaitu: a).Prosentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD dan b). Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga.

Capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya kemampuan pemerintah dalam mendorong partipasi masyarakat dan kemitraan tahun 2019 sebesar **94,11%**. Capaian ini terperinci di dalam dua indikator yang mendukung sasaran yaitu:

Tabel 3.3 Capaian Indikator Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	% Capaian Kinerja	Target Akhir RPJMD
1	Prosentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	71,51%	80%	81,48%	101,85%	70%
2	Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	65,52%	75,86%	65,52%	86,37%	89,66%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					94,11%	

a. Prosentase Usulan Masyarakat yang di akomodir dalam APBD

Persentase usulan masyarakat yang di akomodir dalam APBD mempunyai formulasi perhitungan jumlah usulan masyarakat yang di akomodir di dalam APBD di bagi dengan jumlah usulan masyarakat. Prosentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, prosentase usulan masyarakat yang di akomodir dalam APBD adalah sebesar 70,19% dan capaian kinerjanya adalah 116,98%. Sedangkan pada tahun 2018 adalah sebesar 71,51% dengan capaian kinerja sebesar 115,34%. Adapun pada tahun 2019, prosentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD sebesar 81,48% dengan capaian kinerjanya adalah 101,85%.



Gambar 3.4 Konsultasi Publik Anak dan Lansia untuk menjangkau Aspirasi dan usulan dalam Penyusunan Dokumen RKPD



Gambar 3.5 Kepala Bappeda beserta peserta Konsultasi Publik Anak dan Lansia dalam Penyusunan Dokumen RKPD

Apabila diperbandingkan dengan beberapa tahun ke belakang maka realisasi Indikator Prosentase Usulan Masyarakat yang diakomodir dalam APBD menunjukkan *trend* yang meningkat. Hal ini dapat dilihat dari realisasi awal tahun RPJMD yaitu tahun 2015 adalah 52%, sedangkan pada tahun kedua realisasinya mencapai 56%. Untuk tahun-tahun selanjutnya prosentase realisasi indikator ini di atas angka 70%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin akomodatifnya pemerintah Kota Magelang atas usulan program kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat.

Beberapa media yang dimanfaatkan Pemerintah dalam menjangkau aspirasi masyarakat selain melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), ada juga melalui Konsultasi Publik, *Focus Group Discussion*. Saat ini dikembangkan *e-aspirasi*, *e-Musrenbang* yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan. Adanya *e-Musrenbang* selain dipergunakan untuk menampung usulan masyarakat juga menjawab alasan usulan masyarakat yang tidak tertampung beserta dengan alasannya Hal ini dilakukan meminimalisir persepsi buruk masyarakat akibat tidak terakomodirnya usulan masyarakat dalam APBD. Selain itu juga untuk meningkatkan transparansi dan alur ketertelusuran (*track back*) sehingga tetap mampu menjaga makna Musrenbang di masyarakat



Gambar 3.7 Konsultasi Publik yang di ikuti OPD, Lembaga Masyarakat, Organisasi Profesi, LSM, Parpol dalam Penyusunan Dokumen RKPD



Gambar 3.8 Pelaksanaan FGD Kota Layak Anak dan FGD MKSB

Konsultansi publik dan FGD yang dilakukan dengan berbagai tema ini dalam rangka menjaring aspirasi dan masukan dari *stakeholder* dan berbagai elemen masyarakat untuk berperan serta di dalam penyusunan dokumen perencanaan. Dengan kata lain, keterlibatan mereka di dalam perencanaan merupakan bagian dari *bottom up planning*.



Gambar 3.9 Pelaksanaan FGD Smart City dan FGD Kawasan Strategis

Dalam melakukan penyusunan dokumen RPKD 2020, Bappeda Kota Magelang juga melakukan penyamaan persepsi dengan seluruh OPD di Kota Magelang terkait dengan pencapaian tujuan, sasaran dan tema pembangunan pada tahun 2020. Hal ini sangat penting mengingat OPD yang nantinya akan berkontribusi dan selaku aktor dalam pencapaian target indikator kinerja daerah pada tahun bersangkutan.

Masih dalam rangkaian penyusunan Dokumen RPKD, Pemerintah Kota Magelang menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau yang di singkat Musrenbang yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari kelurahan. Musrenbang Kota merupakan forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) di tingkat kota untuk mematangkan rancangan RPKD kota yang di susun berdasarkan kompilasi seluruh Renja OPD hasil Forum OPD yang merujuk pada RPJMD. Musrenbang ini merupakan arena proses pengambilan keputusan secara partisipatif dalam kebijakan daerah dan merupakan arena strategis untuk semua pihak untuk merumuskan perencanaan pembangunan secara kolaboratif dengan melibatkan 3 pilar pemerintah yaitu eksekutif, legislatif dan masyarakat / pihak swasta.



Gambar 3.11 Pelaksanaan Musrenbang RKPDP Kota Magelang tahun 2019



Gambar 3.12 Pelaksanaan Musrenbang Wilayah tahun 2019 di Wonosobo



Gambar 3.13 Berbagai hasil kreativitas dan inovasi dari pelajar dan masyarakat yang di tampilkan dalam penyelenggaraan Musrenbang RKPD 2019

b. Cakupan PD yang Mempunyai Mitra dengan Forum Warga

Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga merupakan salah satu indikator yang mewakili sasaran strategis meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan. Adapun formulasi dari indikator ini adalah forum warga yang terbentuk karena adanya persamaan kepentingan dan inisiasi warga. Forum warga yang menjadi mitra dari OPD merupakan modal bagi Pemerintah untuk mengakomodir usulan dari masyarakat atau sebagai sarana untuk bersama-sama masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan atau mengawasi jalannya pembangunan dan pemerintahan. Mitra OPD berupa forum warga ataupun forum-forum terkait akan memberikan dukungan yang positif dimulai ketika penyusunan perencanaan program kegiatan itu sendiri. Lebih dari separuh OPD telah memiliki mitra kerja, sedangkan sebagian lainnya optimis mampu tercapai pada tahun-tahun mendatang hingga tahun 2021.

Berdasarkan data yang diolah, jumlah OPD yang mempunyai mitra pada tahun 2019 sebanyak **19 OPD**. Apabila di prosentasekan maka PD yang bermitra dengan Forum Warga sebesar **65.52%** (jumlah OPD yang ada di Kota Magelang sebanyak 29 OPD). Realisasi indikator ini belum sesuai dengan target yang direncanakan pada tahun 2019 yaitu sebesar **75,86%**. Dengan kata lain, indikator ini belum mencapai target yang telah ditetapkan di awal perencanaan tahun 2019 sehingga capaian kinerjanya sebesar 86.37%. Realisasi indikator ini pada tahun 2018 sebesar 65,58%, yaitu ada 19 OPD. Adapun capaian pada tahun 2017 jumlah OPD yang mempunyai mitra sebanyak 17 OPD. Apabila diprosentasekan maka PD yang bermitra dengan

Forum Warga sebesar 58.62% .Realisasi indikator ini sudah sesuai dengan target yang di rencanakan pada tahun 2017 yaitu sebesar 58.62%

Apabila di bandingkan dengan capaian pada tahun 2016 dan 2015, maka capaian dari indikator ini menunjukkan *trend* yang positif walaupun pada tahun 2019 ini mengalami kenaikan. Cakupan Perangkat Daerah yang Mempunyai Mitra dengan Forum Warga pada tahun 2015 tercapai 44,83% kemudian naik menjadi 55,17% dari target 2016 sebesar 51,72%. Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan ini dimaksudkan agar bagaimana pemerintah dapat dan mampu mendorong dan memberdayakan masyarakat agar saling membantu sehingga masyarakat, kelompok masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam membangun semakin nampak eksistensinya.

Capaian sasaran tersebut dapat terealisasi dengan keberhasilan strategi Peningkatan partisipasi masyarakat dan demokratisasi pembangunan berbasis teknologi informasi yang melibatkan dua arah kebijakan yaitu:

1. Meningkatkan peran serta pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan melibatkan beberapa program.
2. Meningkatkan media dan saluran bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, dimana program yang dominan adalah Program perencanaan Pembangunan Daerah.

Tabel di bawah ini merupakan tabel forum – forum warga yang bermitra dengan OPD – OPD yang ada di Kota Magelang sebagai berikut :

Tabel 3.4 Mitra Kerja Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Magelang

NO	OPD	MITRA KERJA
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Dewan Kesenian Kota
2	Dinas Kesehatan	Kader Posyandu
3	Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang	IDI
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Gapeksi
5	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	KOTAKU, IUWASH, PDAM
6	Satuan Polisi Pamong Praja	
7	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat	FKUB, FPBI, FKDM
8	Dinas Sosial	Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat Taruna Tanggap Bencana (Tagana), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

NO	OPD	MITRA KERJA
		(TKSK), Petugas Sosial Masyarakat (PSM)
9	Dinas Tenaga Kerja	SPSI, Aspindo
10	Dinas Lingkungan Hidup	Masyarakat penggerak kampung organik dan bank sampah, Komunitas Kali Bersih
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Forum LPM PKK, GOW, KPAD, Obama, APSAI, Komda Lansia, LPM, KIM, LKK
13	Dinas Perhubungan	Organda dan PO2, KOPATA
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik	Kelompok Informasi Masyarakat, FK Metra, KIM, OPD (kaitannya dengan PPID), Lembaga Pemantau Penyiaran
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
16	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	Dewan Kesenian Kota, PHRI, ASITA, HPI, Pokdarwis, Paguparang, PPI, Genpi, KONI
17	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Masyarakat Pecinta Buku, Ulat Buku, Komunitas Lidah Buaya, Komunitas Tanaman Hias, Komunitas Kota Tua, Komunitas Pecinta Reptil, Komunitas Crafter, Komunitas Magic Hand Community, Komunitas Literasi Magelang, Komunitas Pangan Lokal, Komunitas Magelang Membaca
18	Dinas Pertanian Dan Pangan	Cat lover, Gapoktan, Kelompok Usaha Budidaya Tanaman Hias dan Hortikultura, Kelompok Tani (Poktan)

NO	OPD	MITRA KERJA
19	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Forum Mega Tidar, Paguyuban Pedagang Pasar, Paguyuban PKL, Koperasi, Sentra industri kecil
20	Sekretariat Daerah	
21	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
22	Kecamatan Magelang Selatan	
23	Kecamatan Magelang Tengah	
24	Kecamatan Magelang Utara	
25	Inspektorat	
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Magelang Kota Toea, LSM, GOPTI, Obama, Lansia
27	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	PHRI, Notaris/PPA
28	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	
29	Badan Penelitian Dan Pengembangan	Forum Jarlitbangrap iptek, Kampung IT, Kampung Blogger, Dewan Riset Daerah, Forum Jaringan Penelitian

Terkait dengan indikator sasaran Cakupan PD yang Mempunyai Mitra dengan Forum Warga, terdapat **beberapa kendala yang perlu diantisipasi ke depan antara lain:**

1. Belum optimalnya koordinasi antara pemerintah dengan mitra. Hal ini apabila tidak mendapat perhatian serius dari Pemerintah akan berpengaruh pada keberhasilan pembangunan yang mengharapkan adanya sinergi dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan swasta;
2. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan masih perlu dioptimalkan. Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan yang di mulai dari proses perencanaan sampai dengan proses pelaksanaan dan pengawasan
3. Masih terdapatnya patologi sosial atas keberadaan mitra, dimana persepsi bahwa keberadaan mitra atau kelompok masyarakat yang masih berorientasi mendapatkan bantuan anggaran dari pemerintah

4. Belum optimalnya saluran saluran berbasis teknologi bagi masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya. Bappeda khususnya senantiasa melakukan berbagai inovasi dengan memanfaatkan teknologi dan informasi untuk menjaring aspirasi dari masyarakat, di antaranya dengan menggunakan aplikasi *e- Musrenbang* dan *e-Aspirasi*

Solusi yang dapat dilakukan diantaranya:

1. OPD harus semakin intens menjalin hubungan dan koordinasi yang baik dengan mitra melalui forum warga.
2. Upaya sosialisasi penggunaan saluran saluran aspirasi masyarakat berbasis teknologi yang ada di Kota Magelang
3. Pemerintah perlu mendorong partisipasi masyarakat dan forum forum warga dan terus memberikan pendidikan tentang pentingnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah

Kondisi terkait dengan kemitraan di antaranya adalah belum optimalnya pemberdayaan forum warga sebagai mitra dari OPD, sehingga ke depan perlu adanya upaya untuk lebih meningkatkan peran serta warga melalui forum warga dan peningkatan pemberdayaan forum warga ini dalam pembangunan di antaranya:

- a).Peningkatan dan intensitas forum dialog perencanaan, Focus Group Discussion serta forum OPD membahas isu isu strategis pembangunan;
- b). Perlunya inovasi tiada henti baik dalam tataran inovasi perencanaan pembangunan dan inovasi yang berupa terobosan kebijakan yang berorientasi pada kecepatan dan kualitas pelayanan publik dan akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan indikator yang ada;
- c).Peningkatan akses terhadap aspirasi masyarakat lewat berbagai media;
- d). Pemberdayaan Forum Mitra OPD melalui berbagai skenario program kegiatan.

3. Sasaran Mengoptimalkan Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif, Inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Sasaran strategis mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan Daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan salah satu upaya untuk menghasilkan perencanaan yang berkualitas yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat dan daerah yang *ending*-nya adalah kesejahteraan masyarakat

Sasaran strategis ini mempunyai satu indikator kinerja yang dipergunakan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis yaitu cakupan kualitas perencanaan partisipatif. Indikator cakupan kualitas perencanaan partisipatif merupakan indikator komposit dari % usulan program kegiatan hasil Musrenbang yang diakomodir dalam Renja OPD ditambah % pokok pokok pikiran DPRD yang yang di

akomodir dalam RKPD ditambah % Usulan konsultasi publik yang diakomodir dalam renja OPD ditambah % usulan masyarakat di *E- Aspirasi* yang terakomodir dalam Renja PD dibagi 4.

Sasaran indikator ini merupakan tujuan / sasaran yang terdapat di dalam Perubahan Renstra Bappeda Kota Magelang 2016-2021 serta tertuang di dalam IKU Bappeda Kota Magelang 2017-2021. Capaian dari indikator cakupan kualitas perencanaan partisipatif sebagai berikut :

Tabel 3.5 Capaian Indikator Sasaran Mengoptimalkan Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif, Inovatif dan Berbasis Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian
Mengoptimalkan Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif, Inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	<u>Indikator cakupan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif</u>	62,50%	74,99%	119,99%
	<u>indikator kompositnya yaitu:</u>			
	Persentase usulan program kegiatan hasil Musrenbang yang diakomodir dalam Renja OPD	80%	88,71% (432/487)	110,89%
	Persentase pokok pokok pikiran DPRD yang yang di akomodir dalam RKPD	80%	84,55% (613/725)	105,69%
	Usulan konsultasi publik yang diakomodir dalam renja OPD	45%	45,24% (38/84)	100,53%
	Persentase usulan masyarakat di <i>E- Aspirasi</i> yang terakomodir dalam Renja PD	45%	81,48% (22/27)	181,07%

Berdasarkan tabel di atas capaian indikator cakupan kualitas perencanaan partisipatif menunjukkan kondisi yang baik. Dari target **62,50%** pada tahun 2019, realisasi indikator kinerjanya sebesar **74.99%**, melebihi dari target yang di rencanakan. Adapun capaian kinerja indikator ini sebesar **119,98%**. Realisasi pada tahun 2019 menunjukkan ada peningkatan walaupun hanya 0,04% di bandingkan

dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, realisasi yang dicapai adalah 74,95% dari target 57,50%.

Capaian dari indikator-indikator komposit tersebut menunjukkan semakin berkualitasnya perencanaan yang disusun, dengan adanya pelibatan dan partisipasi masyarakat yang meningkat sehingga upaya untuk mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Gambar – gambar di bawah ini merupakan dokumentasi upaya Pemerintah dalam mewujudkan perencanaan yang partisipatif sebagai berikut :



Gambar 3.14 Pelaksanaan Forum OPD dalam Penyusunan RKPD



Gambar 3.15 Pelaksanaan FGD Kawasan Kumuh



Gambar 3.16 Pelaksanaan FGD SDGs



Gambar 3.17. FGD Kemiskinan



Gambar 3.18 FGD Smart City

Salah satu indikator komposit dari cakupan kualitas perencanaan yang partisipatif yaitu jumlah usulan pada musrenbang yang disepakati. Semakin tinggi realisasi capaian indikator ini maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan persepsi masyarakat akan penyelenggaraan musrenbang, bahwasanya musrenbang bukan saja formalitas dalam penyelenggaraan perencanaan daerah. Adapun capaian realisasi untuk tahun 2019 sebesar **88,71%**, atau meningkat apabila di bandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar **76%**.



Gambar 3.19. Penyelenggaraan Musrenbang di Kecamatan Magelang Utara



Gambar 3.20. Penyelenggaraan Musrenbang di Kecamatan Magelang Tengah



Gambar 3.21. Penyelenggaraan Musrenbang di Kecamatan Magelang Selatan

Salah satu upaya Pemerintah Kota Magelang dengan memanfaatkan teknologi dan informasi adalah terkait dengan e-musrenbang, e-pokir dan e-monev. Integrasi system ini merupakan pengembangan dari dalam SIPPD (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah). Pengembangan SIPPD ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan karena akses untuk menyalurkan aspirasi dan masukan dalam perencanaan pembangunan semakin terbuka lebar.

Pengembangan aplikasi SIPPD terus dilakukan untuk menyempurnaan dan dalam memberikan manfaat yang lebih. Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi data usulan Musrenbang maka Bappeda Kota Magelang mengembangkan aplikasi *e - Musrenbang* yang di kembangkan dari SIPPD. *E-Musrenbang* ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan alur ketertelusuran (*track back*) sehingga tetap mampu menjaga makna Musrenbang di mata masyarakat.

Hasil Musrenbang Untuk OPD Dinas Lingkungan Hidup

Menampilkan 1-20 dari 146 item.

#	Kelurahan/Kecamatan	Kegiatan	Lokasi
1	Kelurahan Tidar Selatan	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	12 RW
2	Kelurahan Tidar Selatan	Pelatihan daur ulang sampah an organik	12 RW
3	Kelurahan Tidar Selatan	Penyediaan penerangan jalan umum	RW, III 10 titik dan RW. XII 2 titik
4	Kelurahan Magelang	Pemasangan Instalasi Jaringan PJU	RW I, II, IV, V Kelurahan Magelang
5	Kelurahan Magelang	Pengadaan Gerobag Sampah	RW I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII Kelurahan
6	Kelurahan Tidar Utara	Penyediaan sarana dan prasarana (bantuan pot bunga dan sarana bermain anak di taman RW	RW.III
7	Kelurahan Tidar Utara	Pengadaan sarana dan prasarana (bak sampah)	RW. VI
8	Kelurahan Tidar Utara	Penyediaan sarana dan prasarana pemilah persampahan	RW. VI

Gambar 3.22 Screenshot aplikasi e-Musrenbang di dalam SIPPD Kota Magelang

Indikator komposit yang lain dari cakupan kualitas perencanaan yang partisipatif yaitu prosentase pokok – pokok pikiran DPRD yang diakomodir dalam RKPD. Capaian dari indikator ini menunjukkan *progress* yang positif apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian Realisasi pada tahun 2018 sebesar 75.14% dari target yang ditetapkan pada tahun 2018 sebesar 70% sementara capaian pada tahun 2017 sebesar 70.22%. Capaian pada tahun 2018 diperoleh dari 362 pokok pikiran DPRD, sejumlah 272 pokok pikiran yang diakomodir di dalam RKPD. Sedangkan pada tahun 2019, capaian dari 725 pokok pikiran dan yang terakomodir di dalam dokumen RKPD sebanyak 613 pokok pikiran atau sebesar 84,55%.

Untuk memudahkan dan meningkat proses akomodasi pokok-pokok pikiran di dalam RKPD, Bappeda mengembangkan *e-pokir*. Aplikasi ini diharapkan mampu menjamin konsistensi dan meningkatkan ketelusuran usulan dan akomodasinya di dalam dokumen perencanaan

#	Nama Dewan	OPD	Usulan, Bappeda, OPD	Lokasi	Volume	Pagu	Flag
1	ARIE PURNOMO SIDI, S.Sos. DEMOKRAT	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata	Adanya pusat informasi (center on line) tentang tempat wisata dan profilnya di wilayah Magelang dan sekitarnya. Bekerja agenda rutin kegiatan seni budaya di Magelang selama satu tahun.	Kantor Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata		0	Importasi
2	ARIE PURNOMO SIDI, S.Sos. DEMOKRAT	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pengadaan Pusat Informasi Bisnis (PIB) / showroom untuk Usaha Mikro Kecil Menengah di Magelang Tengah / Tengah Kota	Kelurahan Cacaban		0	Importasi
	MUH HARJADI, S.H.	Dinas	Mohon dipasang	Jurangombo Selatan		0	Importasi

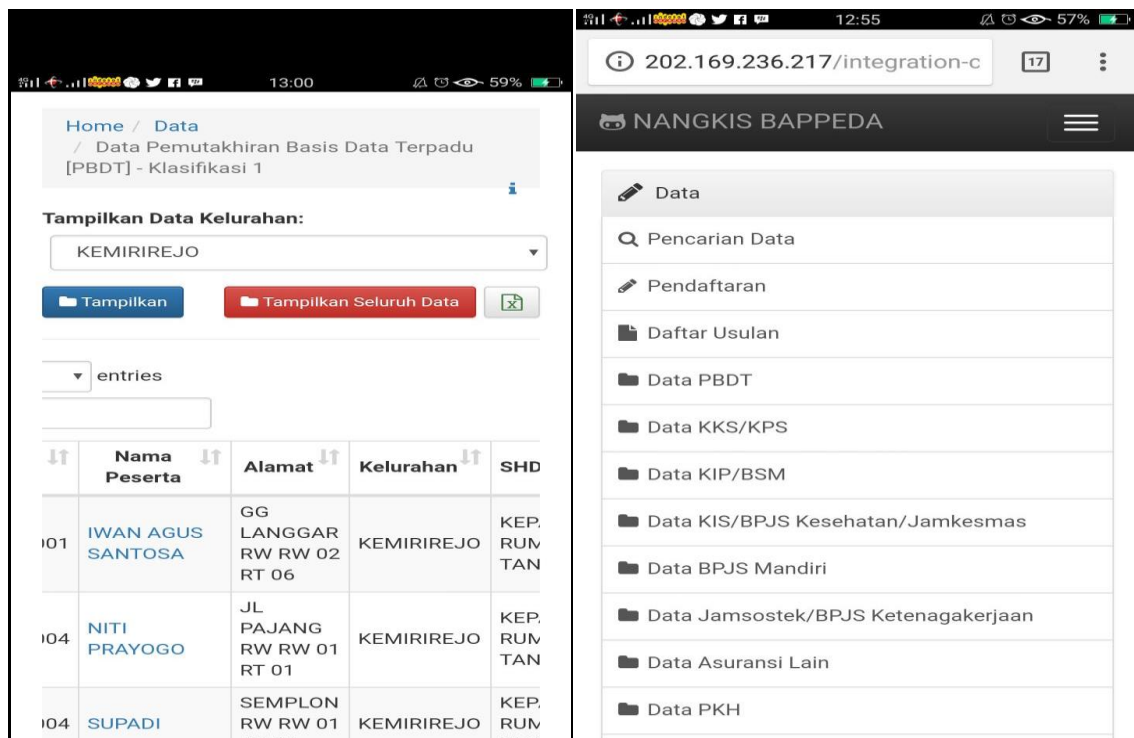
Untuk input usulan pokok pikiran DPRD khususnya lokasi mohon agar diupayakan untuk lebih spesifik lokusnya sampai dengan RT/RW atau jika memungkinkan ada kontak personnya untuk memudahkan saat verifikasi lapangan. Terima kasih

Gambar 3.23 Screenshot aplikasi e-Pokir di dalam SIPPD Kota Magelang

Beberapa waktu yang lalu Bappeda juga mengembangkan Sistem Informasi terkait dengan data kemiskinan yang mempergunakan Sistem Informasi Daerah Penanggulangan Kemiskinan (SIM Nangkis Kota Magelang). Simda Penanggulangan Kemiskinan ini akan menyajikan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT), yang di dalamnya dapat di akses data masyarakat miskin *by name by address* yang ada di Kota Magelang. Data ini menjadi penting karena akan dipergunakan sebagai basic data dalam pengambilan kebijakan di bidang penanggulangan kemiskinan maupun sebagai data dalam pemberian beberapa program bantuan baik dari Pemerintah daerah maupun dari Pemerintah Pusat.



Gambar 3.24 Screenshot SIM Penanggulangan Kemiskinan Kota Magelang



Gambar 3.25 ScreenShoot tampilan SIM Penanggulangan Kemiskinan Kota Magelang

Indikator komposit yang ketiga dari cakupan kualitas perencanaan yang partisipatif yaitu prosentase usulan konsultasi publik yang diakomodir di dalam Renja OPD. Capaian dari indikator ini menurun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian Realisasi pada tahun 2018 sebesar **68.66%** dari target yang ditetapkan pada tahun 2018 sebesar **70%** sementara capaian pada tahun 2017 sebesar 67.31%. Capaian pada tahun 2018 di peroleh dari **67 jumlah usulan** konsultasi publik, sejumlah **46 usulan** konsultasi publik yang di akomodir di dalam Renja OPD. Adapun pada tahun 2019, capaian realisasi hanya sebesar 45,24% yang diperoleh dari 84 usulan konsultasi publik dan hanya 38 yang di akomodir di dalam dokumen RKPD.



Gambar 3.26 Screenshoot Sistem Informasi Perencanaan

Indikator komposit yang keempat dari cakupan kualitas perencanaan yang partisipatif yaitu prosentase usulan masyarakat di dalam *E-Aspirasi* yang di akomodir di dalam Renja OPD. Capaian realisasi pada tahun 2018 sebesar 80% dari target yang di tetapkan pada tahun 2018 sebesar 20%. Capaian realisasi pada tahun 2019 ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Capaian realisasi sebesar 81,48% dari target yang ditetapkan sebesar 45%. Optimalisasi *E-Aspirasi* pada website Bappeda di latar belakang perlunya meningkatkan akses usulan bagi masyarakat secara online via website sehingga mempunyai dampak positif pada meningkatnya rentang cakup usulan secara dunia maya.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran di atas adalah melalui peningkatan kualitas pelayanan berbasis data dan informasi yang cepat, tepat dan akurat memenuhi SPM (Standar Pelayanan Minimal) melalui aplikasi teknologi informasi. Sedangkan kebijakan umum yang diusung adalah Perluasan inovasi proses perencanaan pembangunan daerah. Keberhasilan capaian baik sasaran dan program, selain intensitas *core business* yang dilakukan juga merupakan hasil dari berbagai inovasi proses perencanaan sebagaimana berikut :

Tabel 3.6 Inovasi Proses Perencanaan

No.	Inovasi	Latar Belakang Inovasi	Nilai Tambah / Dampak Positif
1.	Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Renja dan Renstra yang masih belum terintegrasi dan belum mengalir	Mampu meningkatkan kinerja penyusun dokumen perencanaan dari aspek waktu, ketertelusuran , kehandalan prosesnya
2.	E-Musrenbang	Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi data usulan Musrenbang	Meningkatkan transparansi dan alur ketertelusuran (<i>track back</i>) sehingga tetap mampu menjaga makna Musrenbang di masyarakat
3.	Optimalisasi E_Aspiration pada website Bappeda	Perlunya meningkatkan akses usulan bagi masyarakat secara online via website	Mampu meningkatkan rentang cakup usulan secara dunia maya,
4.	Peningkatan kapasitas Kasubbag program di OPD terkait dengan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui workshop dan sosialisasi	Perlunya pemahaman yang lebih baik terhadap aspek perencanaan pembangunan pada level Kasubbag Program di seluruh OPD	Peningkatan skill pada <i>core business</i> perencanaan di setiap OPD
5.	Implementasi Analisis Standar Belanja (ASB) dalam Penyusunan Rancangan Renja OPD	Harus ada upaya agar terdapat standar belanja pada anggaran berbasis kinerja secara lebih ilmiah	Peningkatan kualitas pada substansi matriks rancangan Renja OPD

No.	Inovasi	Latar Belakang Inovasi	Nilai Tambah / Dampak Positif
6.	Implementasi Satuan Harga dan Belanja Daerah pada SIPPD dan <i>e-budgetting</i>	Kesulitan update dan inefisiensi waktu input	Peningkatan efisiensi input dan kemudahan kontrol atas penyusunan RKA
7.	Sarasehan perencanaan pembangunan di setiap kecamatan pada bulan Desember Tahun n-1 perencanaan tentang Tema dan Arah Kebijakan Pembangunan 2019	Secara lebih dini masyarakat diberikan pemahaman atas arah kebijakan pembangunan Tahun Rencana	Peningkatan kesadaran masyarakat peran masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan dengan indikator peningkatan partisipasi masyarakat dan akomodasi usulan musrenbang
8.	Formulir Batasan dan Kriteria Usulan Musrenbang	Tidak terkendalinya usulan Musrenbang yang diluar jalur tema pembangunan tahun rencana, sehingga menghasilkan <i>planning scrap</i> pada saat Musrenbang	Filter atas usulan yang semakin berkualitas mengarah pada tema tahun rencana dan makin meningkatnya akomodasi atas usulan Musrenbang
9.	Integrasi Sistem Perencanaan dengan Penganggaran (SIPPD-SIMDA)	Inefisiensi atas implementasi sistem dalam hal waktu input atas fungsi perencanaan dan penganggaran	Tidak terjadi duplikasi atas input yang sama dalam penyusunan Renja OPD pada sistem SIPPD (Program, kegiatan, indikator) dan SIMDA
10.	Integrasi dan pemanfaatan Dokumen Pemetaan Potensi, Permasalahan dan Isu Strategis Kelurahan dalam Pengusulan Musrenbang (secara lebih lanjut dikembangkan sebagai dokumen Rencana Penataan Lingkungan Pemukiman/RPLP)	Masih tumpang tindihnya pengusulan Musrenbang sehingga tidak tepat sasaran	Peningkatan ketepatan sasaran usulan dengan mendasarkan pada dokumen yang disusun secara ilmiah dan melibatkan partisipasi Masyarakat.
11.	Focus Group Discussion	Perlunya penajaman atas isu strategis dan tema pembangunan	Makin efektifnya program kegiatan yang memiliki daya ungkit /leverage atas solusi isu strategis dan permasalahan pembangunan
12.	Segmentasi Konsultasi Publik RanWal RKPD (Umum, Anak sekolah dan Lansia, difabel)	Upaya meningkatkan masukan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjangkau hingga segmen spesifik	Makin berkualitasnya perencanaan pembangunan dengan akomodasi usulan dan suara masyarakat yang lebih luas
13	Implementasi e Pokir	Pokok pikiran DPRD masih belum konsisten dengan perencanaan	Menjamin konsistensi dan meningkatkan ketertelusuran usulan dan akomodasinya

Perlunya inovasi tiada henti baik dalam tataran inovasi perencanaan pembangunan dan inovasi yang berupa terobosan kebijakan yang *out of the box* yang berorientasi pada kecepatan dan kualitas pelayanan publik dan akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan indikator yang ada.

4. Sasaran Mewujudkan Konsistensi Perencanaan Jangka Menengah dengan Perencanaan Tahunan

Undang – undang Perencanaan nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana - rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Salah satu amanah dan tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Menilik dari hal tersebut di atas, sasaran “mewujudkan Konsistensi Perencanaan Jangka Menengah dengan Perencanaan Tahunan merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Magelang untuk mewujudkan kesinambungan dan integrasi perencanaan Jangka Menengah dan Perencanaan Tahunan”.

Indikator yang merepresentasikan sasaran ini adalah Cakupan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Indikator kinerja ini di pergunakan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis serta merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Magelang untuk mewujudkan kesinambungan dan integrasi perencanaan Jangka Menengah dan Perencanaan Tahunan.

Dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran, konsistensi dan integrasi perencanaan jangka pendek dan jangka menengah menjadi penting dan mutlak di lakukan karena apabila tidak maka pencapaian dari visi, misi, tujuan dan sasaran menjadi tidak optimal sebagaimana yang di targetkan pada awal tahun perencanaan.

Pencapaian dari indikator Cakupan Konsistensi Perencanaan Jangka Menengah dengan Perencanaan Tahunan merupakan indikator komposit dari prosentase tingkat keselarasan Renstra PD dengan Renja PD ditambah prosentase tingkat keselarasan RPJMD dengan Renstra PD di tambah Prosentase tingkat keselarasan RPJMD dengan RKPD kemudian dibagi 3 (tiga). Indikator komposit ini diharapkan mampu merepresentasikan adanya integrasi dan konsistensi penyusunan perencanaan tahunan dengan perencanaan jangka menengah, baik di tingkat OPD ataupun OPD dengan perencanaan Pemerintah Kota.

Sasaran indikator ini merupakan tujuan / sasaran yang terdapat di dalam Perubahan Renstra Bappeda Kota Magelang 2016-2021 serta tertuang di dalam IKU Bappeda Kota Magelang 2017-2021. Capaian dari indikator cakupan kualitas perencanaan partisipatif sebagai berikut :

Tabel 3.7 Capaian Indikator Sasaran Mewujudkan Cakupan Konsistensi Perencanaan Jangka Menengah dengan Perencanaan Tahunan 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian
Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	<u>Indikator cakupan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan dengan indikator kompositnya yaitu:</u>			
	Persentase tingkat keselarasan Renstra PD dengan Renja PD	100%	100% (213/213 x 100%)	100 %
	Persentase tingkat keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	100%	100% (213/213 x 100%)	100 %
	Persentase tingkat keselarasan RPJMD dengan RKPD	100%	100% (213/213 x 100%)	100 %
	Capaian Indikator Konsistensi Perencanaan Jangka Menengah dengan Perencanaan Tahunan	100%	100%	100%

5. Sasaran Mewujudkan Dokumen Perencanaan dan Implementasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Bidang Fisik Prasarana dan Bidang Sosial Budaya yang Berkualitas

Perencanaan Pembangunan yang di susun dalam tiap tahun perencanaan mempunyai output kinerja berupa dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan yang baik merupakan dokumen perencanaan yang sesuai dan menjawab isu dan permasalahan yang ada dalam pembangunan. Dokumen perencanaan yang baik selain berupa dokumen perencanaan yang berkualitas juga merupakan dokumen yang dapat di implementasikan oleh OPD teknis serta menjadi *guide* dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan OPD dalam pencapaian tujuan dan sasaran daerah serta dalam menanggulangi permasalahan yang ada

Menilik dari hal tersebut di atas, sasaran “Mewujudkan Dokumen Perencanaan dan Implementasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Bidang Fisik Prasarana dan Bidang Sosial Budaya yang Berkualitas” merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Magelang untuk mewujudkan kualitas dari perencanaan pembangunan daerah.

Indikator yang merepresentasikan sasaran ini adalah Cakupan Ketersediaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasarana dan bidang sosial budaya yang berkualitas. Indikator kinerja ini di gunakan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis tersebut. Pencapaian dari indikator ini merupakan indikator komposit dari prosentase implementasi perencanaan bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana di tambah prosentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana dibagi 2 (dua).

Sasaran indikator ini merupakan tujuan/sasaran yang terdapat di dalam Perubahan Renstra Bappeda Kota Magelang 2016-2021 serta tertuang di dalam IKU Bappeda Kota Magelang 2017-2021. Capaian dari indikator cakupan kualitas perencanaan partisipatif sebagai berikut :

Tabel 3.8 Capaian Indikator Ketersediaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasarana dan bidang sosial budaya yang berkualitas Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian
Mewujudkan Dokumen Perencanaan dan Implementasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Bidang Fisik Prasarana dan Bidang Sosial Budaya yg Berkualitas	Rasio ketersediaan dokumen perencanaan bidang ekonomi	75%	74.36% (29/39 x 100%)	99.15%
	Tingkat implementasi perencanaan bidang ekonomi	75%	74.36% (29/39 x 100%)	99.15%
	Rasio ketersediaan dokumen perencanaan bidang fisik prasarana	75%	66.67% (30/45 x 100%)	88.89 %
	Tingkat implementasi perencanaan bidang fisik prasarana	75%	66.67% (30/45 x 100%)	88.89 %
	Rasio ketersediaan dokumen perencanaan bidang sosial budaya	75%	89.36% (42/47x 100%)	119.15 %

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian
	Tingkat implementasi perencanaan bidang sosial budaya	75%	89.36% (42/47 x 100%)	119.15 %
	Capaian Indikator Ketersediaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasarana dan bidang sosial budaya yang berkualitas	75%	76.80%	102.40

Salah satu komitmen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai salah satu OPD yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan pembangunan adalah menghasilkan dokumen perencanaan yang implikatif dan dapat dipergunakan OPD teknis sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian visi misi kepala daerah dan menjawab isu/permasalahan yang dihadapi daerah. Capaian tahun 2019 untuk indikator Ketersediaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasarana dan bidang sosial budaya yang berkualitas melebihi target yang di rencanakan. Pada tahun **2019** direncanakan target kinerja sebesar **75%** adapun capaian realisasinya sebesar **76.80%** sehingga capaian kinerja dari indikator tersebut sebenar **102.40%**.

Untuk mengetahui perbandingan antara capaian indikator kinerja pada tahun 2019 dengan tahun sebelumnya, tabel di bawah ini memberikan gambaran perbandingan tersebut :

Tabel 3.9 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2016-2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun			
			2016	2017	2018	2019
1	Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel	a. Persentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja	89%	90.41%	74.69%	72,29%
		b. Persentase Publikasi data dan statistik sektoral yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	93.5%	94.75%	80%	99,71%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun			
			2016	2017	2018	2019
2	Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	a. Prosentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	56%	70.19%	71.51%	81,48%
		b. Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	55.17%	58.62%	65.52%	65.52%
3	Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Cakupan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif	na	58.17%	74.95%	74.99%
4	Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	Cakupan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	na	100%	100%	100%
5	Mewujudkan dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasana dan bidang sosial budaya yang berkualitas	Cakupan ketersediaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasana dan bidang sosial budaya yang berkualitas	na	73.44%	76.80%	76,80%

Berdasarkan capaian kinerja pada tabel di atas dapat kita lihat bahwa di beberapa indikator capaian kinerja pada tahun 2019 melebihi target yang ditargetkan pada tahun 2019 dan apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun tahun sebelumnya terdapat beberapa indikator yang mengalami progress positif apabila di bandingkan dengan tahun sebelumnya.

Capaian sasaran tersebut dapat terealisasi dengan keberhasilan strategi Peningkatan partisipasi masyarakat dan demokratisasi pembangunan berbasis teknologi informasi yang melibatkan **dua arah kebijakan** yaitu:

1. Meningkatkan media dan saluran bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, dimana program yang dominan adalah Program perencanaan Pembangunan Daerah
2. Meningkatkan peran serta pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan melibatkan beberapa program.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran di atas adalah :

1. Peningkatan kualitas pelayanan berbasis data dan informasi yang cepat, tepat dan akurat memenuhi SPM (Standar pelayanan Minimal) melalui aplikasi teknologi informasi
2. Kebijakan umum yang diusung adalah Perluasan inovasi proses perencanaan pembangunan daerah

Sementara itu untuk pencapaian sasaran-sasaran tersebut di atas pada tingkat program dilakukan melalui beberapa program antara lain :

Tabel 3.10 Indikator Program Yang Memberikan Kontribusi Terhadap Capaian Sasaran dalam Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2019

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2019	Realisasi 2019	Kinerja RKPD Th.2019
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100%	100%	100%	100%
		Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir	90 %	75%	84,55%	105.69%
		Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir	85 %	75%	88,71%	111%
		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik	55 %	40%	45,24%	101%
		Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	85%	76%	81,48%	102%
2	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi	100%	100 %	100 %	100%
3	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang sosial budaya	100%	100%	100%	100%
4	Program Perencanaan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan	100%	100%	100%	100%

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2019	Realisasi 2019	Kinerja RKPD Th.2019
	Pembangunan Bidang Fisik Prasarana	sesuai urgensi permasalahan bidang fisik prasarana				
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD	a. Rasio aparatur perencanaan berdasarkan belakang pendidikan : S1 S2	31% 55%	37% 50%	42% 45%	115% 91%
		b. Rasio aparatur perencanaan yang mengikuti pelatihan perencanaan dan penganggaran	95%	90%	100%	111%
		c. Cakupan seminar/ workshop / pelatihan yang diselenggarakan Bappeda	100%	98%	100%	102%
		d. cakupan peningkatan kapasitas aparatur perencanaan OPD	100%	100%	100%	100%

Sumber: Monev Renaksi Triwulan 4 Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang

1. **Program perencanaan pembangunan daerah.**

Keberhasilan program ini dapat dilihat dari lima indikator yaitu : a).Tingkat konsistensi Penjabaran program RPJMD ke RKPD; b). Persentase Pokok Pikiran DPRD yang diakomodir; c). Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir; d). Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir; e) Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik

Upaya yang dilakukan antara lain melalui Musrenbang, Konsultasi Publik ,*Focus Group Discussion*, serta melalui *E-Aspiration* dan *E-Musrenbang*, *E-Pokir* dan *E-Monev* sebagai inovasi proses perencanaan.

Keberhasilan dari program ini di tentukan oleh keberhasilan dari indikator dari program ini ada 5 (lima) yaitu sebagai berikut :

- a. Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD

Indikator ini menggambarkan konsistensi antara jumlah program yang terakomodir ke dalam RKPD. Dari total 213 program dalam RPJMD 2016-2021 keseluruhannya telah masuk ke dalam RKPD dengan kata lain dari target 100% tercapai 100 %. Ke depan kinerja ini agar dapat di pertahankan dengan baik.

b. Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir

Sebagaimana amanat Permendagri 86 Tahun 2017, pokok pikiran Dewan wajib dihadirkan sebagai bagian dari proses politik penyusunan RKPD. Dokumen ini akan diselaraskan ke dalam Rancangan RKPD hingga penetapannya. Dengan substansi yang memberikan ruang bagi Dewan untuk menjaring aspirasi masyarakat, maka akomodasi atas pokok pikiran dewan menjadi bersifat mengikat, tentu saja setelah dilakukan penelaahan atau verifikasi oleh OPD. Pada Tahun 2019 target akomodasi pokok pikiran dewan adalah **80%** dan terakomodir sejumlah **84,55%**. Dengan realisasi kinerja 2019 tersebut maka capaian dari indikator kinerja sebesar **105,69%**. Adapun capaian ini di peroleh dari perhitungan total pokok pikiran sebanyak **725 pokok pikiran, 613 diakomodir** setelah di telaah dan diverifikasi.

c. Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir

Dengan definisi operasional Jumlah Kesepakatan Musrenbang yang diakomodir di dalam renja/Jumlah Kesepakatan, indikator ini pada tahun 2019 tercapai **88,71%** dari target pada tahun tersebut sebesar **80%**, artinya tingkat capaian indikator kinerja persentase BA Musrenbang yang terakomodir adalah **110,88%**. Prosentase tersebut di peroleh dari **487 jumlah usulan musrenbang yang di sepakati** terdapat sebanyak **432 usulan Kesepakatan Musrenbang** yang **diakomodir di dalam renja**

d. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik

Sebagai media menjaring aspirasi masyarakat, peran konsultasi publik menjadi sangat strategis, terutama dalam menyempurnakan rancangan RKPD Kota Magelang Tahun 2019. Dari 3 segmen yaitu segmen kelompok Umum, segmen Lansia dan segmen Anak sekolah, konsultasi public ini menghasilkan banyak sekali usulan yang layak dan sesuai dengan tema perencanaan sehingga mewarnai renja OPD yang terlibat. Capaian tahun 2019 Dari target sebesar **40%** dapat tercapai **45,24%** atau kinerja mencapai **113,10%**. Capaian ini diperoleh dari perhitungan jumlah usulan pada saat konsultasi publik yang di akomodir sebanyak **38 usulan** di bagi dengan jumlah usulan pada saat konsultasi publik sebanyak **84 usulan**.

e. Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir

Indikator ini diformulasikan dengan Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir APBD/Jumlah usulan masyarakat. Pada tahun **2019** usulan masyarakat yang terakomodir sekitar **81,48%** dari target sebanyak **80%** sehingga capaian dari indikator tersebut sebesar **102%**. Perhitungan ini diperoleh dari jumlah usulan/ aspirasi masyarakat melalui *E-aspirasi* yang diakomodir sebanyak **22 usulan** dibandingkan dengan **27 usulan** masyarakat dalam *E-aspirasi*. Apabila dilihat dari partisipasi masyarakat di dalam proses perencanaan menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini cukup menggembirakan mengingat bahwa penting bagi masyarakat terkait sumbang saran aspirasinya diakomodir untuk meningkatkan trust masyarakat terhadap pemerintah.

Pada program ini ada kegiatan baru, yaitu Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD). Kegiatan ini merupakan kegiatan dengan sumber dana yang berasal dari DAU dan Bantuan Keuangan Propinsi. Kegiatan SPPD ini merupakan gabungan dari beberapa kegiatan yaitu Kegiatan Fasilitasi Fedep, Kegiatan Penyusunan Profil Daerah, Kegiatan Penyusunan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), Kegiatan Monitoring SDg'S, dan Kegiatan Penghargaan Abhipraya. Kegiatan yang tergabung di dalam Kegiatan SPPD ini sebelumnya masuk ke dalam beberapa program, yaitu Program Pengembangan Data/Informasi, Program Fasilitasi Kerjasama Daerah dan Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya. Mengingat bahwa beberapa program tersebut hanya terdiri dari 1 (satu) kegiatan yang telah tergabung dan kegiatan SPPD, maka beberapa program tersebut hilang, yaitu Program Fasilitasi Kerjasama Daerah dan Program Pengembangan Data/Informasi.

2. Program peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur OPD.

Keberhasilan program ini dapat dilihat dari indikator cakupan pegawai yang mendapat penguatan kapasitas perencanaan. Upaya yang dilakukan antara lain Workshop Perencanaan Pembangunan Daerah dengan menghadirkan Tenaga Ahli dan Narasumber dengan sasaran para Kasubbag Program, Pejabat Eselon III dan II maupun Personil Bappeda sendiri.

Indikator dari program ini ada 3 indikator sebagai berikut :

- *Rasio aparatur perencanaan dengan latar belakang pendidikan*

Pada tahun 2019 capaian indikator aparatur perencanaan dengan latar belakang pendidikan untuk S1 tidak mencapai target yang ditentukan . Dari target **37%** telah mampu terealisasi sebesar **36,36%** dengan jumlah pegawai dengan pendidikan S1

sebanyak **12** dari total jumlah pegawai sebanyak **34** pegawai. Tidak tercapainya target ini dikarenakan pada tahun 2019 belum ada penambahan pegawai dengan tingkat pendidikan S1 baik yang berasal dari mutasi staff maupun dari staff internal dengan pendidikan dibawah Sarjana.

Namun demikian untuk segmen S2 mengalami peningkatan. Capaian indikator jumlah pegawai dengan pendidikan **S2** pada tahun **2019** mencapai **51,52%** dari target **50%**.

- *Rasio aparatur perencanaan yang mengikuti pelatihan perencanaan dan penganggaran*

Pada tahun 2019 sejumlah **37** orang dari **37** personil Bappeda mengikuti pelatihan ini. Artinya **target** sebesar **90%** telah tercapai sebanyak **100.00%** rasio pegawai yang mengikuti pelatihan ini. Beberapa pegawai tidak dapat mengikuti karena ada yang sedang cuti maupun sedang tugas belajar. Peningkatan kapasitas pegawai Bappeda tidak hanya terbatas pada karyawan yang diikuti pada pelatihan Perencanaan yang di laksanakan oleh Bappeda tapi melalui anggaran Bappeda atau anggaran dari Badan Kepegawaian kita mengirimkan personil untuk mengikuti berbagai pelatihan, diklat maupun bintek untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan personil perencanaan

- *Cakupan seminar/ workshop / pelatihan yang diselenggarakan Bappeda*

Pelaksanaan workshop Bappeda pada tahun 2019 sebesar 100% dapat dilaksanakan melebihi dengan target yang direncanakan, yaitu 98% sehingga diharapkan akan mampu mengangkat kinerja dan kemampuan aparat perencanaan bappeda untuk menopang *core business* perencanaan

- *Cakupan peningkatan kapasitas aparatur perencana OPD*

Bappeda Kota Magelang senantiasa berupaya untuk meningkatkan kapasitas, kemampuan dan kualitas stakeholder di OPD untuk mempunyai kemampuan lebih di dalam perencanaan. Dengan kualitas dan kemampuan yang baik diharapkan akan dapat memberikan kontribusi lebih pada perencanaan Kota atau OPD pada khususnya. Peningkatan kapasitas aparatur perencana di tingkat OPD tersebut di harapkan akan mampu meningkatkan kualitas dokumen- dokumen perencanaan atau kualitas perencanaan OPD sehingga nantinya ada integrasi antara perencanaan OPD dengan perencanaan Kota.

3. Program Perencanaan pembangunan bidang ekonomi.

Keberhasilan program ini dapat dilihat dari Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi. Upaya yang dilakukan adalah melalui penyusunan dokumen perencanaan yang memberi arah pengembangan sektoral bidang Ekonomi. Dokumen perencanaan yang disusun pada tahun 2019 meliputi dokumen :

- a. Dokumen Pengembangan Kebun Raya Gunung Tidar;
- b. Dokumen Perencanaan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro (KUM) Berbasis Ekonomi Lokal;
- c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Magelang Kota Sejuta Bunga

Dokumen tersebut didasarkan pada kebutuhan dan untuk menjawab permasalahan di bidang ekonomi seperti Dokumen Pengembangan Kebun Raya Gunung Tidar yang disusun dalam rangka untuk mengembangkan Gunung Tidar sebagai tempat wisata sehingga dapat menjadi daya tarik bagi Kota Magelang.

4. Program Perencanaan pembangunan bidang Sosial Budaya.

Keberhasilan program ini dapat dilihat dari Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang pemerintahan, sosial dan budaya. Upaya yang dilakukan adalah melalui penyusunan dokumen perencanaan yang memberi arah pengembangan sektoral bidang Sosial Budaya. Dokumen perencanaan yang di susun pada tahun 2019 meliputi dokumen:

- a. Laporan Penanggulangan Kemiskinan;
- b. Dokumen Masterplan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Dokumen Perencanaan Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi;
- d. Dokumen Masterplan Wisata Diponegoro.



Gambar 3.30 Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Pendidikan untuk Semua (PUS) dan Kegiatan Expose Penanggulangan Kemiskinan

5. Program Perencanaan pembangunan bidang Fisik Prasarana.

Keberhasilan program ini dapat dilihat dari cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang fisik dan prasarana wilayah. Upaya yang dilakukan adalah melalui penyusunan dokumen dokumen perencanaan yang memberi arah pengembangan sektoral bidang Fisik Prasarana. Dokumen perencanaan yang di susun pada tahun 2019 meliputi dokumen :

- a. Dokumen Visualisasi Kawasan Strategis dan Prioritas Daerah;
- b. Dokumen Monitoring Implementasi Kawasan Strategis;
- c. Dokumen Review Masterplan Kawasan GOR Samapta
- d. Dokumen Review Masterplan Kawasan Soekarno-Hatta;
- e. Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM);
- f. Dokumen Masterplan Kampung Tematik, Terpadu dan Hijau.

Sebagai perencanaan pembangunan sektoral, perencanaan pembangunan untuk meningkatkan kinerja perencanaan di segala aspek mutlak diperlukan. Keberhasilan program ini dapat dilihat dari cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi, fisik prasarana dan sosial Budaya. Upaya yang dilakukan adalah melalui penyusunan dokumen-dokumen perencanaan yang memberi arah pengembangan sektoral bidang Ekonomi prasarana dan sosial Budaya. Tahun seluruh kegiatan ini sudah dilakukan dan capaian mencapai masing masing 100%.

Beberapa permasalahan penyelenggaraan fungsi penunjang perencanaan yang dihadapi secara garis besar di antaranya:

1. Masih dijumpai kesulitan dan miskordinasi antar internal dan eksternal OPD. Beberapa persoalan yang bersifat lintas sektor, ego dan saling lempar tanggungjawab pada penanganan isu dan permasalahan masih saja terjadi.
2. Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang belum konsisten yang perlu terus dilakukan minimalisasi deviasi.
3. Masih memerlukan ruang pemahaman perencanaan di setiap level pada OPD. Menjadi tidak ideal ketika yang memahami indikator dan ukurannya hanya pada tingkat kasubbag program.
4. Proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian/telaahan, masih perlu dilakukan penguatan sehingga mampu menjadi dasar analisis kebijakan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik.
5. Tantangan pada fungsi perencanaan semakin tidak ringan, seiring kompleksitas dan tuntutan akselerasi atas kesejahteraan masyarakat dihadapkan dengan berbagai kondisi permasalahan bangsa yang semakin kompleks serta dinamika global.

Adapun solusi yang sudah dilaksanakan untuk menghadapi permasalahan – permasalahan tersebut di antaranya :

1. melakukan integrasi sistem perencanaan dan penganggaran yang mampu menopang akuntabilitas dan transparansi atas perencanaan dan penganggaran sehingga deviasi dapat terkontrol dengan baik dan konsistensi mampu terjaga secara memuaskan. Hal yang sudah dilakukan melalui implemtasi integrasi yaitu *e-planning* dan *e-bugdegting*, *e-pokkir*, *e-monev* dan *e-sakip*
2. Melaksanakan persamaan persepsi terhadap para eselon II dan jajarannya di seluruh OPD agar perencanaan dan pengawalan terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat dikendalikan secara komprehensif.
3. Terus melakukan upaya peningkatan kapasitas personil perencanaan dan penguatan data atas hasil monitoring evaluasi serta aksesibilitas data yang valid dan tepat waktu
4. Peningkatan kapasitas *core business* perencanaan dan penguatan mindset organisasi pembelajar yang tangguh dan antisipatif terhadap dinamika yang berkembang.
5. Implementasi integrasi *e-planning* dan *ebudgetting*, *e-pokir*, *e-monev* dan *e-sakip* secara utuh dan konsekuen melibatkan seluruh stakeholders pada setiap fungsi mulai perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi hingga akuntabilitas kinerjanya

6. Peningkatan dan intensitas forum dialog perencanaan, Focus Group Discussion serta forum OPD membahas isu-isu strategis pembangunan serta adanya kepastian pelimpahan kewenangan antara OPD dan kecamatan/kelurahan
7. Perluasan workshop pada seluruh level pada OPD dan pemahaman pada Kepala OPD terkait perencanaan pembangunan daerah.
8. Pemberdayaan para pejabat fungsional perencanaan Bappeda untuk melakukan roadshow pencerahan perencanaan ke OPD
9. Upaya peningkatan sistem manajemen data terpadu yang didukung oleh data OPD yang valid dan dinamis serta akuntabel
10. Perlunya inovasi tiada henti baik dalam tataran inovasi perencanaan pembangunan dan inovasi yang berupa terobosan kebijakan yang out of the box yang berorientasi pada kecepatan dan kualitas pelayanan publik dan akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan indikator yang ada. Hal ini bisa terwujud dengan implementasi skenario *Continuous Improvement* dimulai pada hal-hal kecil hingga menjadi budaya kerja berbasis perbaikan berkesinambungan

3.2 Akuntabilitas dan Realisasi Anggaran Tahun 2019

Pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang secara operasional diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

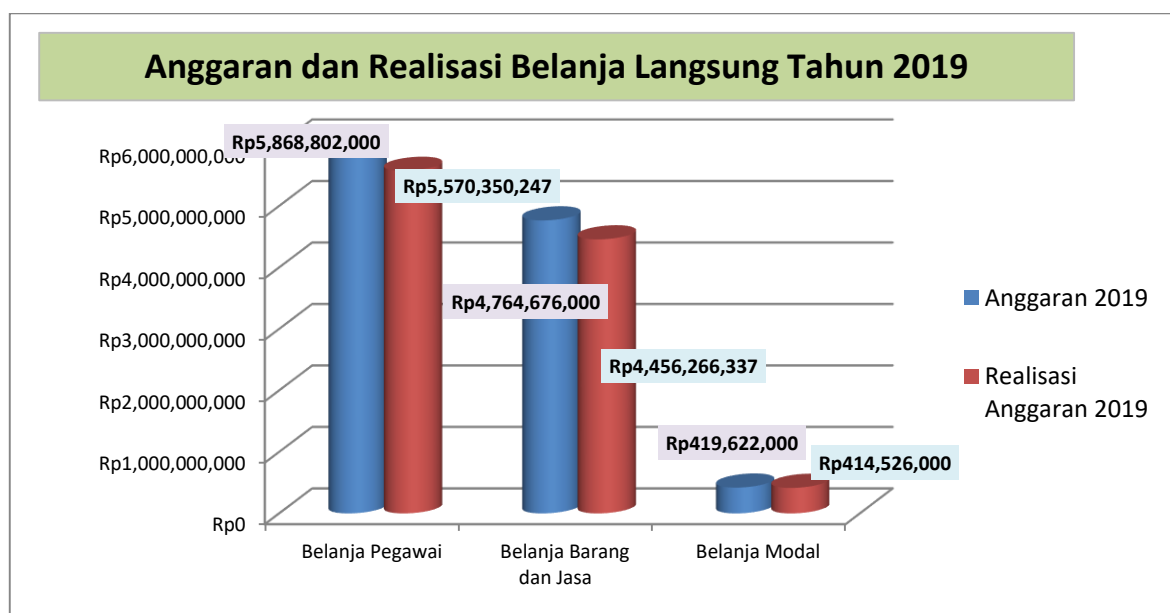
Dalam rangka pencapaian Tujuan dan sasaran strategis dari OPD pada anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang tahun 2017 untuk Urusan Penunjang Perencanaan Pembangunan dilaksanakan oleh 11 Program dan 68 Kegiatan.

Program yang masuk di dalam urusan ini selain Program-program yang masuk dalam urusan perencanaan pembangunan juga termasuk di dalamnya program pendukung /program kegiatan yang ada dan dilaksanakan di tiap OPD (seperti Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan sarana dan prasarana kantor dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan). Tabel di bawah ini memperlihatkan realisasi anggaran pada tahun 2019, sebagai berikut :

**Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Belanja Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2019**

Belanja Daerah	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi Anggaran 2019 (Rp)	(%) serapan anggaran 2019
BELANJA DAERAH	11.053.100.000,-	10.441.142.584,-	94,46%
1, Belanja Tidak Langsung	3.529.588.000,-	3.340.395.247,-	94,64%
Belanja Pegawai	3.529.588.000,-	3.340.395.247,-	94,64%
2. Belanja Langsung	7.523.512.000,-	7.100.747.337,-	94,38%
Belanja Pegawai	2.339.214.000,-	2.229.955.000,-	95,33%
Belanja Barang dan Jasa	4.764.676.000,-	4.456.266.337,-	93,53%
Belanja Modal	419.622.000,-	414.526.000,-	98,79%
JUMLAH BELANJA	11.053.100.000,-	10.441.142.584,-	

Sumber :Laporan Akhir Tahun Bappeda, realisasi anggaran Tahun 2019, , data di olah



Gambar 3.32 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Bappeda Tahun 2019

Tabel di bawah ini memperlihatkan realisasi anggaran pada tahun 2019 yang di bandingkan dengan realisasi pada tahun 2018 dan 2017 sebagai berikut:

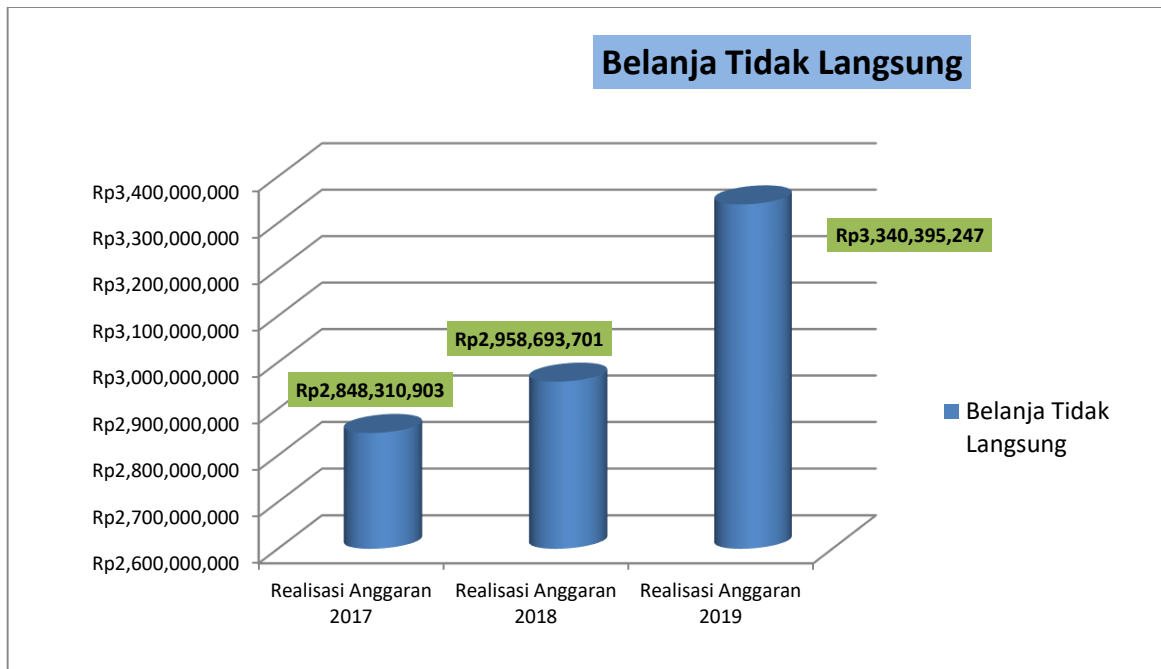
**Tabel 3.12 Realisasi Anggaran Belanja Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2019 di
bandingkan dengan Realisasi Anggaran Tahun 2018 dan 2017**

Belanja Daerah	Realisasi Anggaran 2017(Rp)	Realisasi Anggaran 2018(Rp)	Realisasi Anggaran 2019 (Rp)	(%) serapan anggaran 2019
BELANJA DAERAH	9.078.142.613,-	8.874.489.033,-	10.441.142.584,-	94,46%
1, Belanja Tidak Langsung	2.848.310.903,-	2.958.693.701,-	3.340.395.247,-	94,64%
Belanja Pegawai	2.848.310.903,-	2.958.693.701,-	3.340.395.247,-	94,64%
2. Belanja Langsung	6.229.831.710,-	5.915.795.332,-	7.100.747.337,-	94,38%
Belanja Pegawai	1.739.376.000,-	1.842.115.500,-	2.229.955.000,-	95,33%
Belanja Barang dan Jasa	3.821.861.710,-	3.525.893.832,-	4.456.266.337,-	93,53%
Belanja Modal	668.594.000,-	547.786.000,-	414.526.000,-	98,79%
JUMLAH BELANJA	9.078.142.613,-	8.874.489.033,-	10.441.142.584,-	

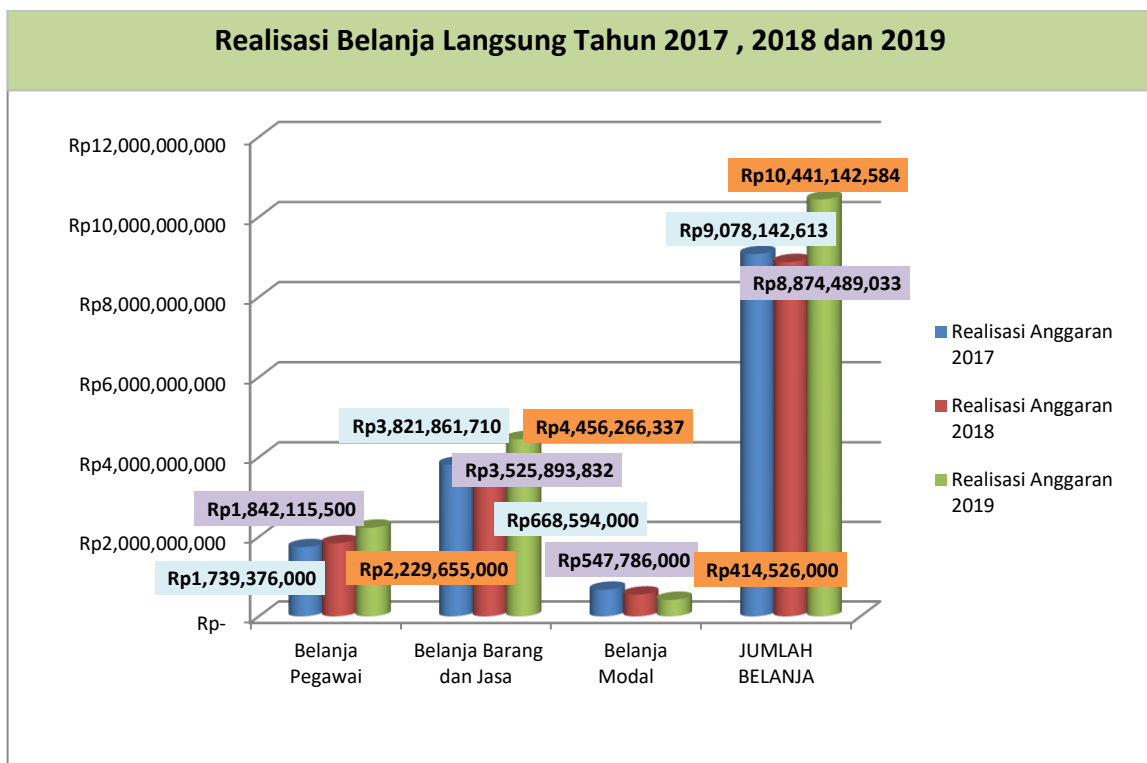
Sumber :Laporan Akhir Tahun Bappeda, realisasi anggaran Tahun 2019, 2018 dan Tahun 2017, data di olah

Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang pada tahun **2019** sebesar **Rp.11.053.100.000,-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp.10.441.142.584,-** atau sebesar **94.46%**. Capaian ini lebih baik apabila di bandingkan dengan realisasi pada tahun 2018 yang sebesar Rp.8.874489.033,-atau sebesar 94.16%. Adapun realisasi tahun 2017 yang sebesar Rp.9.078.142.613,-atau sebesar 89.17%. Realisasi anggaran pada tahun 2019 merupakan realisasi anggaran yang terbaik dalam 3 tahun terakhir ini. Realisasi anggaran pada tahun 2019 menunjukkan *trend* yang meningkat di semua rekening belanja baik itu belanja tidak langsung ataupun di rekening belanja langsung yang terdiri dari 3 komponen belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa maupun belanja Modal. Realisasi belanja di semua komponen Belanja Langsung maupun belanja tidak langsung, semuanya di atas 90%

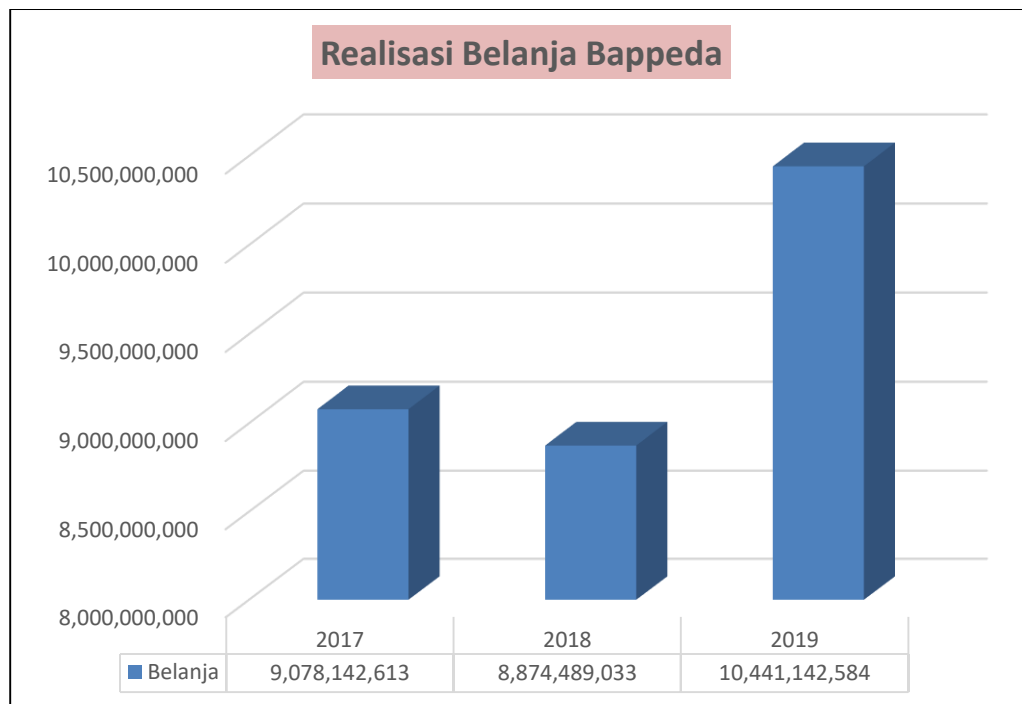
Capaian Output (fisik) kegiatan secara keseluruhan terhadap program dan kegiatan yang di laksanakan tahun anggaran 2019 sebesar 99.53%.



Gambar 3.33 Realisasi Belanja Tidak Langsung Bappeda Tahun 2017, 2018 dan 2019



Gambar 3.34 Realisasi Belanja Langsung Bappeda Tahun 2017, 2018 dan 2019



**Gambar 3.35 Realisasi Serapan Anggaran Tahun 2017, 2018 dan 2019
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang**



**Gambar 3.36 Realisasi Serapan Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak
Langsung Tahun 2017, 2018 dan 2019
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang**

Realisasi belanja tidak langsung/belanja pegawai tahun **2019** serapannya sebesar **95.81%**. Capaian ini jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan capaian

pada tahun **2017** yaitu sebesar **86.39%** dan lebih tinggi juga apabila di bandingkan dengan capaian pada tahun **2016** yang sebesar **92.25%**. Adanya SILPA untuk belanja tidak langsung sekitar 5%, di sebabkan karena Adanya *acress* yang ditambahkan pada setiap komponen gaji pegawai. Accress ini dipergunakan sebagai cadangan untuk alokasi belanja pegawai seperti kenaikan gaji, gaji berkala, rapel gaji dan lain sebagainya, sehingga apabila tidak dipergunakan maka akan menjadi silpa belanja tidak langsung.

Sementara untuk Belanja langsung serapan pada tahun **2019** sebesar **93.40%**. Realisasi ini lebih tinggi bila di bandingkan dengan capaian pada tahun **2017** yang sebesar **90.51%**. Secara keseluruhan, **beberapa hal** yang menyebabkan realisasi serapan anggaran untuk belanja langsung sebesar 93.40% diantaranya adalah sebagai berikut:

- a). efisiensi anggaran/penggunaan anggaran sesuai kebutuhan;
- b). adanya perubahan teknis pelaksanaan kegiatan yang mempengaruhi serapan anggaran sehingga anggaran kegiatan tidak bisa diserap secara maksimal;
- c). Adanya beberapa efisiensi belanja seperti belanja jasa surat menyurat, belanja makanan dan minuman, belanja komunikasi, air dan telepon, belanja logistic kantor dan belanja pemeliharaan meubelair, di mana penggunaan dari anggaran tersebut tidak bisa di prediksi secara pasti penggunaan hanya di dasarkan pada realisasi anggaran pada tahun sebelumnya
- e). Realisasi belanja pengadaan baik belanja modal atau jasa pihak ke tiga yang penawarannya di bawah pagu yang telah di anggarkan pada DPAs seperti belanja pengadaan kendaraan dan belanja peerengkapan gedung kantor yang realisasinya di bawah 90%.

SILPA Tahun 2019 **Rp. 547.701.967,-,-** atau sebesar **5.81%**. Realisasi SILPA ini jauh lebih baik daripada dua tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan kinerja perencanaan yang baik sehingga realisasi mendekati perencanaan anggaran. Adapun SILPA Tahun 2017 **Rp. 1.102.102.387,-** atau sebesar **10.83%**. Apabila di bandingkan dengan capaian pada tahun 2016, SILPA pada tahun 2019 relatif lebih kecil di mana SILPA pada tahun 2016 sebesar **Rp. 772.226.931,-** atau sebesar **8.68%**.

Tabel 3.13 SILPA Tahun Anggaran 2019 dibandingkan dengan Tahun 2018
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang

Belanja Daerah	Anggaran 2019 (Rp)	SILPA 2019 (Rp)	(%) SILPA 2019	SILPA 2018 (Rp)	(%) SILPA 2018
BELANJA DAERAH	11.053.100.000,-	611.957.416,-	5,54%	547.701.967,-	5.81%
1, Belanja Tidak Langsung	3.529.588.000,-	189.192.753,-	5,36%	129.461.299, -	4.19 %
Belanja Pegawai	3.529.588.000,-	189.192.753,-	5,36%	129.461.299, -	4.19 %
2. Belanja Langsung	7.523.512.000,-	422.764.663,-	5,62%	418.240.668, -	6.60%
Belanja Pegawai	2.339.214.000,-	109.259.000,-	4,67%	101.012.500, -	5.20%
Belanja Barang dan Jasa	4.764.676.000,-	308.409.663,-	6,47%	268.514.168, -	7.08%
Belanja Modal	419.622.000,-	5.096.000,-	1,21%	48.714.000, -	8.17%
JUMLAH BELANJA	11.053.100.000,-	611.957.416,-		547.701.967,-	

Sumber :Laporan Akhir Tahun Bappeda, realisasi anggaran Bappeda Tahun 2018 dan Tahun 2019, data di olah

Adapun Rincian SILPA untuk belanja langsung sebesar 5.62%, terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal. Beberapa alasan terkait adanya SILPA untuk belanja langsung di antaranya :

- a). belanja honorium pegawai yang tidak dapat di cairkan seluruhnya karena beberapa hal secara teknis yang menyebabkan anggaran tidak dapat di serap sepenuhnya seperti anggaran menyesuaikan dengan jumlah anggota tim yang ada di dalam SK Kegiatan atau karena kegiatan sudah selesai dilaksanakan sehingga sisa anggaran belanja honorarium kegiatan yang tidak dipergunakan tidak dapat di geserkan pada perubahan APBD;
- b). Adanya SILPA pada belanja barang dan jasa, di antaranya karena adanya efisiensi anggaran yang dipergunakan sesuai kebutuhan, adanya perubahan dan percepatan penyelesaian *Schedule* kegiatan yang berpengaruh terhadap realisasi anggaran atau adanya penawaran pihak ketiga yang realisasinya di bawah pagu anggaran yang direncanakan di dalam DPA;
- c). Adanya SILPA pada belanja Modal yang di sebabkan karena realisasi belanja modal di bawah pagu anggaran yang di rencanakan di dalam DPA

Hal yang menjadi perhatian bahwa kenaikan alokasi penganggaran tersebut tidak berbanding lurus dengan kenaikan realisasi anggaran. Apabila kita perhatikan dari tabel alokasi dan realisasi belanja di atas untuk realisasi belanja tidak langsung atau belanja pegawai jumlah realisasinya berfluktuatif mengikuti dengan perubahan komposisi jumlah karyawan sehingga terkait dengan kebutuhannya dapat diperhitungkan dan di sesuaikan pada saat Perubahan APBD tahun berkenaan.

Hal yang perlu mendapat perhatian ke depan adalah terkait realisasi belanja langsung yang berfluktuatif dalam beberapa tahun terakhir ini. Adanya penurunan realisasi serapan belanja langsung juga di subsidi dengan adanya beberapa efisiensi yang dilakukan terhadap penggunaan anggaran belanja langsung namun hal ini menunjukkan kurang cermatnya perencanaan anggaran belanja. Beberapa permasalahan terkait penyerapan anggaran belanja langsung di antaranya adalah adanya beberapa kegiatan yang muncul pada saat Perubahan APBD sedangkan waktu ditetapkannya Perubahan APBD tersebut mengalami kemunduran waktu sehingga waktu pelaksanaan kegiatan menjadi terbatas dan hal ini berimbas pada proses penyerapan anggaran belanja. Hal lain yang menjadi permasalahan penyerapan belanja langsung di antaranya :

1. Ketidaktepatan dalam perencanaan anggaran belanja langsung per triwulan maupun anggaran kas bulanan. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa kegiatan yang sudah di anggarkan pada triwulan awal padahal kegiatan baru dimulai pada triwulan berikutnya atau bahkan sebaliknya;
2. Perencanaan anggaran belanja langsung per triwulan yang terdapat di DPA atau anggaran kas yang sudah di inputkan ke dalam SIMDA belum sepenuhnya sesuai dengan *Schedule* kegiatan;
3. Realisasi fisik kegiatan yang tidak di ikuti dengan realisasi serapan dana kegiatan sehingga terdapat *gap* antara realisasi fisik kegiatan dengan realisasi anggaran. Pelaksanaan kegiatan belum di ikuti oleh serapan dana kegiatan sehingga ada ketimpangan antara capaian realisasi fisik dan capaian realisasi serapan anggaran. Hal ini menyebabkan target serapan anggaran yang sudah direncanakan tidak dapat terserap;
4. Terdapat beberapa hal terkait dengan teknis pelaksanaan kegiatan yang menyebabkan kegiatan – kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan target dan *schedule* yang telah ditetapkan pada awal tahun kegiatan;
5. Belum dipergunakannya secara optimal Analisis Standar Biaya (ASB) untuk kegiatan – kegiatan terkait dokumen perencanaan atau kegiatan kajian yang biasa dilaksanakan oleh Badan Perencanaan sehingga penentuan alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut tidak memiliki dasar secara normatif maupun akademik yang dapat dipertanggungjawabkan;

Beberapa solusi atas permasalahan di dalam pengelolaan administrasi keuangan , perencanaan dan penganggaran di antaranya :

1. Lebih cermat dalam menyusun anggaran kas pada saat penyusunan anggaran. Anggaran kas ini di susun berdasarkan atas schedull atau rencana kegiatan yang kemudian di tuangkan ke dalam anggaran kas kegiatan;
2. Tertib pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran kegiatan sehingga tercipta integrasi antara realisasi pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran kegiatan;
3. Optimalisasi penggunaan ASB ketika penyusunan anggaran kegiatan sehingga alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut memiliki dasar secara normatif maupun akademik yang dapat dipertanggungjawabkan
4. Perlu kecermatan di dalam menghitung kebutuhan anggaran kegiatan sehingga anggaran kegiatan sesuai dengan kebutuhan/mencukupi kebutuhan pelaksanaan kegiatan dan dalam laporan pertanggungjawaban
5. Meningkatkan SPIP pelaksanaan kegiatan yang di implementasikan salah satunya dengan pelaksanaan monev kegiatan secara rutin / berkala di lingkungan OPD
6. perlu adanya integrasi antara perencanaan dan penganggaran sehingga ke depan hal – hal yang direncanakan dan di anggaran merupakan perencanaan yang berbasis kinerja dan berbasis program dan harapannya realisasi penganggaran akan mengalami *trend* yang meningkat sesuai dengan perencanaan yang sudah di susun.

Secara terperinci di bawah ini di sajikan tabel serapan anggaran per kegiatan pada tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.14 Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI DANA		Prosentase (%)	KET.
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	2	3	4	5	6
	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah				
1	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	4,545,000	4,541,500	99,92%	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
2	Penyediaan jasa surat menyurat	755,000	438,000	58,01%	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI DANA		Prosentase (%)	KET.
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	2	3	4	5	6
3	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	81,600,000	67,700,829	82,97%	
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	9,650,000	6,417,875	66,51%	
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	167,352,000	164,047,800	98,03%	
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	73,292,000	72,991,408	99,59%	
7	Penyediaan alat tulis kantor	16,436,000	16,431,500	99,97%	
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15,220,000	14,808,614	97,30%	
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5,094,000	5,092,000	99,98%	
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7,080,000	6,720,000	94,92%	
11	Penyediaan bahan logistik kantor	10,602,000	9,543,000	90,01%	
12	Penyediaan makanan dan minuman	24,015,000	23,355,000	97,25%	
13	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	286,460,000	286,427,176	99,99%	
14	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorar daerah/tidak tetap	115,642,000	115,639,694	100%	
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				
15	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	39,822,000	39,169,500	98,36%	
16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	209,500,000	201,220,231	96,05%	
17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	13,319,000	13,100,600	98,36%	
18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	35,500,000	35,430,000	99,80%	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI DANA		Prosentase (%)	KET.
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	2	3	4	5	6
19	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	5,000,000	4,617,000	92,34%	
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah				
20	Workshop perencanaan pembangunan daerah	10,127,000	7,984,500	78,84%	
21	Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	37,010,000	36,856,000	99,58%	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
22	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	16,490,000	16,465,900	99,85%	
23	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	8,508,000	8,408,000	98,82%	
24	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	8,509,000	8,468,000	99,52%	
25	Penyusunan Rencana Kerja OPD	13,656,000	13,411,400	98,21%	
26	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	18,356,000	17,951,700	97,80%	
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	4,830,000	4,774,000	98,84%	
28	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	9,810,000	9,796,000	99,86%	
	Program perencanaan pembangunan daerah				
29	Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	12,000,000	12,000,000	100,00%	
30	Penyusunan rancangan RKPD	298,966,000	288,619,000	96,54%	
31	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	142,539,000	141,090,000	98,98%	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI DANA		Prosentase (%)	KET.
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	2	3	4	5	6
32	Penetapan RKPD	32,645,000	31,244,500	95,71%	
33	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	19,000,000	18,450,000	97,11%	
34	Forum OPD dan FGD	199,823,000	188,026,500	94,10%	
35	Publikasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah	84,080,000	83,567,800	99,39%	
36	Pelaksanaan Verifikasi Renja OPD	121,032,000	114,036,000	94,22%	
37	Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD	132,950,000	122,669,000	92,27%	
38	Penetapan Perubahan RKPD	27,043,000	25,759,200	95,25%	
39	Pelaksanaan Verifikasi Perubahan Renja OPD	121,074,000	107,695,000	88,95%	
40	Pengendalian dan Evaluasi RKPD	51,000,000	50,136,000	98,31%	
41	Konsultasi Publik RPJMD	55,050,000	41,163,000	74,77%	
42	Forum OPD dan FGD RPJMD	113,467,000	112,488,000	99,14%	
43	Pelaksanaan Verifikasi Renstra OPD	114,700,000	107,884,000	94,06%	
44	Penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis	170,650,000	166,007,310	97,28%	
45	Penyusunan Standar Satuan Harga	133,000,000	126,419,134	95,05%	
46	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Smart City	111,000,000	110,920,938	99,93%	
47	Penyusunan Perubahan RPJMD	262,660,000	243,109,278	92,56%	
48	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1,252,061,000	1,186,574,649	94,77%	
	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi				

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI DANA		Prosentase (%)	KET.
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	2	3	4	5	6
49	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	127,883,000	126,122,142	98,62%	
50	Penyusunan Dokumen Pengembangan Kebun Raya Gunung Tidar	490,951,000	396,528,875	80,77%	
51	Penyusunan Dokumen Perencanaan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro (KUM) Bebas Ekonomi Lokal	161,432,000	152,896,500	94,71%	
52	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Magelang Kota Sejuta Bunga	104,352,000	100,321,000	96,14%	
	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya				
53	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	28,214,000	23,829,700	84,46%	
55	Penyusunan Dokumen Masterplan Pemberdayaan Masyarakat	155,827,000	148,291,900	95,16%	
56	Penyusun Laporan Dokumen Perencanaan Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	153,552,000	142,426,280	92,75%	
57	Penyusunan Dokumen Masterplan Wisata Diponegoro	152,373,000	143,638,411	94,27%	
	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana				
58	Penyusunan Dokumen Visualisasi Kawasan Strategis dan Prioritas Daerah	95,602,000	90,531,000	94,70%	
59	Moitoring dan Evaluasi Implementasi Kawasan Strategis	25,000,000	23,559,5000	94,24%	
60	Review Masterplan Kawasan GOR Samapta	254,000,000	242,912,000	95,63%	
61	Review Masterplan Kawasan Soekarno-Hatta	209,000,000	184,354,500	88,21%	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI DANA		Prosentase (%)	KET.
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	2	3	4	5	6
62	Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)	294,000,000	277,794,500	94,47%	
63	Penyusunan Masterplan Taman Kota Magelang	355,406,000	351,953,812	99,03%	
64	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Perumahan, Pemukiman, Air Minum dan Sanitasi Kota Magelang	139,000,000	132,362,636	95,22%	
65	Penyusunan Masterplan Kampung Tematik, Terpadu dan Hijau	74,000,000	73,600,800	99,46%	
	Jumlah	7,523,512,000	7,100,747,337	94,38%	

Sumber :Laporan LKPJ Tahun 2019 Bappeda, data di olah

3.3 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Analisis terhadap penggunaan sumber daya khususnya terkait dengan sumber daya aparatur dapat di lihat dari perbandingan kebutuhan karyawan pada Bappeda Kota Magelang dengan kondisi karyawan pada saat ini.

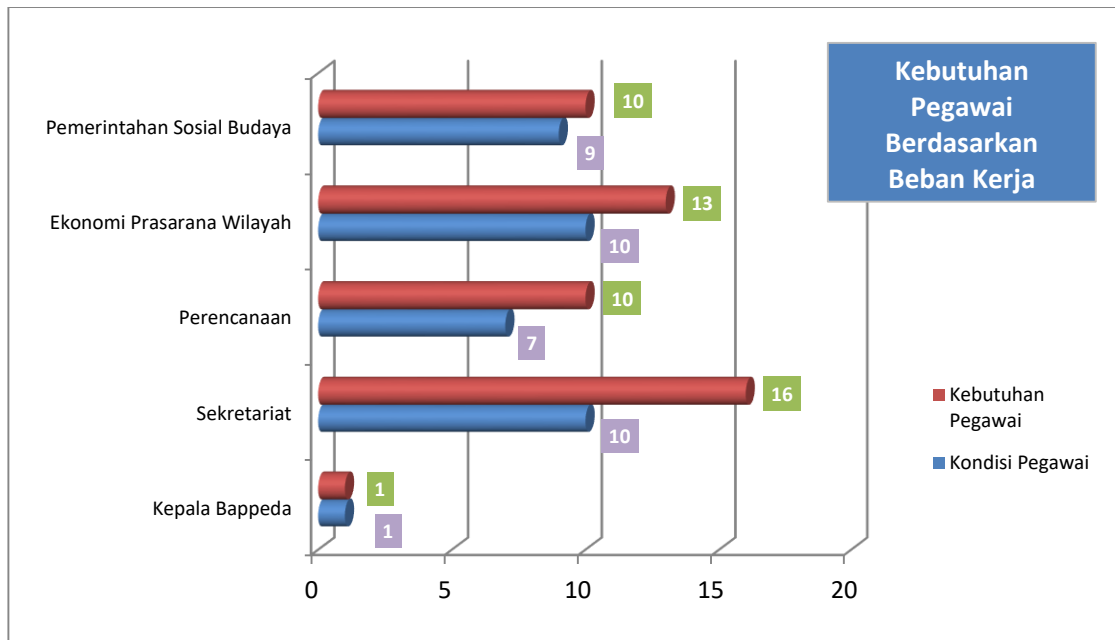
Tabel di bawah ini menggambarkan komposisi dan kebutuhan pegawai Bappeda di tiap bidang berdasarkan pendidikan formalnya.

Tabel 3.15 Komposisi dan Kebutuhan Pegawai (kondisi per bidang) Bappeda Kota Magelang Menurut Pendidikan Formal Tahun 2019

Bidang/Pendidikan	Jumlah	Kebutuhan	Keterangan
<u>Kepala Bappeda</u> S2 Urban Planing	1 org	1 org	
<u>Sekretariat Bappeda</u>			
a. S1 Ekonomi Manajemen Perusahaan	1 org	1 org	
b. S2 Ekonomi Pembangunan	2 org	3 org	
c. S2 Ekonomi Akuntansi	1 org	2 org	
d. S1 Ekonomi Akuntansi	2 org	4 org	
e. S1 Teknik Mesin	1 org	1 org	

Bidang/Pendidikan	Jumlah	Kebutuhan	Keterangan
f. S1 Hukum	1 org	1 org	
g. S1 Ekonomi Manajemen	1 org	1 org	
i. SLTA sederajat	1 org	3 org	
<u>Bidang Perencanaan</u>			
a. S2 Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota	1 org	2 org	
b. S2 Administrasi Publik	1 org	2 org	
c. S2 Teknik Informatika	1 org	1 org	
d. S1 Teknik Sipil	1 org	2 org	
e. S2 Perencanaan Wilayah dan Kota	2 org	2 org	
f. S1 Ekonomi Manajemen	1 org	1 org	
<u>Bidang Ekonomi Prasarana Wilayah</u>			
a. S2 Perencanaan Wilayah dan Kota	2 org	4 org	
b. S1 Ekonomi Manajemen	1 org	2 org	
c. S1 Ekonomi Akuntansi	1 org	1 org	
d. SLTA Sederajat	1 org	1 org	
e. S1 Pertanian / teknik Pertanian	-	1 org	
<u>Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya</u>			
a. S2 Ekonomi Pembangunan	1 org	1 org	
b. S1 Ekonomi Manajemen	2 org	2 org	
c. S1 Ilmu Administrasi Negara	1 org	2 org	
d. S2 Perencanaan Wilayah dan Kota	-	1 org	
e. S2 Administrasi Publik	1 org	2 org	
f. D3 Teknik Lingkungan	1 org	1 org	
<u>Fungsional</u>			
a. S2 Perencanaan Wilayah dan Kota	3 org	4 org	
b. D3 Teknik Informatika	1 org	1 org	
c. S1 Teknik Sipil	1 org	2 org	

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kota Magelang, akhir tahun 2019, data diolah



Gambar 3.37 Komposisi dan Kebutuhan Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang berdasarkan Beban Kerja

Beberapa permasalahan terkait dengan manajemen kepegawaian di lingkup Badan Perencanaan di antaranya, sebagai berikut :

- Berdasarkan analisis kebutuhan karyawan baik secara jumlah maupun kualifikasi pegawai seperti sebagaimana tabel di atas, maka terdapat kekurangan pegawai sebanyak 14 personil untuk memehuni kondisi mendekati ideal sesuai dengan kebutuhan;
- Adanya tantangan pada fungsi perencanaan yang semakin tidak ringan ke depannya seiring dengan kompleksitas dan tuntutan akan peningkatan akuntabilitas karyawan;

Beberapa **solusi** yang sudah di lakukan terkait dengan permasalahan manajemen kepegawaian di lingkup Badan Perencanaan di antaranya, sebagai berikut :

- Optimalisasi sarana dan prasarana dalam rangka mempercepat penyelesaian pekerjaan;
- Mengoptimalkan karyawan yang ada dengan jumlah dan kualifikasi yang ada untuk tetap bisa memenuhi tuntutan penyelesaian target pekerjaan dan beban kerja yang harus di selesaikan;
- Meningkatkan kapasitas aparatur perencana melalui pendidikan, pelatihan, bintek atau workshop yang mampu meningkatkan kualitas dan kompetensi karyawan yang akan mendukung peningkatan kualitas perencanaan
- Perlunya inovasi tiada henti baik dalam tataran inovasi perencanaan pembangunan dan inovasi yang berupa terobosan kebijakan yang out of the box yang berorientasi

pada kecepatan dan kualitas pelayanan publik dan akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan indikator yang ada. Hal ini bisa terwujud dengan implementasi Continuous Improvement Mindset dimulai pada hal-hal kecil hingga menjadi budaya kerja berbasis perbaikan berkesinambungan.

Secara ketersediaan asset, sebagian besar kebutuhan asset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang telah terpenuhi walaupun masih terdapat asset dalam kondisi yang tidak baik atau terdapat beberapa barang dalam kondisi rusak ringan atau rusak sedang sehingga dalam penggunaannya akan mengganggu penyelesaian tugas. Bahkan ada beberapa asset yang sudah rusak berat dan tidak dapat dioperasikan lagi (terutama asset-asset dengan tahun pembelian di atas 10 tahun). Asset – asset yang sudah tidak beroperasi dengan baik akan membebani anggaran badan karena biaya pemeliharaan asset tersebut akan terus membebani belanja operasional kantor sementara penggunaan asset tersebut sudah tidak optimal lagi.

Terkait dengan asset – asset tersebut dalam beberapa tahun terakhir ini telah dilakukan penghapusan terhadap asset – asset yang secara fungsi maupun nilai ekonomis berada di bawah kapitalisasi asset sesuai dengan kebijakan akuntansi. Penghapusan asset tersebut di ikuti dengan administrasi penghapusan asset-asset yang sudah tidak dipergunakan agar jumlah secara nominal tidak akan terakumulasi di dalam Neraca Badan sedangkan secara riil barang tersebut sudah tidak layak lagi untuk dipergunakan.

Terkait dengan sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang pada Tahun 2019 dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.16 Total Aset Bappeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2019

No	Jenis Aset	Nilai Aset (Rp)
1	Total Aset Intrakompatibel	
	a. Aset Intrakompatibel	Rp. 5.829.943.767,66
	b. Aset Lainnya Intrakompatibel (asset lain-lain	Rp. 320.470.452, 00
	c. Aset Lainnya Intrakompatibel (asset tidak berujud)	Rp. 1.231.545.500, 00

No	Jenis Aset	Nilai Aset (Rp)
2	Aset Ekstrakompatabel	
	a. Aset Ekstakompatabel	Rp. 102.676.850, 00
	b. Aset Lainnya Ekstrakompatabel	Rp. 3.991.300, 00

Sumber : Laporan Barang Semester 2 Bappeda Tahun tahun 2019

Dalam catatan Pengurus barang terdapat data asset yang di rencanakan akan di hapuskan dalam beberapa tahun ke depan. Secara pencatatan akuntansi masuk ke dalam asset lain – lain. Asset ini apabila di lihat dari nilai kemanfaatannya / nilai bukunya sudah habis (nol) di karenakan adanya penyusutan dari asset tersebut (masa manfaatnya sama dengan dengan manfaat berjalannya sehingga sisa manfaatnya nol)

Di bawah ini di sajikan data asset intrakompatabel yang terdiri dari asset – asset Bappeda yang tercatat di dalam Neraca dan Laporan Keuangan, di mana angka dari asset tersebut di atas nilai kapitalisasi dari suatu asset yang dikelola oleh daerah sesuai dengan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan daerah, sebagai berikut :

**Tabel 3.17 Daftar Realsiasi Penambahan dan Pengurangan Asset Tetap Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2019**

NO	URAIAN	TAHUN 2019						SALDO AKHIR
		SALDO AWAL	PENAMBAHAN			PENGURANGAN		
			BM	MUTA SI	REKLASIFIKASI	BA KOREKSI NERACA	REKLASIFIKASI	
1	Tanah	-						-
2	Alat Berat	202,951,000.-						202,951,000.-
	Alat Bantu	202,951,000.-						202,951,000.-
3	Alat Angkutan	1,129,500,330.-						1,118,260,330.-
	Alat Angkutan Darat Bermotor	1,127,186,500.-	22,560,000.-			33,800,000.-		1,052,946,500.-
	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2,313,830.-						2,313,830.-
4	Alat Bengkel	-						-
5	Alat Pertanian dan Peternakan	-						-
6	Alat Kantor dan RT	1,997,237,058.66						2,288,658,058.66

NO	URAIAN	TAHUN 2019						SALDO AKHIR
		SALDO AWAL	PENAMBAHAN			PENGURANGAN		
			BM	MUTA SI	REKLASIFIKASI	BA KOREKSI NERACA	REKLASIFIKASI	
	Alat Kantor	464,565,500.-						464,565,500.-
	Alat Rumah Tangga	578,139,894.-	149,859,400.-					727,990,294.-
	Komputer	886,857,964.66	141,561,600.-			85,515,000.-		1,028,419,564,66
	Meja dan Kursi Pejabat	67,673,700.-						67,673,700.-
7	Alat Studio dan Komunikasi	11,749,080.-						11,749,080.-
	Alat Studio	2,658,000.-						2,658,000.-
	Alat Komunikasi	9,091,080.-						9,091,080.-
8	Alat Ukur	12,380,000.-						12,380,000.-
9	Alat Kedokteran	8,205,129.-						8,205,129.-
10	Alat Laboratorium	-						-
11	Alat Keamanan	16,653,860.-						16,653,860.-
12	Alat Bantu Keamanan	-						-
12	Bangunan Gedung	2,437,299,900.-						2,397,414,900.-
	Bangunan Gedung Kantor	1,730,610,100.-				39,885,000.-	39,885,000.-	1,690,725,100.-
	Bangunan Gudang	115,544,850.-						115,544,850.-
	Bangunan Garasi	461,261,950.-						461,261,950.-
	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	129,883,000.-						129,883,000.-
13	Bangunan Monumen	-						
14	Jalan dan Jembatan	-						
15	Bangunan Air (irigasi)	5,842,860.-						5,842,860.-
16	Instalasi	-						
17	Jaringan	-						
18	Buku	4,649,550.-						4,649,550.-

NO	URAIAN	TAHUN 2019						SALDO AKHIR
		SALDO AWAL	PENAMBAHAN			PENGURANGAN		
			BM	MUTA SI	REKLASIFIKASI	BA KOREKSI NERACA	REKLASIFIKASI	
	Perpustakaan							
	Buku Umum	4,649,550.-						4,649,550.-
19	Barang Bercorak Kebudayaan	3,475,000.-						3,475,000.-
20	Hewan/ternak, Tanaman dan Taman	-						
21	Konstruksi dalam Pengerjaan	-						
	Jumlah	5,829,943,767.66	313,981,000			119,315,000.-	39,885,000.-	6,070,239,767.66

Sumber : Laporan Keuangan Akhir Tahun Bappeda tahun 2019

Beberapa Hal lain yang diperlukan dan diperhatikan terkait dengan pengelolaan asset daerah yaitu :

- manajemen pengelolaan asset yang terkelola dengan baik, sehingga asset-asset yang ada dapat terinventaris secara rapi baik dari sisi pemeliharaannya maupun dari sisi administrasi asset.
- Manajemen pengelolaan asset yang meliputi tahapan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan menjadi sesuatu yang penting dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan di mana manajemen asset tersebut merupakan salah satu point terpenting dalam mencapai opini WTP .
- Perlunya sinkronisasi dalam penatausahaan asset sehingga bisa terintegrasi dan sejalan dengan penatausahaan keuangan
- Beberapa permasalahan teknis terkait penyusunan Laporan Keuangan terutama pada Laporan Akhir Tahun yakni :
 - perhitungan stock opname yang mundur dari perkiraan waktu,
 - sinkronisasi data antara pengurus barang dan penyusun neraca,
 - Berita Acara Koreksi Neraca ataupun SK Sekda penghapusan Aset yang terbit setelah proses penyusunan laporan sehingga harus mengoreksi data aset,
 - serta perhitungan penyusutan asset tahun berjalan 2019

Beberapa Hal yang telah di lakukan sebagai **solusi atas permasalahan** di atas, diantaranya :

- a. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan pengurus barang melalui bintek, pelatihan ataupun *transfer knowlagde* dengan pengurus barang yang sebelumnya atau *stakeholder* pada OPD terkait yang mengurus secara teknis pengelolaan asset daerah;
- b. Senantiasa meningkatkan kualitas pengelolaan asset untuk mewujudkan manajemen pengelolaan asset yang terkelola dengan baik, yang meliputi tahapan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam manajemen pengelolaan asset;
- c. Tertib administrasi pengelolaan asset sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
- d. Melakukan sinkronisasi dan integrasi dalam pengelolaan asset dan pengelolaan keuangan OPD salah satunya dengan melakukan rekonsiliasi asset sehingga tercipta laporan yang akuntabel antara asset dan keuangan

3.4 PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM KEGIATAN

Secara substantif Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2019 yang terepresentasikan melalui capaian kinerja dari program dan kegiatan pendukung pencapaian sasaran – sasaran strategis, dapat di lihat pada tabel 3.18 di bawah ini:

TAHUN 2019[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Layanan jasa komunikasi via telepon dan layanan listrik									
	- pesawat telepon			2	2	telpon				
	- rekening listrik			1	1	rek listrik				
	<u>Hasil (Outcome):</u>									
	Tersedianya jasa komunikasi dan listrik						100	100	%	
4.03.403.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional									
	<u>Masukan (Input):</u>									
	Dana (Alokasi Dana)	9,650,000	6,417,875							
	<u>Keluaran (Output) :</u>									
	Tersedianya perizinan 26 unit kendaraan dinas/operasional									
	- sepeda motor			20	20	unit				
	- mobil			6	6	unit				
	<u>Hasil (Outcome):</u>									
	Adanya kendaraan yang izinnya sudah dilaksanakan						100	100	%	
4.03.4.03.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan									
	<u>Masukan (Input):</u>									
	Dana (Alokasi Dana)	167,352,000	164,047,800							
	<u>Keluaran (Output) :</u>									
	- honorarium pengelolaan keuangan daerah			11	11	org				
	- laporan keuangan dan SPJ bulanan			24	24	bendel				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Hasil (Outcome):</u>									
	Tersedianya dokumen laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan OPD yang tertib administrasi dan transparan serta akuntabel						100	100	%	
4.03.4.03.01.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor									
	<u>Masukan (Input):</u>									
	Dana (Alokasi Dana)	73,292,000	72,991,408							
	<u>Keluaran (Output) :</u>									
	terwujudnya kebersihan kantor									
	- tersedianya peralatan, bahan pembersih kantor			29	29	item				
	- jasa kebersihan kantor dan perawatan taman kantor			3	3	tenaga				
	<u>Hasil (Outcome):</u>									
	Terwujudnya lingkungan kantor yang bersih, nyaman, dan sehat						100	100	%	
4.03.4.03.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor									
	<u>Masukan (Input):</u>									
	Dana (Alokasi Dana)	16,436,000	16,431,500							
	<u>Keluaran (Output) :</u>									
	Tersedianya Alat Tulis Kantor			30	30	item				
	<u>Hasil (Outcome):</u>									
	Tersedianya alat tulis kantor yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan rutin kantor						100	100	%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.03.4.03.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									
	<u>Masukan (Input):</u>									
	Dana (Alokasi Dana)	15,220,000	14,808,614							
	<u>Keluaran (Output) :</u>									
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan			3	3	item				
	<u>Hasil (Outcome):</u>									
	Terlaksananya administrasi perkantoran melalui kegiatan cetak, penggandaan dan penjilidan						100	100	%	
4.03.4.03.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									
	<u>Masukan (Input):</u>									
	Dana (Alokasi Dana)	5,094,000	5,092,900							
	<u>Keluaran (Output) :</u>									
	Tersedianya komponen listrik dan penerangan bangunan kantor			14	14	komponen				
	<u>Hasil (Outcome):</u>									
	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor						100	100	%	
4.03.4.03.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									
	<u>Masukan (Input):</u>									
	Dana (Alokasi Dana)	7,080,000	6,720,000							
	<u>Keluaran (Output) :</u>									
	tersedianya bahan bacaan dan surat kabar			5	5	jenis				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Hasil (Outcome):</u>									
	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan secara baik melalui jasa layanan surat kabar						100	100	%	
4.03.4.03.01.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor									
	<u>Masukan (Input):</u>									
	Dana (Alokasi Dana)	10,602,000	9,543,000							
	<u>Keluaran (Output) :</u>									
	Penyediaan isi ulang tabung gas dan BBM untuk genset			18	18	pengisian tabung gas & BBM genset				
	<u>Hasil (Outcome):</u>									
	tersedianya bahan logistik kantor						100	100	%	
4.03.4.03.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman									
	<u>Masukan (Input):</u>									
	Dana (Alokasi Dana)	24,015,000	23,355,000							
	<u>Keluaran (Output) :</u>									
	Jamuan makan minum rapat, tamu dan harian pegawai									
	- manmin pegawai			47	47	pegawai				
	- jamuan rapat			20	20	rapat				
	- jamuan tamu			150	150	org tamu				
	<u>Hasil (Outcome):</u>									
	Tersedianya jamuan makan dan minum rapat, jamuan tamu dan harian pegawai						100	100	%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.03.4.03.01.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah									
	<u>Masukan (Input):</u>									
	Dana (Alokasi Dana)	286,460,000	286,427,176							
	<u>Keluaran (Output) :</u>									
	Terfasilitasinya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			52	52	kali				
	<u>Hasil (Outcome):</u>									
	Terfasilitasinya perjalanan dinas untuk rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah selama 1 tahun anggaran						100	100	%	
4.03.4.03.01.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap									
	<u>Masukan (Input):</u>									
	Dana (Alokasi Dana)	115,642,000	115,639,694							
	<u>Keluaran (Output) :</u>									
	Tersedianya Upah Tenaga Kontrak, penjaga malam dan front office			5	5	org				
	<u>Hasil (Outcome) :</u>									
	Terlaksananya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran						100	100	%	
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur									
4.03.4.03.01.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									
	<u>Masukan (Input):</u>									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dana (Alokasi Dana)	39,822,000	39,169,500							
	<u>Keluaran (Output) :</u>									
	Terpeliharanya gedung Bappeda			3	3	jns				
	<u>Hasil (Outcome):</u>									
	Terwujudnya pemeliharaan gedung dan lingkungan kantor						100	100	%	
4.03.4.03.01..02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									
	<u>Masukan (Input):</u>									
	Dana (Alokasi Dana)	209,500,000	201,220,231							
	<u>Keluaran (Output) :</u>									
	Pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional Bappeda									
	- mobil			6	6	unit				
	- sepeda motor			20	20	unit				
	<u>Hasil (Outcome):</u>									
	Pelaksanaan pemeliharaan secara rutin kendaraan dinas operasional selama 1 tahun anggaran						100	100	%	
4.03.4.03.01..02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor									
	<u>Masukan (Input):</u>									
	Dana (Alokasi Dana)	13,319,000	13,100,600							
	<u>Keluaran (Output) :</u>									
	Jumlah perlengkapan gedung kantor Bappeda yang terpelihara			11	11	item				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Hasil (Outcome):</u>									
	Terwujudnya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor dengan baik selama 1 tahun						100	100	%	
4.03.4.03.01.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor									
	<u>Masukan (Input):</u>									
	Dana (Alokasi Dana)	35,500,000	35,430,000							
	<u>Keluaran (Output) :</u>									
	Terpeliharanya mebeleur			14	14	item				
	<u>Hasil (Outcome):</u>									
	Terwujudnya pemeliharaan alat-alat kantor dan rumah tangga dengan baik selama 1 tahun						100	100	%	
4.03.4.03.01...02.027	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur									
	<u>Masukan (Input):</u>									
	Dana (Alokasi Dana)	5,000,000	4,617,000							
	<u>Keluaran (Output) :</u>									
	Jumlah mebeleur gedung kantor Bappeda			4	4	item				
	<u>Hasil (Outcome):</u>									
	Terwujudnya pemeliharaan mebeleur gedung kantor dengan baik selama 1 tahun						100	100	%	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.03.4.03.01..06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD									
	<u>Masukan (Input):</u>									
	Dana (Alokasi Dana)	16,490,000	16,465,900							
	<u>Keluaran (Output) :</u>									
	Dokumen evaluasi kegiatan, realisasi keuangan dan fisik bulanan			12	12	laporan				
	<u>Hasil (Outcome):</u>									
	Tersedianya dokumen evaluasi kegiatan (Laporan realisasi keuangan dan fisik kegiatan)						100	100	%	
4.03.4.03.01..06.003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran									
	<u>Masukan (Input):</u>									
	Dana (Alokasi Dana)	8,508,000	8,408,000							
	<u>Keluaran (Output) :</u>									
	Laporan prognosis realisasi anggaran			6	6	buku				
	<u>Hasil (Outcome):</u>									
	Tersedianyan laporan prognosis realisasi anggaran guna tertib administrasi keuangan						100	100	%	
4.03.4.03.01..06.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun									
	<u>Masukan (Input):</u>									
	Dana (Alokasi Dana)	8,509,000	8,468,400							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Keluaran (Output) :</u>									
	Laporan prognosis realisasi anggaran			5	5	buku				
	<u>Hasil (Outcome):</u>									
	Dokumen pertanggungjawaban pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel						100	100	%	
4.03.4.03.01..06.006	Penyusunan rencana kerja OPD									
	<u>Masukan (Input):</u>									
	Dana (Alokasi Dana)	13,656,000	13,411,400							
	<u>Keluaran (Output) :</u>									
	Dokumen Renja dan Renja Perubahan OPD			2	2	dokumen				
	<u>Hasil (Outcome):</u>									
	Dokumen Renja Bappeda yang berkualitas dan operasional						100	100	%	
4.03.4.03.01..06.008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD									
	<u>Masukan (Input):</u>									
	Dana (Alokasi Dana)	18,356,000	17,951,700							
	<u>Keluaran (Output) :</u>									
	Dokumen RKA dan RKPA Bappeda			2	2	dokumen				
	<u>Hasil (Outcome):</u>									
	Tersusunnya perencanaan anggaran penetapan 2020 dan anggaran perubahan tahun 2019 sebagai dasar pelaksanaan kegiatan						100	100	%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.03.4.03.01..06.027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD									
	<u>Masukan (Input):</u>									
	Dana (Alokasi Dana)	4,830,000	4,774,000							
	<u>Keluaran (Output) :</u>									
	Dokumen LKjIP Bappeda			1	1	dokumen				
	<u>Hasil (Outcome):</u>									
	Terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja dan akuntabilitas kinerja SKPD						100	100	%	
4.03.4.03.01..06.028	Penyusunan Perubahan Renstra OPD									
	<u>Masukan (Input):</u>									
	Dana (Alokasi Dana)	9,810,000	9,796,000							
	<u>Keluaran (Output) :</u>									
	Dokumen Perubahan Renstra OPD			1	1	dokumen				
	<u>Hasil (Outcome):</u>									
	Dokumen Perubahan Renstra OPD yang selaras dengan dokumen perubahan RPJMD						100	100	%	
	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah									
4.03.4.03.01.2.18.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah									
	<u>Masukan (Input):</u>									
	Jumlah Dana	4,545,000	4,541,500							
	<u>Keluaran (Output) :</u>									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	pendataan dan penataan arsip			1	1	keg				
	<u>Hasil (Outcome):</u>									
	Tertatanya arsip sesuai dengan peraturan yang berlaku						100	100	%	
	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah									
4.03.4.03.01.20.015	Workshop perencanaan pembangunan daerah									
	<u>Masukan (Input):</u>									
	Dana (Alokasi Dana)	10,127,000	7,984,500							
	<u>Keluaran (Output) :</u>									
	Terlaksananya workshop perencanaan pembangunan daerah yang dapat meningkatkan kapasitas aparatur perencana di Bappeda			37	37	pegawai				
	<u>Hasil (Outcome) :</u>									
	Pegawai Bappeda yang lebih memahami perencanaan pembangunan daerah						100	100	%	
4.03.4.03.01.20.016	Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah									
	<u>Masukan (Input):</u>									
	Dana (Alokasi Dana)	37,010,000	36,856,000							
	<u>Keluaran (Output) :</u>									
	Tersosialisasinya indikator kinerja pembangunan daerah			29	29	OPD				
	<u>Hasil (Outcome) :</u>									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Meningkatnya pemahaman aparatatur perencanaan tentang perencanaan pembangunan daerah						100	100	%	
	Program perencanaan pembangunan daerah									
4.03.4.03.01.21.006	Penyelenggaraan musrenbang RPJMD									
	<u>Masukan (Input):</u>									
	Dana (Alokasi Dana)	12,000,000	12,000,000							
	<u>Keluaran (Output) :</u>									
	Terselenggaranya musrenbang RPJMD			29	29	OPD				
	<u>Hasil (Outcome) :</u>									
	Terakomodasinya kesepakatan Musrenbang RPJMD						100	100	%	
4.03.4.03.01.21.008	Penyusunan rancangan RKPD									
	<u>Masukan (Input):</u>									
	Dana (Alokasi Dana)	298,966,000	288,619,000							
	<u>Keluaran (Output) :</u>									
	Jumlah dokumen Rancangan RKPD Kota Magelang			2	2	dokumen				
	<u>Hasil (Outcome) :</u>									
	Tersedianya rancangan Perwal tentang RKPD						100	100	%	
4.03.4.03.01.21.009	Penyelenggaraan musrenbang RKPD									
	<u>Masukan (Input):</u>									
	Dana (Alokasi Dana)	142,539,000	141,090,900							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Keluaran (Output) :</u>									
	Terselenggaraannya Pra Musrenbang dan Musrenbang RKPD kota Magelang			2	2	kegiatan				
	<u>Hasil (Outcome) :</u>									
	Terakomodasinya kesepakatan Musrenbang RPJMD						100	100	%	
4.03.4.03.01.21.010	Penetapan RKPD									
	<u>Masukan (Input):</u>									
	Dana (Alokasi Dana)	32,645,000	31,244,500							
	<u>Keluaran (Output) :</u>									
	Jumlah Dokumen Peraturan Walikota RKPD			1	1	perwal				
	<u>Hasil (Outcome):</u>									
	Tersediannya dokumen peraturan walikota RKPD dan lampiran						100	100	%	
4.03.4.03.01.21.013	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah									
	<u>Masukan (Input):</u>									
	Dana (Alokasi Dana)	19,000,000	18,450,000							
	<u>Keluaran (Output) :</u>									
	Jumlah laporan dokumen monev			4	4	laporan				
	<u>Hasil (Outcome):</u>									
	Hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah						4	4	jenis	
4.03.4.03.01.21.014	Forum OPD dan FGD									
	<u>Masukan (Input):</u>									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dana (Alokasi Dana)	199,823,000	188,026,500							
	<u>Keluaran (Output) :</u>									
	Jumlah forum OPD									
	- Forum OPD			1	1	kali				
	- FGD			9	9	kali				
	<u>Hasil (Outcome):</u>									
	Tersedianya harmonisasi usulan partisipatif dan teknokratif antar DPRD						100	100	%	
4.03.4.03.01.21.019	Publikasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah									
	<u>Masukan (Input):</u>									
	Dana (Alokasi Dana)	84,080,000	83,567,800							
	<u>Keluaran (Output) :</u>									
	Jumlah media publikasi			4	4	media publikasi				
	<u>Hasil (Outcome) :</u>									
	Terpublikasinya kegiatan perencanaan kepada masyarakat luas						100	100	%	
4.03.4.03.01.21.031	Pelaksanaan Verifikasi Renja OPD									
	<u>Masukan (Input):</u>									
	Dana (Alokasi Dana)	121,032,000	114,036,000							
	<u>Keluaran (Output) :</u>									
	Jumlah Renja OPD yang diverifikasi			29	29	OPD				
	<u>Hasil (Outcome):</u>									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Terpublikasinya perencanaan pembangunan daerah						100	100	%	
4.03.4.03.01.21.035	Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD									
	<u>Masukan (Input):</u>									
	Dana (Alokasi Dana)	132,950,000	122,669,000							
	<u>Keluaran (Output) :</u>									
	Dokumen rancangan perubahan RKPD			1	1	dokumen				
	<u>Hasil (Outcome):</u>									
	Tersedianya rancangan peraturan walikota tentang perubahan RKPD						100	100	%	
4.03.4.03.01.21.036	Penetapan Perubahan RKPD									
	<u>Masukan (Input):</u>									
	Dana (Alokasi Dana)	27,043,000	25,759,200							
	<u>Keluaran (Output) :</u>									
	Dokumen perubahan RKPD			1	1	perwal				
	<u>Hasil (Outcome):</u>									
	tersedianya dokumen Perwal perubahan RKPD dan lampiran						100	100	%	
4.03.4.03.01..21.037	Pelaksanaan Verifikasi Perubahan Renja OPD									
	<u>Masukan (Input):</u>									
	Dana (Alokasi Dana)	121,074,000	107,695,000							
	<u>Keluaran (Output) :</u>									
	Jumlah perubahan Renja OPD yang diverifikasi			29	29	OPD				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Hasil (Outcome):</u>									
	Terverifikasinya rancangan perubahan Renja OPD						100	100	%	
4.03.4.03.01.21.042	Pengendalian dan Evaluasi RKPD									
	<u>Masukan (Input):</u>									
	Dana (Alokasi Dana)	51,000,000	50,136,000							
	<u>Keluaran (Output) :</u>									
	Tersedianya dokumen pengendalian dan evaluasi RKPD			4	4	Laporan				
	<u>Hasil (Outcome):</u>									
	Terlaksananya pengendalian dan evaluasi RKPD dengan baik						100	100	%	
4.03.4.03.01.21.044	Konsultasi Publik RPJMD									
	<u>Masukan (Input):</u>									
	Dana (Alokasi Dana)	55,050,000	41,163,000							
	<u>Keluaran (Output) :</u>									
	Terlaksananya konsultasi publik perubahan RPJMD			29	29	OPD				
	<u>Hasil (Outcome) :</u>									
	tersedianya masukan penyempurnaan atas rancangan awal RPJMD						100	100	%	
4.03.4.03.01.21.046	Forum OPD dan FGD RPJMD									
	<u>Masukan (Input):</u>									
	Dana (Alokasi Dana)	113,467,000	112,488,000							
	<u>Keluaran (Output) :</u>									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Terlaksananya Forum OPD dan FGD Perubahan RPJMD			29	29	OPD				
	<u>Hasil (Outcome) :</u>									
	tersedianya harmonisasi usulan partisipatif dan teknokratif antar DPRD						100	100	%	
4.03.4.03.01.21.047	Pelaksanaan verifikasi Renstra OPD									
	<u>Masukan (Input) :</u>									
	Dana (Alokasi Dana)	114,700,000	107,884,000							
	<u>Keluaran (Output) :</u>									
	Terlaksananya verifikasi perubahan Renstra OPD			29	29	OPD				
	<u>Hasil (Outcome) :</u>									
	terverifikasinya rancangan renstra OPD						100	100	%	
4.03.4.03.01.21.049	Penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis									
	<u>Masukan (Input) :</u>									
	Dana (Alokasi Dana)	170,650,000	166,007,310							
	<u>Keluaran (Output) :</u>									
	Tersusunnya dokumen kajian lingkungan hidup strategis			1	1	dokumen				
	<u>Hasil (Outcome) :</u>									
	tersedianya kajian program RPJMD yang integratif dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan						100	100	%	
4.03.4.03.01.21.064	Penyusunan Standar Satuan Harga									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Masukan (Input):</u>									
	Dana (Alokasi Dana)	133,000,000	126,419,134							
	<u>Keluaran (Output):</u>									
	Buku Standarisasi Harga			2	2	dokumen				
	<u>Hasil (Outcome):</u>									
	tersedianya pedoman penyusunan perencanaan anggaran						100	100	%	
4.03.4.03.01.21.066	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Smart City									
	<u>Masukan (Input):</u>									
	Dana (Alokasi Dana)	111,000,000	110,920,983							
	<u>Keluaran (Output):</u>									
	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi pelaksanaan masterplan smartcity			4	4	laporan				
	<u>Hasil (Outcome):</u>									
	Tercapai target indikator program pembangunan smartcity tahun anggaran 2019						100	100	%	
4.03.4.03.01.21.075	Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)									
	<u>Masukan (Input):</u>									
	Dana (Alokasi Dana)	262,660,000	243,109,278							
	<u>Keluaran (Output):</u>									
	Tersusunnya perubahan RPJMD			29	29	OPD				
	<u>Hasil (Outcome):</u>									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	tersedianya rancangan Perda tentang perubahan RPJMD						100	100	%	
4.03.4.03.01.21.079	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah									
	<u>Masukan (Input):</u>									
	Dana (Alokasi Dana)	1,252,061,000	1,186,574,649							
	<u>Keluaran (Output) :</u>									
	terlaksananya kegiatan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah			6	6	laporan				
	<u>Hasil (Outcome) :</u>									
	Tersedianya sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah						100	100	%	
	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi									
4.03.4.03.01.22.047	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi									
	<u>Masukan (Input):</u>									
	Dana (Alokasi Dana)	127,883,000	126,122,142							
	<u>Keluaran (Output) :</u>									
	tingkat implementasi perencanaan bidang ekonomi dan prasarana wilayah			1	1	dokumen				
	<u>Hasil (Outcome) :</u>									
	Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi dan prasarana wilayah						100	100	%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.03.4.03.01.22.052	Penyusunan Dokumen Pengembangan Kebun Raya Gunung Tidar									
	<u>Masukan (Input):</u>									
	Dana (Alokasi Dana)	490,951,000	396,528,875							
	<u>Keluaran (Output) :</u>									
	tersusunnya dokumen rencana induk pengembangan Kebun Raya Gunung Tidar			1	1	dokumen				
	<u>Hasil (Outcome) :</u>									
	Tersedianya arahan pengembangan Kebun Raya Gunung Tidar						100	100	%	
4.03.4.03.01.22.064	Penyusunan Dokumen Perencanaan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro (KUM) Berbasis Ekonomi Lokal									
	<u>Masukan (Input):</u>									
	Dana (Alokasi Dana)	161,432,000	152,896,500							
	<u>Keluaran (Output) :</u>									
	tersedianya dokumen perencanaan peningkatan daya saing KUM			1	1	dokumen				
	<u>Hasil (Outcome) :</u>									
	tersedianya acuan dalam peningkatan daya saing koperasi dan Usaha Mikro (KUM)						100	100	%	
4.03.4.03.01..22.067	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Magelang Kota Sejuta Bunga									
	<u>Masukan (Input):</u>									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dana (Alokasi Dana)	104,352,000	100,321,000							
	<u>Keluaran (Output) :</u>									
	Tersedianya dokumen tindak lanjut MKSB			1	1	dokumen				
	<u>Hasil (Outcome) :</u>									
	Termonitoring dan evaluasi pelaksanaan Magelang Kota Sejuta Bunga						100	100	%	
	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya									
4.03.4.03.01.23.038	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi									
	<u>Masukan (Input) :</u>									
	Dana (Alokasi Dana)	28,214,000	23,829,700							
	<u>Keluaran (Output) :</u>									
	Jumlah Laporan Monev			4	4	laporan				
	<u>Hasil (Outcome) :</u>									
	Terlaksananya pemantauan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan urusan di bidang Pemsosbud						100	100	%	
4.03.4.03.01.23.050	Penyusunan Masterplan Pemberdayaan Masyarakat									
	<u>Masukan (Input) :</u>									
	Dana (Alokasi Dana)	155,827,000	148,291,900							
	<u>Keluaran (Output) :</u>									
	Adanya pedoman pemberdayaan masyarakat di Kota Magelang			25	25	buku				
	<u>Hasil (Outcome) :</u>									

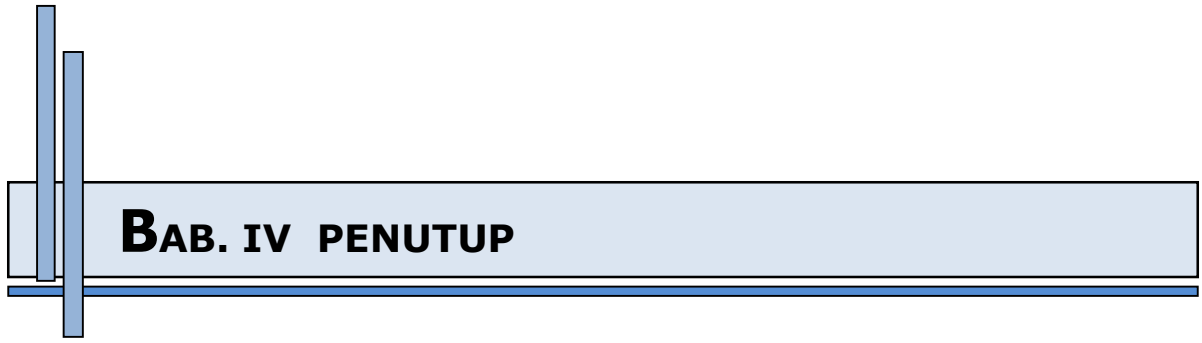
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	terlaksananya penyusunan dokumen rencana induk pemberdayaan masyarakat						100	100	%	
4.03.4.03.01.23.052	Penyusunan Laporan Dokumen Perencanaan Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi									
	<u>Masukan (Input):</u>									
	Dana (Alokasi Dana)	153,552,000	142,426,280							
	<u>Keluaran (Output) :</u>									
	Tersusunnya dokumen perencanaan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi			1	1	dokumen				
	<u>Hasil (Outcome) :</u>									
	terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi						100	100	%	
4.03.4.03.01.23.947	Penyusunan Dokumen Masterplan Wisata Diponegoro									
	<u>Masukan (Input):</u>									
	Dana (Alokasi Dana)	152,373,000	143,638,411							
	<u>Keluaran (Output) :</u>									
	Tersusunnya Dokumen Masterplan Wisata Diponegoro			1	1	dokumen				
	<u>Hasil (Outcome) :</u>									
	terlaksananya penyusunan dokumen Masterplan Wisata Diponegoro						100	100	%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana									
4.03.4.03.01.26.015	Penyusunan Dokumen Visualisasi Kawasan Strategis dan Prioritas Daerah									
	<u>Masukan (Input):</u>									
	Dana (Alokasi Dana)	95,602,000	90,531,000							
	<u>Keluaran (Output) :</u>									
	Tersedianya arahan visual pengembangan kawasan prioritas yang segera untuk ditangani : koridor jalan, taman, landmark, lapangan olahraga, PKL dsb			1	1	dokumen				
	<u>Hasil (Outcome) :</u>									
	tersedianya design Imaginasi awal pengembangan kawasan strategis dan prioritas daerah yang potensial dikembangkan						100	100	%	
4.03.4.03.01.26.024	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kawasan Strategis									
	<u>Masukan (Input):</u>									
	Dana (Alokasi Dana)	25,000,000	23,559,500							
	<u>Keluaran (Output) :</u>									
	Tersedianya dokumen capaian kawasan strategis			1	1	dokumen				
	<u>Hasil (Outcome) :</u>									
	teridentifikasi progres, hambatan, dan kendala serta solusi pemecahan masalah dalam implementasi kawasan strategi						100	100	%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.03.4.03.01.26.039	Review Masterplan Kawasan GOR Samapta									
	<u>Masukan (Input):</u>									
	Dana (Alokasi Dana)	254,000,000	242,912,000							
	<u>Keluaran (Output) :</u>									
	tersedianya dokumen arahan pengembangan dan pembangunan kawasan strategis daerah berupa rencana induk			1	1	dokumen				
	<u>Hasil (Outcome) :</u>									
	Tersedianya arahan pengembangan kawasan GOR Samapta						100	100	%	
4.03.4.03.01.26.041	Review Masterplan Kawasan Soekarno-Hatta									
	<u>Masukan (Input):</u>									
	Dana (Alokasi Dana)	209,000,000	184,354,500							
	<u>Keluaran (Output) :</u>									
	Tersedianya dokumen arahan pengembangan dan pembangunan Kawasan Strategis Daerah berupa rencana induk			1	1	dokumen				
	<u>Hasil (Outcome) :</u>									
	Tersedianya arahan pengembangan Kawasan Soekarno Hatta						100	100	%	
4.03.4.03.01.26.043	Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)									
	<u>Masukan (Input):</u>									
	Dana (Alokasi Dana)	294,000,000	277,749,500							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Keluaran (Output) :</u>									
	Tersedianya dokumen review rencana induk sistem penyediaan air minum			1	1	dokumen				
	<u>Hasil (Outcome) :</u>									
	Tersedianya arahan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum						100	100	%	
4.03.4.03.01...26.044	Penyusunan Masterplan Taman Kota Magelang									
	<u>Masukan (Input):</u>									
	Dana (Alokasi Dana)	355,406,000	351,953,812							
	<u>Keluaran (Output) :</u>									
	Tersedianya Dokumen Masterplan Taman Kota Magelang			1	1	dokumen				
	<u>Hasil (Outcome) :</u>									
	Tersedianya arahan pengembangan Taman di Kota Magelang						100	100	%	
4.03.4.03.01.26.045	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Perumahan, Pemukiman, Air Minum dan Sanitasi Kota Magelang									
	<u>Masukan (Input):</u>									
	Dana (Alokasi Dana)	139,000,000	132,362,636							
	<u>Keluaran (Output) :</u>									
	Tersedianya dokumen capaian terhadap pemenuhan kebutuhan rumah di lingkungan yang aman dan sehat serta akses layanan air minum dan sanitasi untuk masyarakat			1	1	laporan				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Hasil (Outcome) :</u>									
	Teridentifikasi progres, hambatan dan kendala serta solusi pemecahan masalah di bidang perumahan, pemukiman, air minum dan sanitasi di Kota Magelang						100	100	%	
4.03.4.03.01.26.049	Penyusunan Masterplan Kampung Tematik, Terpadu dan Hijau									
	<u>Masukan (Input):</u>									
	Dana (Alokasi Dana)	74,000,000	73,600,800							
	<u>Keluaran (Output) :</u>									
	Tersedianya dokumen perencanaan Kampung Tematik, Terpadu dan Hijau			1	1	dokumen				
	<u>Hasil (Outcome) :</u>									
	Teridentifikasi kebijakan, program, dan strategi pengembangan Kampung Tematik, Terpadu dan Hijau di Kota Magelang						100	100	%	
	JUMLAH	7,523,512,000	7,100,747,337							



BAB. IV PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pengukuran kinerja dan Evaluasi Kinerja sebagaimana yang telah di uraikan pada Bab sebelumnya maka dapat di simpulkan bahwa capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Magelang tahun 2019 sebagai berikut:

- a. Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang pada tahun 2019 sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dengan Walikota Magelang yang di ukur dari 5 sasaran strategis. Ke lima sasaran strategis tersebut, 2 kinerja sasaran strategis terdapat di dalam misi pertama RPJMD yaitu sasaran terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel dan sasaran Meningkatkan kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan. Adapun kedua sasaran tersebut mempunyai empat indikator kinerja a). Persentasi capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja; b). Persentase Publikasi data dan statistik sektoral yang di dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan; c). Prosentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD, dan d).Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga.

Selain dua sasaran tersebut di atas, kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang di ukur dengan 3 sasaran strategis yang terdapat di dalam Surat Keputusan Kepala Bappeda Kota Magelang Nomor : 050.25/101.06 /410 TAHUN 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2019-2021. Ketiga sasaran tersebut yaitu: a). Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Indikator dari sasaran ini adalah Cakupan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif; b). Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Sasaran ini berindikator Cakupan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan; c). Mewujudkan dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasana dan bidang sosial budaya yang berkualitas. Sasaran ini mempunyai indikator kinerja sasaran Cakupan ketersediaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasana dan bidang sosial budaya yang berkualitas

b. Penjelasan dari capaian lima sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang sebagai berikut :

- Capaian untuk sasaran pertama dapat di lihat dari indikator kinerja sasaran yaitu Persentase capaian Sasaran Pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja menunjukkan capaian yang cukup baik. Realisasi kinerja pada tahun Namun pada tahun **2019** realisasi agak menurun ke angka **72,29 %** (*Capaian tahun 2019 dari 83 indikator sasaran yang di amanatkan terdapat 60 indkator yang tercapai*) dari target yang di tetapkan di awal tahun sebesar **95%**. Capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar **76,09%**. Meski mengalami pelambatan pencapaian target pada tahun 2019 namun demikian beberapa indikator hampir mencapai target dan sisanya masih perlu upaya keras untuk mencapainya. Selain itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan performance OPD yang mengemban dan merealisasikan setiap target pada sasaran dalam RPJMD dan memastikan segala sesuatunya berada pada *track* yang benar. Semakin baik pencapaian sasaran ini maka akan memberikan daya ungkit yang lebih baik pada tahun-tahun berikutnya.

- Sementara untuk Indikator kedua pada sasaran pertama yaitu indikator Persentase publikasi data dan statistik sektoral yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan, Implikasi dari indikator ini melibatkan Profil Daerah (Bappeda) dan *Data Go* (Dinskominsta). Untuk Profil daerah (SIPD), Indikator Persentase Publikasi Data dan Statistik Sektoral yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan dihitung dengan formulasi jumlah publikasi data di bagi dengan jumlah publikasi data yang dibutuhkan (di mana data yang di butuhkan ini meliputi data strategis daerah, analisis indakor ekonomi, analisis inikator sosial Kota Magelang, Tabel IO Kota Magelang serta Analisis Ketimpangan Wilayah). Indikator ini dilaksanakan oleh dua OPD yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dan Diskomista Kota Magelang

Realisasi indikator kinerja Persentase publikasi data dan statistik sektoral yang di dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2019 bila dihitung secara rata-rata dari kedua komponen diatas adalah sebesar **99,71%** dari target sebesar 80% dengan tingkat capaian kinerja indikator sebesar **124.64%**. Jumlah dan jenis data yang terpublikasi melalui *DataGo* Diskominsta dengan realisasi capaian sebesar 99,42% dan capaian realisasi untuk jenis data dalam SIPD Kota Magelang sebesar 100% (Data / informasi dan indikator makro yang tersaji dalam Buku Profil Daerah seluruhnya dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan atau capaiannya 100%). Capaian sebesar 99,42% tersebut dapat di jelaskan di dalam definisi operasional indikator ini

untuk publikasi data yang di butuhkan meliputi 5 data yaitu Data Strategis Daerah, Analisis Indikator Ekonomi, analisis Indikator Sosial Kota Magelang, Tabel IO Kota Magelang dan Analisis Ketimpangan Wilayah, dalam capaian di tahun 2019 dari 5 data yang di butuhkan tersebut baru 3 data yang terpenuhi yaitu Data Strategis Daerah, Analisis Indikator Ekonomi, analisis Indikator Sosial Kota Magelang. Capaian dari indikator ini harus terus ditingkatkan hingga akhir periode RPJMD mengingat data merupakan hal yang sangat vital di dalam pengambilan kebijakan dan menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan.

- Untuk mengukur kinerja dari sasaran strategis kedua yaitu meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan. Sasaran ini mempunyai 2 (dua) indikator yang yang merepresentasikan keberhasilan dari capaian kinerjanya. Indikator sasaran yang pertama yaitu Prosentase Usulan Masyarakat yang di akomodir dalam APBD Persentase usulan masyarakat yang di komodir dalam APBD mempunyai formulasi perhitungan jumlah usulan masyarakat yang di akomodir didalam APBD di bagi dengan jumlah usulan masyarakat. Berdasarkan data yang di olah, jumlah usulan masyarakat. Realisasi usulan masyarakat yang di akomodir di dalam APBD sebesar **81,48%**. Realisasi indikator ini melebihi dari target yang di rencanakan pada tahun 2019 yaitu sebesar 80% bahkan melebihi target pada akhir tahun perencanaan di dokumen RPJMD yang di targetkan sebesar 70%. Adapun capaian kinerja dari indikator pada tahun 2019 sebesar **101,85%**.
- Sementara itu untuk indikator kedua dari Sasaran ke dua adalah Cakupan Perangkat Daerah yang Mempunyai Mitra dengan Forum Warga pada tahun 2015 tercapai 44,83% kemudian naik menjadi 55,17% pada tahun 2016. Capaian tahun 2017 jumlah OPD yang mempunyai mitra pada tahun tersebut sebanyak **17 OPD (58.62%)**. Capaian pada tahun 2018 sebesar 65,52%. Berdasarkan data yang di olah, jumlah OPD yang mempunyai mitra pada tahun 2019 sebanyak **19 OPD** dan ini masih sama dengan tahun 2018. Apabila di prosentasekan maka PD yang bermitra dengan Forum Warga sebesar **65.52%** (jumlah OPD yang ada di Kota Magelang sebanyak 29 OPD). Realisasi indikator ini belum sesuai dengan target yang di rencanakan pada tahun 2019 yaitu sebesar **65.52%** dengan kata lain mencapai target yang telah di ditetapkan di awal perencanaan tahun 2019 sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%.
- Sasaran Strategis yang ke tiga yaitu mengoptimalkan mekanime perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Tehnologi Informasi dan Komunikas mempunyai satu indikator kinerja yang di

pergunakan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis yaitu Cakupan kualitas perencanaan partisipatif. Indikator Cakupan kualitas perencanaan partisipatif merupakan indikator komposit dari persentase usulan program kegiatan hasil Musrenbang yang diakomodir dalam Renja OPD ditambah persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir dalam RKPD ditambah persentase Usulan konsultasi publik yang diakomodir dalam renja OPD ditambah persentase usulan masyarakat di *E- Aspirasi* yang terakomodir dalam Renja PD dibagi 4. Capaian indikator cakupan kualitas perencanaan partisipatif menunjukkan kondisi yang baik. Dari target **62,50%** pada tahun 2019, realisasi indikator kinerjanya sebesar **74.99%**, melebihi dari target yang di rencanakan. Adapun capaian kinerja indikator ini sebesar **119,99%**. Capaian dari indikator – indikator komposit tersebut menunjukkan semakin berkualitasnya perencanaan yang di susun dengan adanya pelibatan dan partisipasi masyarakat yang meningkat sehingga upaya untuk mengoptimalkan mekanisme merencanakan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

- Sasaran strategis yang ke empat adalah “mewujudkan Konsistensi Perencanaan Jangka Menengah dengan Perencanaan Tahunan”. Indikator yang merepresentasikan sasaran ini adalah Cakupan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Indikator kinerja ini di pergunakan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis serta merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Magelang untuk mewujudkan kesinambungan dan integrasi perencanaan Jangka Menengah dan Perencanaan Tahunan. Pencapaian dari indikator ini merupakan indikator komposit dari persentase tingkat keselarasan Renstra PD dengan Renja PD di tambah persentase tingkat keselarasan RPJMD dengan Renstra PD di tambah Prosentase tingkat keselarasan RPJMD dengan RKPD di bagi 3. Capaian sasaran ini dari target sebesar **100%** tercapai sesuai target yaitu **100%**
- sasaran yang ke lima yaitu “ Mewujudkan Dokumen Perencanaan dan Implementasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Bidang Fisik Prasarana dan Bidang Sosial Budaya yang Berkualitas” mempunyai satu indikator kinerja yang merepresentasikan sasaran ini adalah Cakupan Ketersediaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasarana dan bidang sosial budaya yang berkualitas. Indikator kinerja ini di pergunakan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis tersebut. Pencapaian dari indikator ini merupakan indikator komposit dari persentase implementasi perencanaan bidang ekonomi,

sosial budaya dan fisik prasarana di tambah persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana dibagi 2. Capaian tahun 2019 untuk indikator Ketersediaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasarana dan bidang sosial budaya yang berkualitas melebihi target yang di rencanakan. Pada tahun **2019** direncanakan target kinerja sebesar **75%** adapun capaian realisasinya sebesar **76.80%** sehingga capaian kinerja dari indikator tersebut sebenar **102.40%**.

- c. Untuk mewujudkan pencapaian indikator RPJMD maka dalam Renstra Bappeda telah di rencanakan program – program dan kegiatan yang nantinya di dukung dengan alokasi anggaran dan belanja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Magelang. Pada Tahun anggaran 2019 ini pencapaian indikator kinerja daerah di dilaksanakan oleh 11 program dan 68 kegiatan.
- d. Dari evaluasi terhadap 68 (enam puluh delapan) kegiatan yang di laksanakan Bappeda pada tahun 2019 capaian output (fisik) kegiatan secara keseluruhan terhadap program dan kegiatan yang di laksanakan tahun anggaran 2019 seluruhnya sebesar 100%.
- e. Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang pada tahun **2019** sebesar **Rp.11.053.100.000,-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp.10.441.142.584,-** atau sebesar **94.46%**. Capaian ini lebih baik apabila di bandingkan dengan realisasi pada tahun 2018, yakni 94,19% ataupun tahun 2016 yang serapannya sebesar 91.32%. Realisasi anggaran pada tahun 2019 merupakan realisasi anggaran yang terbaik dalam 3 tahun terakhir ini. Realisasi anggaran pada tahun 2019 menunjukkan *trend* yang meningkat di semua rekening belanja baik itu belanja tidak langsung ataupun di rekening belanja langsung yang terdiri dari 3 komponen belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa maupun belanja Modal. Realisasi belanja di semua komponen Belanja Langsung maupun belanja tidak langsung, semuanya di atas 90%.

f. Capaian dari indikator Program yang di laksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019 sebagai berikut :

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2019	Realisasi 2019	Kinerja RKPD Th.2019
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100%	100%	100%	100%
		Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir	90 %	75%	84,55%	100,18%
		Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir	85 %	75%	88,71%	101,33%
		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik	55 %	40%	45,24%	171.16%
		Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	85%	76%	81,48%	105,26%
2	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi	100%	100 %	100 %	100%
3	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang sosial budaya	100%	100%	100%	100%
4	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik Prasarana	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang fisik prasarana	100%	100%	100%	100%
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD	a. Rasio aparatur perencanaan berdasarkan belakang pendidikan : S1 S2	31% 55%	37% 50%	42% 45%	115% 91%

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2019	Realisasi 2019	Kinerja RKPD Th.2019
		b. Rasio aparatur perencanaan yang mengikuti pelatihan perencanaan dan penganggaran	95%	90%	100%	111%
		c. Cakupan seminar/ workshop / pelatihan yang diselenggarakan Bappeda	100%	98%	100%	102%
		d. cakupan peningkatan kapasitas aparatur perencana OPD	100%	100%	100%	100%

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Untuk lebih meningkatkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Magelang serta langkah ke depan untuk meningkatkan kinerja guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Terus mendorong dan mengimplementasikan sistem dan mekanisme forum perencanaan daerah yang partisipatif, transparansi dan akuntabel serta mengutamakan pelibatan masyarakat secara komprehensif, sehingga menghasilkan suatu perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan berkeadilan;
2. Peningkatan kapasitas *core business* perencanaan dan penguatan mindset organisasi pembelajar yang tangguh dan antisipatif terhadap dinamika yang berkembang.
3. Mengupayakan peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparatur perencana daerah yang berwawasan luas dalam memahami konsep pemerintahan yang baik (*good governance*), desentralisasi dan demokratisasi serta meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya aparatur perencanaan Bappeda melalui bintek, diklat, pendidikan formal perencanaan serta kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi.
4. Penyusunan dokumen - dokumen perencanaan yang mengedepankan pembangunan keberlanjutan yang di dukung dengan data dan informasi bagi penguatan perencanaan daerah dan hasil-hasil penelitian.

5. peningkatan pengelolaan administrasi, data dan kearsipan yang di dukung dengan sarana prasarana yang cukup dan staf dengan kompetensi pendidikan yang memadai untuk mendukung kegiatan perencanaan.
6. Membuat database dan sistem informasi pembangunan daerah yang mencakup sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pembangunan yang berbasis teknologi informatika.
7. Meningkatkan koordinasi dalam menyusun dan menerapkan kebijakan dan program terkait dengan penanganan permasalahan - permasalahan di bidang fisik prasarana, bidang ekonomi dan bidang sosial budaya secara komprehensif dan terpadu;
8. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan.
9. Meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada, struktur organisasi dengan jumlah staf yang cukup dengan kompetensi pendidikan yang memadai dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga perencanaan;
10. Mengelola anggaran dengan lebih efisien, efektif dan akuntabilitas dengan memperjelas arah kebijakan organisasi dalam penggunaan anggaran.
11. Melakukan penguatan data untuk mendukung proses perencanaan, meskipun dari tahun ke tahun sudah mengalami kemajuan, proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian/telaahan, masih perlu dilakukan penguatan sehingga mampu menjadi dasar analisis kebijakan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik.
12. Melakukan pendekatan pemikiran dan langkah yang kreatif dan inovatif untuk menghadapi tantangan pada fungsi perencanaan semakin tinggi, seiring kompleksitas dan tuntutan akselerasi atas kesejahteraan masyarakat dihadapkan dengan berbagai kondisi permasalahan bangsa yang semakin kompleks serta dinamika global.
13. Melakukan inovasi tiada henti baik dalam tataran inovasi perencanaan pembangunan dan inovasi yang berupa terobosan kebijakan yang out of the box yang berorientasi pada kecepatan dan kualitas pelayanan publik dan akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan indikator yang ada. Hal ini bisa terwujud dengan implementasi skenario *Continuous Improvement* dimulai pada hal-hal kecil hingga menjadi budaya kerja berbasis perbaikan berkesinambungan